

## **BAB II**

# **EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

### **2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah**

#### **2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi**

Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang terletak antara 07°9' s.d 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d 112°54' Bujur Timur. Luas wilayah Kota Surabaya seluruhnya kurang lebih 326,36 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 31 Kecamatan dan 154 Desa/Kelurahan. Batas wilayah Kota Surabaya yaitu batas sebelah utara adalah Laut Jawa dan Selat Madura, batas sebelah selatan merupakan Kabupaten Sidoarjo, batas sebelah barat merupakan Kabupaten Gresik, serta batas sebelah timur adalah Selat Madura.

Secara topografi, sebagian besar wilayah Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut pada kemiringan kurang dari 3 persen. Wilayah barat Kota Surabaya memiliki kemiringan sebesar 12,77 persen dan sebelah selatan sebesar 6,52 persen. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 persen.

Jenis batuan yang ada terdiri dari 4 jenis yang pada dasarnya merupakan tanah liat atau unit-unit pasir. Sedangkan jenis tanah, sebagian besar berupa tanah alluvial, selebihnya tanah dengan kadar kapur yang tinggi (daerah perbukitan). Sebagaimana daerah tropis lainnya, Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Curah hujan rata-rata 172 mm, dengan temperatur berkisar maksimum 30°C dan minimum 25°C.

Secara geografis, Kota Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, yaitu Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Jagir, dan Kali Lamong. Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya sehingga dengan sendirinya Kota Surabaya merupakan daerah limpan debit air dari sungai yang melintas sehingga rawan banjir pada musim penghujan.

Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya terdiri dari 31 kecamatan, 154 kelurahan, 1368 Rukun Warga (RW) dan 9118 Rukun Tetangga (RT). Kota Surabaya adalah kota metropolitan kedua setelah Jakarta, Surabaya secara pola ruang perkembangannya terbagi menjadi:

1. Area permukiman vertikal baik berupa rumah susun (sederhana) maupun apartemen atau kondominium tersebar di hampir seluruh penjuru Kota Surabaya, sedangkan area permukiman diarahkan berkembang ke arah barat, timur dan selatan kota.
2. Area untuk kegiatan jasa dan perdagangan yang dipusatkan di kawasan pusat kota dan pusat-pusat sub kota dan unit pengembangan serta di kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan strategis ekonomi antara lain di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan kawasan Teluk Lamong;
3. Area untuk kegiatan industri dan pergudangan terkonsentrasi di kawasan pesisir utara di kawasan sekitar Pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong, dan kawasan selatan kota yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gresik dan Sidoarjo;
4. Wilayah pesisir khususnya ruang darat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi antara lain permukiman nelayan, tambak garam dan ikan, pergudangan, militer, industri kapal, pelabuhan, wisata pesisir sampai dengan fungsi kawasan lindung di Pantai Timur Surabaya serta terdapat aksesibilitas berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan Kota Surabaya dan Pulau Madura (Jembatan Suramadu) dan Jembatan Sukolilo Lor – THP Kenjeran yang membuka akses di kawasan sisi timur laut Kota Surabaya;
5. Wilayah Ruang laut Surabaya selain dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran baik interinsulair maupun internasional, juga dikembangkan untuk kegiatan penangkapan ikan tradisional, wisata pantai di Kenjeran dan sekitarnya dan kawasan lindung laut di sekitar Pantai Timur Surabaya.

#### **2.1.1.1. Potensi Pengembangan Wilayah**

Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis pada skala nasional sebagai pusat pelayanan kegiatan Indonesia Timur, dan pada skala regional sebagai kota perdagangan dan jasa yang pada simpul transportasi (darat, udara dan laut) nasional dan internasional sehingga memberi

peluang bagi Kota Surabaya untuk meningkatkan perannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Letak Kota Surabaya sangat strategis, menghubungkan antara Kota Surabaya dengan kota-kota di sekitarnya yaitu kota/kabupaten yang ada dalam Gerbangkertosusilo, sehingga sangat mendukung percepatan pembangunan di Kota Surabaya. Demikian juga sebaliknya, pertumbuhan Kota Surabaya juga berpengaruh pada perkembangan kota/kabupaten di sekitarnya, secara sektoral maupun keruangan.

Kota Surabaya memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah kota di masa mendatang, diantaranya adalah :

a) Kawasan Strategis untuk Pendukung Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan-kawasan yang akan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah :

- Kawasan Pergudangan dan Industri Margomulyo di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun

Ditinjau dari aksesibilitas karena letaknya berdekatan dengan pelabuhan Tanjung Perak dan Jalan Tol Sidoarjo–Surabaya–Gresik, Kawasan Industri dan Pergudangan Margomulyo merupakan kawasan strategis untuk dioptimalisasi dan dikembangkan dengan orientasi pada *industry smart and clean* dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai.



Gambar II. 1 Lokasi dan Peran Kota Surabaya

- Kawasan Tunjungan dan sekitarnya di Kecamatan Bubutan berada di Unit Pengembangan VI Tunjungan

Sebagai kawasan pusat perdagangan dan perkantoran, kawasan Tunjungan merupakan salah satu pusat kota yang sangat potensial untuk terus dikembangkan karena memiliki sejarah dan mengalami masa keemasan pada dekade 1940 hingga akhir 1970an dengan karakteristik *shopping-street* dan *shopping arcade*, sehingga dikenal dan menjadi salah satu *icon* kota Surabaya dengan Jargon “Rek Ayo Rek Mlaku – Mlaku nang Tunjungan”. Kawasan ini memerlukan penanganan dan pengelolaan yang optimal untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya.

- Kawasan Kaki Jembatan Wilayah Suramadu-Pantai Kenjeran dan Kawasan Kota Tepi Pantai (Waterfront City) di Kecamatan Bulak berada di Unit Pengembangan III Tambak Wedi, merupakan kawasan strategis ditinjau dari lokasinya yang berada di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan pesisir Pantai Bulak - Kenjeran yang memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai wisata pesisir dan laut. Keberadaan Jembatan Suramadu dan Pantai Kenjeran diharapkan dapat memberikan peningkatan potensi dan peran Kota

Surabaya, sebagai pusat kegiatan regional. Di samping itu, kawasan ini memiliki potensi sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala regional seperti terlihat pada data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kecamatan Bulak.

**Tabel II. 1**  
**PDRB Kecamatan Bulak Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2014–Triwulan I 2017 (dalam Milyar Rp)**

KODE	KATEGORI LAPANGAN USAHA	TAHUN			
		2014	2015	2016	Triwulan I 2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	91,12	91,88	N/A	N/A
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	N/A	N/A
C	Industri Pengolahan	560,71	584,98	N/A	N/A
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,59	3,6	N/A	N/A
E	Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,25	5,53	N/A	N/A
F	Konstruksi	471,4	489,79	N/A	N/A
G	Perdag. Besar&Eceran; Reparasi Mobil & Motor	1.190,44	1.240,22	N/A	N/A
H	Transportasi dan Pergudangan	138,23	149,77	N/A	N/A
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.314,09	1.427,79	N/A	N/A
J	Informasi dan Komunikasi	226,29	241,59	N/A	N/A
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	37,25	40,36	N/A	N/A
L	Real Estate	176,82	185,79	N/A	N/A
M,N	Jasa Perusahaan	45,15	47,03	N/A	N/A
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	48,81	50,77	N/A	N/A
P	Jasa Pendidikan	50,77	53,36	N/A	N/A
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,86	4,19	N/A	N/A
R,S,T,U	Jasa lainnya	12,8	13,25	N/A	N/A

Sumber: PDRB Kecamatan Bulak, 2017

- Kawasan Kota Tepi Pantai (Waterfront City) di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan strategis dengan konsep pengembangan penggunaan lahan *mixed-use* pendukung kawasan pelabuhan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong sebagai kawasan pelabuhan penunjalakng Pelabuhan Utama Tanjung Perak.
- Kawasan Terpadu Surabaya Barat di Kecamatan Pakal di Unit Pengembangan XII Sambikerep dan Benowo di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan terpadu yang pusatnya akan dikembangkan di Stadion Gelora Bung Tomo sebagai pusat olahraga berskala nasional dan akan terintegrasi dengan pengembangan fungsi perdagangan dan jasa di sekitarnya.

b) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan yang dikembangkan dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah kawasan adat tertentu, kawasan dan konservasi warisan budaya. Kawasan strategis sosial-budaya yang ada di Kota Surabaya adalah :

- Kawasan Makam Sunan Ampel di Kecamatan Semampir berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, yang merupakan kawasan cagar budaya dengan karakter dan daya tarik kuat sebagai obyek wisata ziarah di Indonesia yang berkembang tidak hanya sebagai kampung budaya yang khas dengan beragam aktivitasnya tetapi juga memiliki kultur religi yang kuat.
- Kawasan Kota Lama Surabaya di Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Semampir dan Kecamatan Bubutan berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak dan Unit Pengembangan VI Tunjungan. Kawasan ini merupakan kawasan yang pada era kolonial terdelienasi sebagai kawasan eropa, kawasan arab dan kawasan cina.
- Bangunan dan lingkungan pada kawasan Darmo-Diponegoro serta kawasan kampung lama Tunjungan di Kecamatan Tegalsari berada di Unit Pengembangan VI Tunjungan yang merupakan kawasan bangunan dan lingkungan cagar budaya.

**Tabel II. 2**  
**Persebaran Situs, Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya di Tiap Kecamatan di Kota Surabaya**

No	Kecamatan	Jumlah Situs Cagar Budaya
1	Pabean Cantian	29
2	Krembangan	50
3	Genteng	64
4	Sawahan	9
5	Wonokromo	21
6	Gubeng	11
7	Tegalsari	27
8	Bubutan	30
9	Semampir	14
10	Tambaksari	7
11	Simokerto	8
12	Dukuh Pakis	1
13	Lakarsantri	2
14	Wonocolo	1
15	Gayungan	1
<b>Jumlah</b>		<b>273</b>

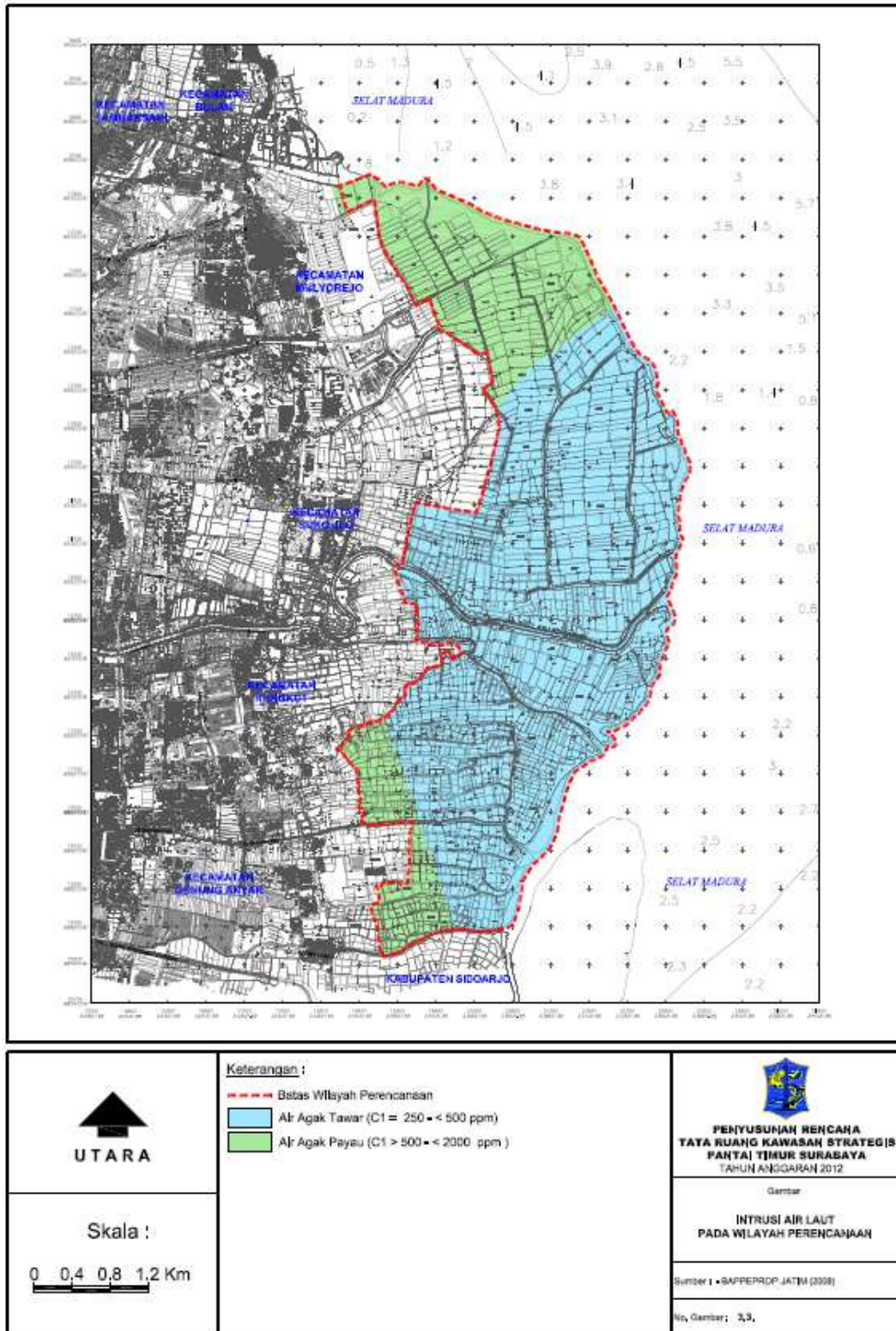
– Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2013

c) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Penyelamatan Lingkungan Hidup

Kawasan yang dikembangkan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kota Surabaya adalah:

- Kawasan Kebun Binatang Surabaya di Kecamatan Wonokromo berada di Unit Pengembangan VII Wonokromo, merupakan hutan kota di kawasan Wonokromo yang berfungsi sebagai tempat perlindungan satwa, hutan kota dan rekreasi alam, juga berperan dalam mengatur iklim mikro di Kota Surabaya. Melihat nilai strategis sebagai kawasan wisata dalam kota, maka keberadaan KBS harus dipertahankan dan dijaga kelestariannya.
- Kawasan Pantai Timur Surabaya di Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Mulyorejo, yang berada di Unit Pengembangan I Rungkut dan Unit Pengembangan II Kertajaya merupakan kawasan lindung alam berupa vegetasi mangrove yang berada di pesisir timur Kota Surabaya. Kawasan Mangrove Pamurbaya sangat berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan sebagai *barrier* alami dari proses

abrasi dan intrusi air laut. Kondisi instrusi air laut di kawasan mangrove Pamurbaya dapat dilihat pada peta berikut ini.



**Gambar II. 2**  
**Kondisi Instrusi Air Laut di Kawasan Mangrove Pamurbaya**



- Kawasan sekitar Kali Lamong di Kecamatan Benowo dan Kecamatan Pakal yang berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun dan Unit Pengembangan Sambikerep XII, merupakan kawasan perlindungan setempat/ sempadan sungai yang dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), penyediaan vegetasi, dan pendukung utilitas kota.

d) Kawasan Strategis Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan/atau teknologi tinggi adalah penghasil SDA yang sangat potensial untuk kepentingan masyarakat beserta perangkat atau instalasi pengolahannya atau kawasan khusus untuk pengembangan teknologi untuk kepentingan strategis negara dan kepentingan umum. Kawasan strategis SDA dan Teknologi Tinggi di Kota Surabaya adalah:

- Kawasan Industri Pengembangan Perkapalan di Kecamatan Pabean Cantian berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, merupakan salah satu kawasan yang digunakan dalam pengembangan teknologi perkapalan tingkat nasional. Sebagai industri perkapalan nasional, kawasan industri ini memiliki nilai strategis dan diperlukan upaya dalam menjaga dan meningkatkan nilai atau potensi kawasan tersebut.
- Kawasan industri/*industrial estate* di Kecamatan Rungkut berada di Unit Pengembangan I Rungkut, merupakan kawasan industri dan pergudangan yang telah lama berdiri di Kota Surabaya dan diarahkan menjadi kawasan industri dengan teknologi tinggi yang ramah lingkungan.
- Kawasan Depo dan Pengolahan BBM, berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak yang memiliki fungsi sebagai penyimpanan bahan bakar minyak dan pengelolaan BBM, sehingga kawasan ini memiliki nilai strategis dalam kaitannya dengan sistem energi di Kota Surabaya dan sekitarnya.
- Kawasan pengelolaan sampah teknologi tepat guna penghasil energi pada TPA Benowo di Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan yang digunakan untuk pemrosesan akhir sampah di Kota Surabaya dengan konsep: “*Waste to Energy*”.

Selain potensi pengembangan kawasan strategis, perkembangan Kota Surabaya juga didukung oleh pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang meliputi:

1. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak untuk Terminal Peti Kemas/Reklamasi di Teluk Lamong.
2. Pengembangan jaringan jalan arteri yang menghubungkan antar pusat utama kota dengan pusat kota di kabupaten yang berbatasan langsung.
3. Pengembangan jalur komuter/kereta api *double track* serta angkutan massal dan prasarana pendukungnya yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota.

### 2.1.1.2. Wilayah Rawan Bencana

Lokasi geografis Kota Surabaya tidak berhadapan langsung dengan samudera sehingga “relatif aman” dari bencana alam laut seperti tsunami. Namun pada perkembangannya sesuai dengan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditemukan potensi sumber gempa tektonik terbaru dari pergerakan Sesar Kendeng dari Surabaya ke arah barat sampai Jawa Tengah yang sebelumnya tidak teridentifikasi sebagaimana pada Gambar II.3



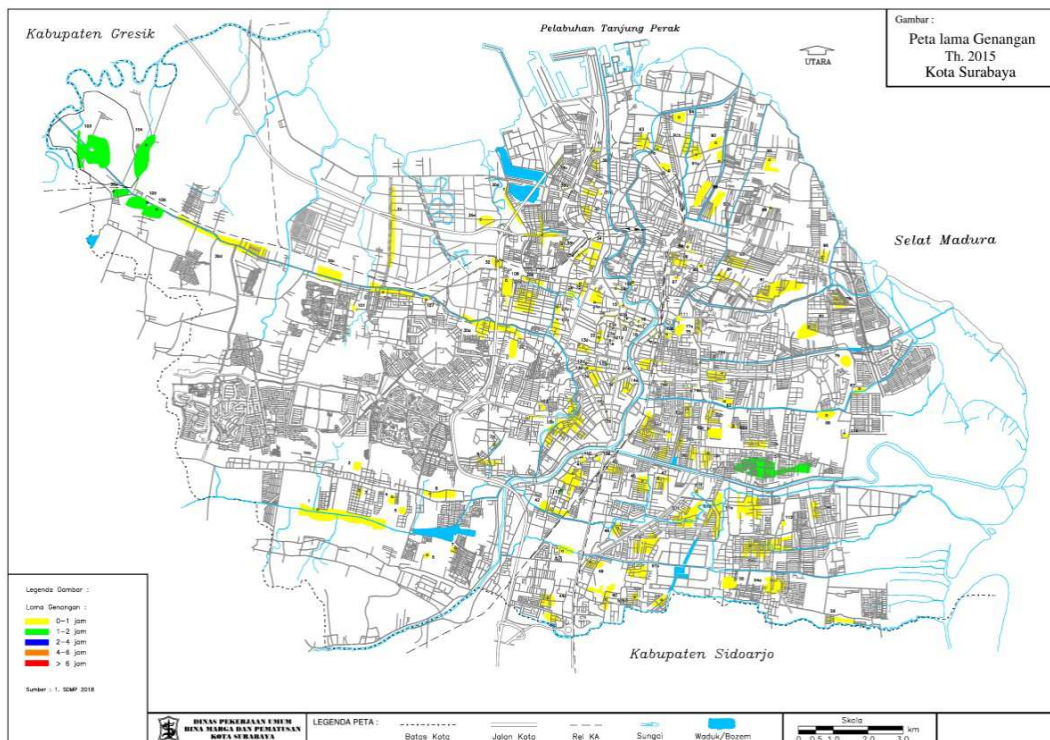
**Gambar II. 3**  
**Peta Sesar Kendeng**

Sumber: ([http://www.pu.go.id/main/view\\_pdf/11270](http://www.pu.go.id/main/view_pdf/11270))

Di samping itu Kota Surabaya diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan genangan air dari limpahan debit air sungai dan saluran pada musim penghujan serta banjir rob khususnya wilayah pesisir pantai Surabaya utara. Kawasan rawan genangan dan banjir rob di Kota Surabaya seperti dalam gambar peta sebagai berikut:

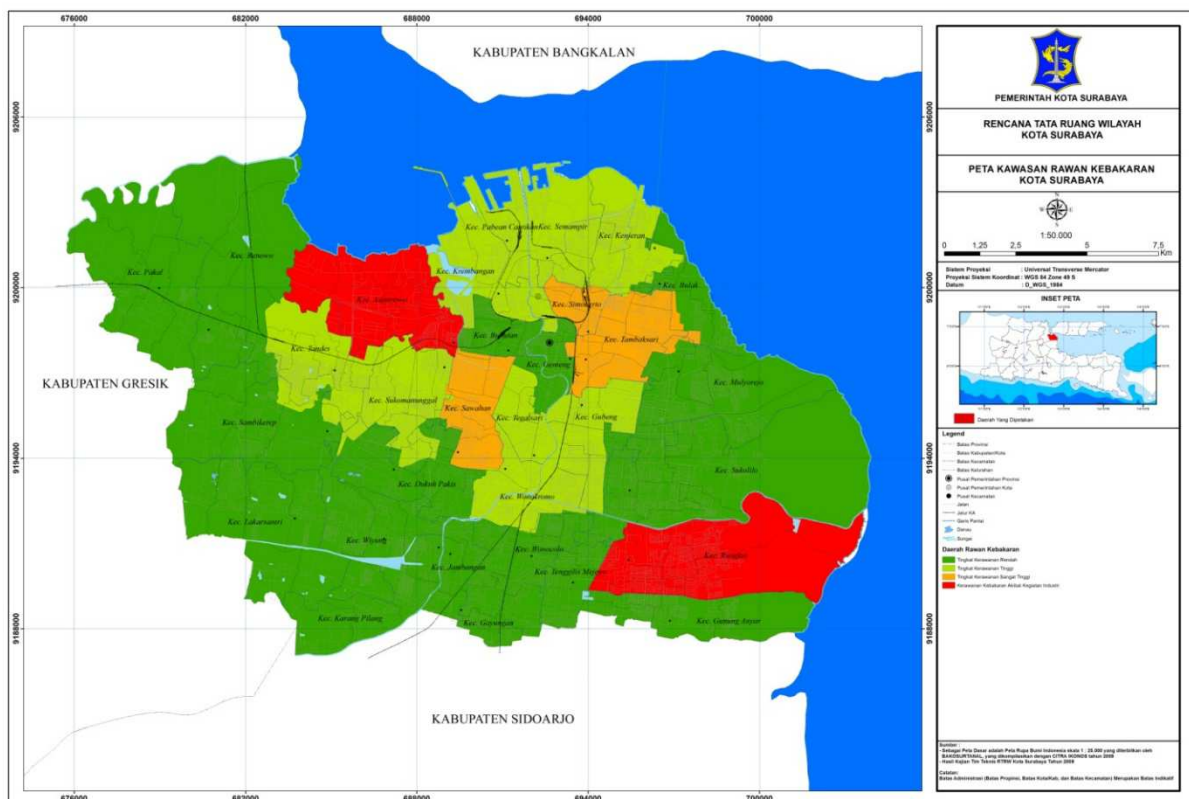


**Gambar II. 4**  
**Peta Rawan Genangan Banjir Rob Wilayah Surabaya Utara**



**Gambar II. 5**  
**Peta Kawasan Genangan Di Kota Surabaya**

Jenis bencana lainnya adalah kebakaran. Kejadian kebakaran adalah jenis bencana yang tidak dapat diprediksi akan tetapi dapat dicegah. Penentuan daerah rawan kebakaran di Kota Surabaya didasarkan atas kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, data kejadian kebakaran, kondisi bangunan dan proporsi kegiatan terbangun dengan luas lahan. Berdasarkan klasifikasi kerawanan, maka kriteria yang dimaksud antara lain Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Kawasan rawan bencana kebakaran tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



**Gambar II. 6**  
**Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Kota Surabaya**

Dalam rangka mengantisipasi kejadian bencana di kota Surabaya diperlukan antisipasi dini dan kesiapsiagaan komponen masyarakat dan pemerintah agar sejalan dengan semangat untuk memberikan perlindungan dan rasa aman yang layak dan bermartabat kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di Kota Surabaya oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) terkait yang tergabung didalam Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) dan Satuan Tugas Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satgas Satlak PB) Kota Surabaya sesuai

dengan Keputusan Walikota Nomor : 188.45/104/436.1.2/2014. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah kejadian bencana banjir dan puting beliung yang ditangani oleh Satlak dan Satgas Satlak PB di Kota Surabaya.

**Tabel II. 3**  
**Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Banjir	1	2	10	1
2	Angin Puting Beliung / Angin Kencang	11	28	12	6

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat, 2017

### 2.1.1.3. Kondisi Demografis

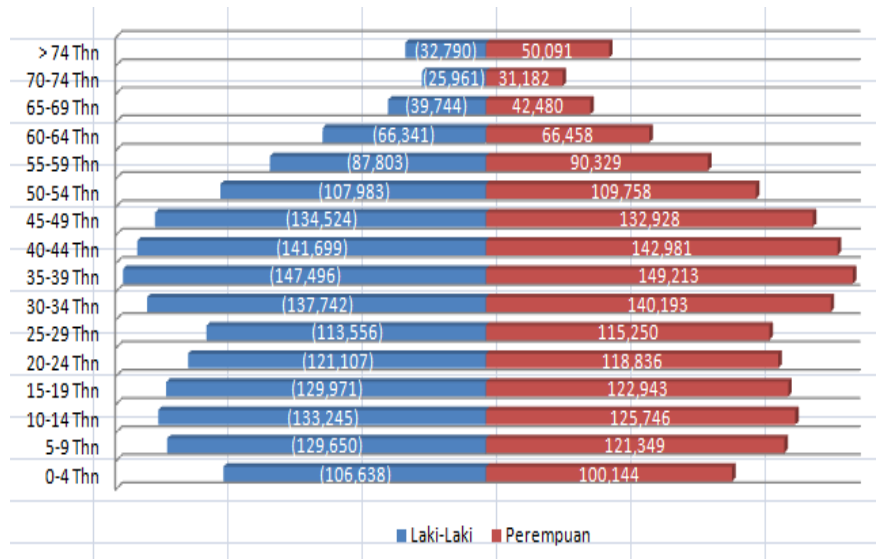
Keberadaan penduduk sangat penting di dalam proses pembangunan, oleh karena itu penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Surabaya memiliki penduduk yang ber-NIK per triwulan I Tahun 2017 sebesar 3.316.131 jiwa di 31 wilayah kecamatan. Rincian kepadatan penduduk per kecamatan ditunjukkan pada Tabel II. 4. Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Tabel II. 4 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan lebih dari 20.000 jiwa/km<sup>2</sup> yaitu Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Semampir, dan Kecamatan Kenjeran. Oleh karenanya program-program terkait dengan penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan, pemberdayaan, keluarga berencana, sanitasi dan air bersih dapat diarahkan ke wilayah-wilayah yang padat penduduk sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan, sosial maupun ekonomi warganya. Pembangunan juga diarahkan pada wilayah dengan kepadatan penduduk sedang dan rendah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

**Tabel II. 4**  
**Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah penduduk (per triwulan I 2017)	Kepadatan Penduduk (per km <sup>2</sup> )	No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah penduduk (per triwulan I 2017)	Kepadatan Penduduk (per km <sup>2</sup> )
1	Karang Pilang	9,23	81.948	8.878	17	Kenjeran	7,77	173.832	22.372
2	Wonocolo	6,77	91.145	13.463	18	Lakarsantri	18,99	61.551	3.241
3	Rungkut	21,08	121.708	5.774	19	Benowo	23,73	65.575	2.763
4	Wonokromo	8,47	190.719	22.517	20	Wiyung	12,46	75.835	6.086
5	Tegalsari	4,29	118.032	27.513	21	Dukuh Pakis	9,94	67.298	6.770
6	Sawahan	6,93	234.157	33.789	22	Gayungan	6,07	52.654	8.674
7	Genteng	4,05	68.162	16.830	23	Jambangan	4,19	55.218	13.179
8	Gubeng	7,99	155.869	19.508	24	Tenggiling Mejoyo	5,52	62.737	11.365
9	Sukolilo	23,68	121.566	5.134	25	Gunung Anyar	9,71	60.709	6.252
10	Tambaksari	8,99	253.522	28.200	26	Mulyorejo	14,21	95.034	6.688
11	Simokerto	2,59	110.974	42.847	27	Sukomanunggal	9,23	111.999	12.134
12	Pabean Cantian	6,8	93.621	13.768	28	Asemrowo	15,44	50.716	3.285
13	Bubutan	3,86	117.630	30.474	29	Bulak	6,72	46.544	6.926
14	Tandes	11,07	101.968	9.211	30	Pakal	22,07	56.887	2.578
15	Krembangan	8,34	136.512	16.368	31	Sambikerep	23,68	66.754	2.819
16	Semampir	8,76	215.255	24.572		<b>JUMLAH</b>	<b>326,81</b>	<b>3.316.131</b>	<b>10.147</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017 (diolah)

Berdasarkan jenis kelamin, total penduduk perempuan sebesar 1.659.881 jiwa dan penduduk laki-laki sebesar 1.656.250 jiwa. Dari piramida penduduk seperti Gambar II.7 menunjukkan bahwa struktur penduduk Kota Surabaya didominasi usia 35-39 tahun. Jumlah penduduk dengan usia yang potensial yaitu mulai dari usia 25 – 59 tahun sebesar 1.751.455 jiwa atau 52,82 persen dibanding usia sekolah mulai jenjang PAUD sampai dengan perguruan tinggi yaitu usia 5 – 24 tahun sebesar 1.002.847 jiwa atau 30,24 persen, sedangkan penduduk usia lanjut yaitu usia 60 tahun ke atas sebesar 355.047 atau 10,71 persen. Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia dapat dilihat pada Gambar II.7.



Gambar II. 7

**Grafik Penduduk Kota Surabaya Triwulan I Tahun 2017**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2017, diolah

Komposisi penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada triwulan I tahun 2017 yaitu usia 0-6 tahun sebanyak 306.605 jiwa, usia 7-12 tahun sebanyak 304.652 jiwa, usia 13-15 tahun sebanyak 158.893 jiwa dan usia 16-18 tahun sebanyak 151.027 jiwa. Rincian data penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada triwulan I tahun 2017 disajikan pada Tabel II. 5 berikut ini.

Tabel II. 5

**Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah Triwulan I Tahun 2017**

No	Kecamatan	0-6 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
1	Karang Pilang	7.472	7.342	4.024	3.751
2	Wonocolo	8.111	7.932	4.089	4.130
3	Rungkut	12.086	11.231	5.675	5.675
4	Wonokromo	15.339	16.656	9.201	9.120
5	Tegalsari	9.811	9.967	5.367	5.194
6	Sawahan	20.469	21.118	11.023	10.736
7	Genteng	5.648	5.663	3.080	2.989
8	Gubeng	13.031	13.556	7.098	6.906
9	Sukolilo	11.587	10.995	5.577	5.239
10	Tambak Sari	23.057	22.642	11.941	11.312
11	Simokerto	9.788	9.620	5.096	4.944
12	Pabean Cantian	7.519	8.159	4.309	4.146
13	Bubutan	10.157	10.708	5.631	5.547
14	Tandes	9.927	9.814	4.711	4.401
15	Krembangan	11.917	11.909	6.441	6.176
16	Semampir	20.610	20.807	10.947	10.325
17	Kenjeran	18.509	18.080	9.563	8.872
18	Lakar Santri	6.340	6.196	3.172	2.888
19	Benowo	6.887	6.865	3.486	3.194

No	Kecamatan	0-6 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
20	Wiyung	7.343	6.998	3.765	3.661
21	Dukuh Pakis	6.141	6.021	3.059	2.944
22	Gayungan	4.361	4.370	2.393	2.336
23	Jambangan	5.591	5.149	2.627	2.407
24	Tenggilis Mejoyo	5.850	5.624	2.795	2.711
25	Gunung Anyar	6.176	5.773	2.876	2.823
26	Mulyorejo	8.736	8.427	4.381	4.239
27	Sukomanunggal	10.660	10.235	5.263	4.997
28	Asemrowo	5.099	5.336	2.652	2.452
29	Bulak	4.805	4.773	2.484	2.353
30	Pakal	5.864	5.937	3.100	2.849
31	Sambikerep	6.920	6.426	3.232	2.869
<b>Jumlah</b>		<b>305.811</b>	<b>304.329</b>	<b>159.058</b>	<b>152.186</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

Data penduduk usia sekolah berdasarkan usia sekolah seperti tertuang pada Tabel II. 5 tersebut di atas diperlukan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk menyediakan maupun meningkatkan akses pelayanan pendidikan. Fasilitas pendidikan yang ada diharapkan mampu menampung jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut.

Komposisi penduduk Kota Surabaya menurut agama yang dipeluk menunjukkan bahwa penduduk Kota Surabaya mayoritas beragama Islam. Komposisi penduduk Kota Surabaya berdasarkan agama yang dipeluk untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II. 6.

**Tabel II. 6**  
**Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama**

AGAMA	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1. Islam	84,76%	84,90%	85,04%	85,04%
2. Katholik	4,07%	4,04%	4%	3,98%
3. Kristen	9,29%	9,21%	9,14%	9,16%
4. Hindu	0,29%	0,29%	0,28%	0,28%
5. Budha	1,57%	1,53%	1,51%	1,52%
6. Konghuchu	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%
7. Lainnya	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

Dilihat dari Tabel II. 6 tersebut di atas, menunjukkan bahwa Kota Surabaya didominasi oleh penduduk yang beragama Islam yaitu sebesar 85,04% sedangkan sebesar 14,96% adalah penduduk beragama Katolik, Kristen, Hindu, Budha,



Konghuchu dan lainnya. Keanekaragaman agama dan budaya yang ada di Kota Surabaya harus mampu dipelihara dan diwujudkan dalam toleransi kehidupan beragama dan sosial agar tidak terjadi konflik dimasyarakat. Salah satu prasyarat agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik adalah terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan pekerjaan, penduduk Kota Surabaya cenderung tersebar di seluruh jenis pekerjaan. Dari 101 jenis pekerjaan, karyawan swasta merupakan jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh penduduk yakni sebesar 28,07 persen. Posisi kedua ditempati oleh belum/tidak bekerja sebesar 24,44 persen dan di posisi ketiga adalah mengurus rumah tangga sebesar 18,59 persen. Komposisi penduduk Kota Surabaya menurut pekerjaan dapat dilihat pada Tabel II. 7.

**Tabel II. 7**

**Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Triwulan I Tahun 2017**

No.	PEKERJAAN	JUMLAH	%	No.	PEKERJAAN	JUMLAH	%
1	Belum/ Tidak Bekerja	810.565	24,44	51	Presiden	0	0,00
2	Mengurus Rumah Tangga	616.619	18,59	52	Wakil Presiden	0	0,00
3	Pelajar/ Mahasiswa	588.092	17,73	53	Anggota Mahkamah Konstitusi	1	0,00
4	Pensiunan	27.427	0,83	54	Anggota Kabinet Kementrian	6	0,00
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	53.792	1,62	55	Duta Besar	1	0,00
6	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	16.639	0,50	56	Gubernur	1	0,00
7	Kepolisian Ri (Polri)	6.434	0,19	57	Wakil Gubernur	0	0,00
8	Perdagangan	2.975	0,09	58	Bupati	0	0,00
9	Petani/ Pekebun	2.982	0,09	59	Wakil Bupati	1	0,00
10	Peternak	25	0,00	60	Walikota	1	0,00
11	Nelayan/ Perikanan	1.178	0,04	61	Wakil Walikota	1	0,00
12	Industri	506	0,02	62	Anggota DPRD Prov,	19	0,00
13	Konstruksi	273	0,01	63	Anggota DPRD Kab,	19	0,00
14	Transportasi	263	0,01	64	Dosen	5.674	0,17
15	Karyawan Swasta	930.933	28,07	65	Guru	25.958	0,78
16	Karyawan Bumh	5.251	0,16	66	Pilot	20	0,00
17	Karyawan Bumd	529	0,02	67	Pengacara	203	0,01
18	Karyawan Honorer	1.439	0,04	68	Notaris	172	0,01
19	Buruh Harian Lepas	5.953	0,18	69	Arsitek	112	0,00
20	Buruh Tani/ Perkebunan	369	0,01	70	Akuntan	62	0,00
21	Buruh Nelayan/ Perikanan	109	0,00	71	Konsultan	169	0,01
22	Buruh Peternakan	18	0,00	72	Dokter	6.665	0,20
23	Pembantu Rumah Tangga	832	0,03	73	Bidan	706	0,02
24	Tukang Cukur	37	0,00	74	Perawat	2.771	0,08

No.	PEKERJAAN	JUMLAH	%	No.	PEKERJAAN	JUMLAH	%
25	Tukang Listrik	131	0,00	75	Apoteker	333	0,01
26	Tukang Batu	1.471	0,04	76	Psikiater/ Psikolog	48	0,00
27	Tukang Kayu	299	0,01	77	Penyiar Televisi	7	0,00
28	Tukang Sol Sepatu	67	0,00	78	Penyiar Radio	14	0,00
29	Tukang Las/ Pandai Besi	179	0,01	79	Pelaut	345	0,01
30	Tukang Jahit	514	0,02	80	Peneliti	31	0,01
31	Tukang Gigi	7	0,00	81	Sopir	1984	0,06
32	Penata Rias	67	0,00	82	Pialang	9	0,00
33	Penata Busana	23	0,00	83	Paranormal	5	0,28
34	Penata Rambut	63	0,00	84	Pedagang	8.838	0,27
35	Mekanik	409	0,01	85	Perangkat Desa	8	0,00
36	Seniman	143	0,00	86	Kepala Desa	4	0,00
37	Tabib	13	0,00	87	Biarawati	172	0,01
38	Paraji	4	0,00	88	Wiraswasta	178.329	5,38
39	Perancang Busana	14	0,00	89	Pekerjaan Lainnya	5.477	0,17
40	Penterjemah	17	0,00	90	Trading & Industry	60	0,00
41	Imam Masjid	18	0,00	91	Forestry	0	0,00
42	Pendeta	481	0,02	92	Mining & Energy	2	0,00
43	Pastor	30	0,00	93	Public Work	1	0,00
44	Wartawan	218	0,01	94	Farming	0	0,00
45	Ustadz/ Mubaligh	81	0,00	95	Religion	2	0,00
46	Juru Masak	73	0,00	96	Bank & Financial	0	0,00
47	Promotor Acara	3	0,00	97	Health & Society	0	0,00
48	Anggota DPR RI	10	0,00	98	Tourism	0	0,00
49	Anggota DPD	0	0,00	99	Transportation & Communication	1	0,00
50	Anggota BPK	1	0,00	100	Culture & Education	4	0,00
				101	OTHERS	264	0,01
<b>TOTAL</b>						<b>3.316.131</b>	<b>100%</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

Berdasarkan pendidikan, komposisi penduduk Kota Surabaya ditampilkan pada Tabel II. 8. Penduduk Kota Surabaya paling banyak, yakni sebesar 29,39 persen, merupakan lulusan SMA. Posisi kedua adalah tamatan SD sebesar 17,40 persen dan posisi selanjutnya adalah lulusan SMP sebanyak 13,22 persen.

**Tabel II. 8**

**Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pendidikan Triwulan I Tahun 2017**

No.	Uraian	Jumlah Penduduk	%
1.	Tidak/Belum Sekolah	673.821	20,32%

No.	Uraian	Jumlah Penduduk	%
2.	Belum Tamat SD	235.640	7,11%
3.	Tamat SD	577.143	17,40%
4.	SMP	438.376	13,22%
5.	SMA	974.585	29,39%
6.	DI/II	26.063	0,79%
7.	DIII	40.917	1,23%
8.	DIV/S1	326.520	9,85%
9.	S2	21.779	0,66%
10.	S3	1.287	0,04%
11.	LAIN-LAIN	-	0,00%
<b>JUMLAH</b>		<b>3.316.131</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

## 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 2.1.2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Tren IPM Kota Surabaya yang menggunakan metode baru ditunjukkan pada Tabel II. 9.

**Tabel II. 9**  
**Tren IPM Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
IPM	78,87	79,47	80,38	N/A

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, April 2017

#### 2.1.2.1.2. PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB umumnya digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu negara. Berbeda dengan perhitungan PDRB sebelumnya, dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010. Perubahan tahun dasar PDRB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of*

*National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Salah satu implikasi perubahan ini adalah meningkatnya nominal PDRB dan perubahan struktur ekonomi yang mulanya 9 sektor ekonomi menjadi 17 kategori lapangan usaha.

Untuk mengetahui perkembangan PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010 Tahun 2014 – triwulan I 2017 dapat dilihat pada Tabel II. 10. Selanjutnya dalam Tabel II. 11 dapat dilihat bahwa PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan tren yang semakin meningkat. Berdasarkan strukturnya, pada tahun 2016 kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih menjadi *leading sector* dalam pembentukan PDRB Kota Surabaya, dengan kontribusi sekitar 28,38 persen. Pada urutan kedua, kategori dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB yaitu kategori industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 19,38 persen, diikuti kategori penyediaan akomodasi makan dan minum dengan kontribusi sebesar 14,52 persen.

**Tabel II. 10**  
**Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya**  
**Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)**  
**Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2014 – Triwulan I 2017 (dalam Juta Rp)**

Kategori	Uraian	2014		2015		2016*		Triwulan I 2017	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	671.574,14	0,18	746.720,05	0,18	820.350,49	0,18	N/A	N/A
B	Pertambangan dan Penggalan	24.336,14	0,01	26.941,93	0,01	29.713,21	0,01	N/A	N/A
C	Industri Pengolahan	70.966.879,22	19,42	78.093.618,11	19,23	85.527.271,00	18,91	N/A	N/A
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.978.907,22	0,54	2.065.169,29	0,51	2.094.419,86	0,46	N/A	N/A
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	572.049,35	0,16	626.533,26	0,15	678.587,67	0,15	N/A	N/A
F	Konstruksi	37.891.835,80	10,37	40.707.433,65	10,02	45.133.943,92	9,98	N/A	N/A
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	99.966.844,35	27,36	111.640.311,30	27,48	124.801.368,44	27,59	N/A	N/A
H	Transportasi dan Pergudangan	19.016.375,30	5,20	21.369.674,61	5,26	23.634.681,26	5,22	N/A	N/A
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54.062.910,64	14,80	61.613.863,04	15,17	70.922.863,27	15,68	N/A	N/A
J	Informasi dan Komunikasi	20.137.828,27	5,51	22.165.986,69	5,46	24.457.105,38	5,41	N/A	N/A
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	19.275.906,51	5,28	21.640.835,24	5,33	24.105.835,15	5,33	N/A	N/A

Kategori	Uraian	2014		2015		2016*		Triwulan I 2017	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
L	Real Estate	9.372.176,45	2,57	10.706.034,35	2,64	11.889.141,32	2,63	N/A	N/A
M,N	Jasa Perusahaan	8.889.028,16	2,43	9.852.481,83	2,43	10.926.169,75	2,42	N/A	N/A
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.071.610,56	1,39	5.602.248,99	1,38	6.221.289,53	1,38	N/A	N/A
P	Jasa Pendidikan	9.259.950,73	2,53	10.156.316,47	2,50	11.036.182,83	2,44	N/A	N/A
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.814.318,82	0,77	3.089.796,00	0,76	3.389.778,02	0,75	N/A	N/A
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.382.299,44	1,47	6.092.795,53	1,50	6.676.541,93	1,48	N/A	N/A
Produk Domestik Regional Bruto		365.354.831,12	100,00	406.196.760,34	100,00	452.345.242,07	100,00	N/A	N/A

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan BappekoSurabaya, diolah 2017

**Tabel II. 11**  
**Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya**  
**Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)**  
**Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2014 – Triwulan I 2017 (dalam Juta Rp)**

Kategori	Uraian	2014		2015		2016*		Triwulan I 2017	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	522.314,99	0,17	547.043,18	0,17	570.894,08	0,17	N/A	N/A
B	Pertambangan dan Penggalian	18.674,88	0,01	19.418,14	0,01	20.183,42	0,01	N/A	N/A
C	Industri Pengolahan	59.951.752,45	19,59	63.458.578,25	19,57	66.657.284,99	19,38	N/A	N/A
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.569.076,33	0,51	1.518.492,24	0,47	1.508.608,17	0,44	N/A	N/A
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	474.293,69	0,16	498.808,24	0,15	528.322,40	0,15	N/A	N/A
F	Konstruksi	31.368.882,67	10,25	32.314.502,24	9,97	33.887.787,14	9,85	N/A	N/A
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	86.711.515,05	28,34	92.054.398,55	28,39	97.586.534,54	28,38	N/A	N/A
H	Transportasi dan Pergudangan	14.843.763,22	4,85	15.797.144,72	4,87	16.554.190,88	4,81	N/A	N/A
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	42.503.082,56	13,89	45.918.309,15	14,16	49.931.297,69	14,52	N/A	N/A

Kategori	Uraian	2014		2015		2016*		Triwulan I 2017	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
J	Informasi dan Komunikasi	19.701.365,86	6,44	20.958.313,00	6,46	22.421.127,22	6,52	N/A	N/A
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	14.851.436,96	4,85	15.964.079,11	4,92	17.184.785,53	5,00	N/A	N/A
L	Real Estate	8.264.384,54	2,70	8.683.388,83	2,68	9.145.630,78	2,66	N/A	N/A
M,N	Jasa Perusahaan	7.011.356,21	2,29	7.388.567,18	2,28	7.761.412,08	2,26	N/A	N/A
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.994.512,44	1,31	4.172.196,31	1,29	4.384.611,62	1,27	N/A	N/A
P	Jasa Pendidikan	7.144.694,86	2,34	7.595.525,11	2,34	8.052.649,03	2,34	N/A	N/A
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.405.595,14	0,79	2.502.680,04	0,77	2.649.121,77	0,77	N/A	N/A
R,S,T,U	Jasa lainnya	4.620.617,78	1,51	4.836.400,63	1,49	5.077.815,13	1,48	N/A	N/A
Produk Domestik Regional Bruto		305.957.319,63	100,00	324.227.844,92	100,00	343.922.256,47	100,00	N/A	N/A

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan BappekoSurabaya, diolah, 2017



Struktur ekonomi Kota Surabaya masih memiliki pola yang sama seperti tahun sebelum-sebelumnya, dimana kategori yang mendominasi dalam berkontribusi terhadap perekonomian Kota Surabaya yaitu kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor, industri pengolahan serta akomodasi, serta makanan minuman. Tingginya kontribusi ketiga kategori tersebut selaras dengan maraknya aktivitas perdagangan barang dan jasa yang terus tumbuh pesat di Kota Surabaya. Disamping itu, daya dukung seperti padatnya jumlah penduduk Kota Surabaya disertai tingginya tingkat konsumsi membuat Kota Surabaya memiliki nilai tambah lebih besar bagi pelaku pasar.

Selama tahun 2014-2016 kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor memberikan kontribusi terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya sebesar 27 persen setiap tahunnya. Sebagai penggerak utama perekonomian Kota Surabaya, pesatnya aktivitas perdagangan tersebut tentunya menjadi pengungkit (*multiplier effect*) bagi aktivitas lapangan usaha lainnya seperti aktivitas industri, penyediaan akomodasi dan makanan minuman serta aktivitas jasa lainnya. Hal itu terjadi karena semakin meningkatnya aktivitas perdagangan maka semakin meningkat pula permintaan barang dan jasa pada aktivitas industri. Berdasarkan keterkaitan tersebut membuat kategori industri pengolahan menjadi kategori lapangan usaha yang dominan kedua dengan kontribusi persen 19 setiap tahunnya terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya.

Kategori tertinggi selanjutnya yaitu akomodasi dan makanan minuman dengan kontribusi rata-rata sebesar 14 persen terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya. Potensi aktivitas akomodasi dan makanan minuman di Kota Surabaya sangatlah besar. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh pembangunan hotel, wisma/penginapan, serta tempat makan mulai dari warung kecil hingga restoran yang terus bermunculan mengikuti pesatnya perkembangan ekonomi Kota Surabaya. Ditambah lagi, semakin modernnya perilaku hidup masyarakat Kota Surabaya turut mendukung tumbuhnya aktivitas kategori akomodasi dan makanan minuman dari tahun ke tahun.

#### **2.1.2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya**

Kinerja perekonomian Kota Surabaya dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha. Selama tahun 2014 - triwulan I 2017

pertumbuhan kategori pembentuk PDRB Kota Surabaya tumbuh cukup bervariasi. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II. 12.

**Tabel II. 12**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha**  
**Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Kategori	Uraian	2014	2015	2016*	Triwulan I 2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,56	4,73	4,38	N/A
B	Pertambangan dan Penggalian	3,20	3,98	3,95	N/A
C	Industri Pengolahan	10,15	5,85	5,04	N/A
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-2,58	-3,22	-0,65	N/A
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,76	5,17	5,88	N/A
F	Konstruksi	6,85	3,01	4,92	N/A
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,88	6,16	6,01	N/A
H	Transportasi dan Pergudangan	8,46	6,42	4,78	N/A
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,06	8,04	8,71	N/A
J	Informasi dan Komunikasi	6,53	6,38	6,98	N/A
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,79	7,49	7,65	N/A
L	Real Estate	6,68	5,07	5,32	N/A
M,N	Jasa Perusahaan	6,45	5,38	5,04	N/A
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,33	4,45	4,94	N/A
P	Jasa Pendidikan	5,71	6,31	5,89	N/A
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,39	4,04	5,86	N/A
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,55	4,67	4,97	N/A
PDRB		6,96	5,97	6,07	N/A
PDRB TANPA MIGAS		6,96	5,97	6,07	N/A

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2017

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Jika dirinci, kategori lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan rata-rata tinggi setiap tahunnya adalah kategori jasa keuangan dan asuransi, kategori informasi dan komunikasi, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum serta kategori perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor.

Adapun kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang rendah yaitu kategori pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, administrasi

pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial; serta jasa lainnya. Berdasarkan rinciannya, hampir seluruh kategori lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Surabaya mengalami pertumbuhan yang positif terkecuali kategori pengadaan listrik dan gas. Kategori tersebut mengalami pertumbuhan yang negatif selama ini dikarenakan kebijakan pemerintah yang mencabut subsidi sehingga mempengaruhi produktivitas pada aktivitas lapangan usaha pengadaan listrik dan gas.

Selama 5 (lima) tahun terakhir perekonomian Surabaya mampu tumbuh stabil di kisaran 6 hingga 7 persen. Angka pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan nasional. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya sebelumnya mengalami perlambatan, namun kondisi ekonomi Kota Surabaya mulai menunjukkan perbaikan dimana pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2016 sebesar 6,07 lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi di tahun 2015, dan rata-rata lebih tinggi dibanding Jawa Timur dan Nasional. Selengkapnya pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional terangkum dalam tabel berikut.

**Tabel II. 13**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional**  
**Tahun 2014-Triwulan I 2017 (%)**

<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016*</b>	<b>Triwulan I 2017</b>
Surabaya	6,96	5,97	6,07	N/A
Jawa Timur	5,86	5,44	5,55	N/A
Nasional	5,02	4,79	5,02	N/A

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2017

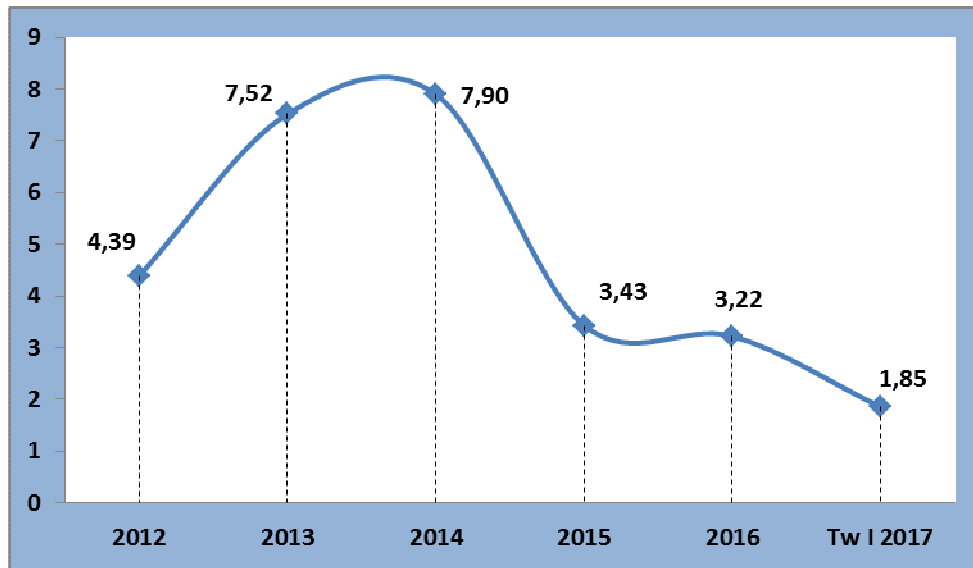
#### **2.1.2.1.4. Tingkat Inflasi**

Tingkat Inflasi menggambarkan peningkatan harga secara terus menerus. Inflasi yang digolongkan dalam kelompok inflasi ringan jika capaian inflasi kurang dari 10 persen. Selama ini Pemerintah Nasional menetapkan sasaran inflasi sebesar 4% ± 1%. Inflasi yang ringan dibutuhkan dalam perekonomian untuk mendorong produsen agar memproduksi lebih banyak barang dan jasa sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, inflasi yang tinggi akan memberikan dampak negatif karena akan mendorong penurunan konsumsi masyarakat yang berdampak terhadap penurunan produktivitas ekonomi.

Secara histori, perkembangan inflasi kota surabaya dalam kurun waktu 2012-2016 cukup berfluktuatif, namun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2012 inflasi Kota Surabaya sebesar 4,39 persen yang selanjutnya mengalami peningkatan signifikan di tahun 2013 menjadi sebesar 7,52 persen dan meningkat kembali di tahun 2014 mencapai 7,90 persen. Pada tahun 2015 inflasi Kota Surabaya mengalami penurunan signifikan menjadi sebesar 3,43 persen dan stabil hingga tahun 2016 sebesar 3,22 persen.

Inflasi Kota Surabaya yang tinggi di tahun 2013-2014 utamanya dipicu oleh kenaikan harga pada kelompok *administered price* khususnya kenaikan harga komoditi bahan bakar minyak (BBM). Sementara pada tahun 2015 dan 2016 inflasi Kota Surabaya lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok bahan makanan, sebaliknya kelompok *administered price* menjadi penahan laju inflasi sehingga inflasi Kota Surabaya pada tahun 2015 dan 2016 cukup terkendali meskipun terdapat beberapa komoditi pada kelompok *administered price* yang mengalami kenaikan harga seperti tarif listrik non subsidi dan bea cukai rokok.

Berdasarkan perkembangan harga terkini, inflasi Kota Surabaya secara kumulatif hingga triwulan I 2017 sebesar 1,85 persen. Berdasarkan kelompok komponen pembentuknya, ketiga kelompok yaitu kelompok inti, kelompok *volatile food* dan kelompok *administered price* memberikan andil terhadap inflasi Kota Surabaya pada triwulan I 2017. Pada kelompok inti dipicu oleh meningkatnya tarif pulsa ponsel dan harga emas perhiasan sementara pada kelompok *administered price* dipicu oleh meningkatnya bahan bakar minyak (BBM), tarif ponsel, kenaikan tarif listrik dan kenaikan biaya perpanjangan stnk. Pada kelompok *volatile food* pada bulan pertama tahun 2017 menjadi pemicu inflasi yang disebabkan karena meningkatnya harga cabai rawit akibat pasokan yang terbatas dipasaran. Namun, pada bulan Maret 2017 kelompok bergejolak menjadi penahan laju inflasi karena pasokan komoditi pertanian melimpah seiring masa panen tiba. Selengkapanya terkait perkembangan inflasi di Kota Surabaya pada tahun 2012- Triwulan I 2017 terangkum dalam grafik berikut.



**Gambar II. 9**  
**Inflasi Kota Surabaya (persen) Tahun 2012-2016**

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2017

Pergerakan inflasi yang fluktuatif perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga stabilitas harga khususnya bahan pokok, mengingat surabaya bukan produsen melainkan pasar. Berdasarkan pergerakan harga (harian) beberapa bahan pokok dapat dihitung tingkat fluktuasi sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel II. 14**  
**Tingkat Fluktuasi Harga Beberapa Bahan Pokok Tahun 2016 – Triwulan I 2017**

Nama Bahan Pokok	Satuan	Tahun			
		2016		Triwulan I 2017	
		Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilisasi Harga (Target Fluktuasi 5%)	Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilisasi Harga (Target Fluktuasi 5%)
<b>BERAS</b>					
- Beras IR.64 Kualitas I	Kg	13,3%	-65,3%	3,1%	137,3%
- Beras IR.64 Kualitas II	Kg	1,2%	175,9%	5,0%	101,0%
- Beras IR.64 Kualitas III	Kg	3,8%	124,8%	3,3%	134,3%
<b>GULA</b>					
- Gula Pasir Lokal Curah	Kg	10,0%	0,4%	5,0%	100,7%
<b>MINYAK GORENG</b>					
- Minyak Goreng Curah (Bening)	Kg	7,0%	59,7%	5,1%	97,5%
<b>DAGING</b>					
- Daging Sapi "Grade Atas"	Kg	1,7%	165,4%	10,5%	-10,5%

Nama Bahan Pokok	Satuan	Tahun			
		2016		Triwulan I 2017	
		Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilisasi Harga (Target Fluktuasi 5%)	Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilisasi Harga (Target Fluktuasi 5%)
- Daging Sapi "Grade Sedang"	Kg	2,4%	152,9%	7,9%	41,9%
- Daging Sapi "Grade Bawah"	Kg	1,3%	174,1%	4,1%	118,9%
- Daging Ayam Broiler	Kg	7,0%	60,4%	7,6%	47,6%
<b>I K A N</b>					
- Ikan Tongkol Segar (Uk. Sedang)	Kg	6,4%	72,7%	5,6%	88,3%
- Ikan Mujair Segar (Uk. Sedang)	Kg	7,7%	45,2%	6,4%	71,9%
- Udang Segar (Uk. Sedang)	Kg	7,6%	48,8%	5,9%	81,3%
- Ikan Lele Segar (Uk. Sedang)	Kg	1,8%	163,9%	5,2%	96,5%
- Ikan Bandeng Segar (Uk. Sedang)	Kg	4,1%	117,7%	6,2%	76,6%
- Ikan Teri Asin (Bukan Teri Medan)	Kg	6,1%	77,5%	5,2%	95,4%
<b>TELUR</b>					
- Telur Ayam Broiler	Kg	9,9%	2,4%	6,9%	63,0%
- Telur Ayam Kampung	Butir	4,1%	117,6%	6,2%	76,1%

Sumber: Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah, 2017, diolah Bappeko, 2017

\*) Angka sementara

#### 2.1.2.1.5. PDRB Per Kapita

Kinerja ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran. Secara umum, kinerja tersebut diukur melalui sebuah besaran yaitu PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan konsep yang paling sering dipakai sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. PDRB per kapita ADHB untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Besaran PDRB per kapita diperoleh dari *output* yang dihasilkan pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu wilayah dari tahun ke tahun. Dengan melakukan perbandingan seperti itu, kita dapat mengamati apakah

kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah secara rata-rata telah meningkat. Berikut rangkuman data yang menggambarkan tingkat pendapatan perkapita penduduk di Kota Surabaya tahun 2014 – triwulan I 2017.

**Tabel II. 15**  
**PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya**  
**Tahun 2014-Triwulan I 2017**

Tahun	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
<b>ATAS DASAR HARGA BERLAKU</b>				
PDRB (Milyar Rp)	365.354,83	406.196,76	452.345,23	N/A
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	128,03	141,52	156,86	N/A
<b>ATAS DASAR HARGA KONSTAN</b>				
PDRB (Milyar Rp)	305.957,32	324.227,84	343.922,26	N/A
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	107,22	112,96	119,26	N/A
<b>Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun</b>	<b>2.853.661</b>	<b>2.870.200</b>	<b>2.883.800</b>	N/A

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan BappekoSurabaya, diolah, 2017

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, PDRB per kapita Kota Surabaya ADHK menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya. Peningkatan PDRB perkapita harus diiringi dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan penduduk sehingga tujuan pembangunan untuk masyarakat sejahtera dapat terwujud.

#### 2.1.2.1.6. Indeks Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata. Berdasarkan nilai *gini ratio*, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien *gini ratio* 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Nilai Indeks Gini Kota Surabaya selama kurun waktu 4 tahun berada pada kisaran 0,3 – 0,4, yang tergolong dalam kategori sedang, namun pada tahun 2015 tingkat pemerataan pendapatan masuk dalam kategori tinggi. Oleh karena itu, tingkat pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat

sejahtera. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya- upaya untuk pemerataan ekonomi melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat.

**Tabel II. 16**  
**Gini Ratio Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Tahun	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
<b>Gini Ratio</b>	0,39	0,42	N/A	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2017

#### 2.1.2.1.7. Indeks Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan SDA dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi terhadap kebijakan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Ukuran ketimpangan wilayah ini menggunakan metode Williamson *Index* yang menganalisa PDRB per kapita sebagai data dasar. Karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat, dengan ukuran bila angka indeks mendekati 1 berarti semakin timpang dan bila angka indeks mendekati nol berarti semakin merata.

**Tabel II. 17**  
**Indeks Ketimpangan Wilayah Kota Surabaya**

Tahun	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Indeks Ketimpangan Wilayah (PDRB Tahun Dasar 2000)	N/A	N/A	N/A	N/A
Indeks Ketimpangan Wilayah (PDRB Tahun dasar 2010)	0,66	0,67	N/A	N/A

Sumber : Hasil Analisa Bappeko, 2017, BPS Kota Surabaya 2016

Terjadinya perubahan tahun dasar dalam PDRB yaitu yang awalnya menggunakan tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010 maka terjadi perubahan



besaran indeks Williamson dapat disajikan pada Tabel II. 17. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum ketimpangan pembangunan antar kecamatan di Kota Surabaya relatif tinggi dengan nilai indeks sekitar 0,6 namun mempunyai kecenderungan yang terus meningkat.

**2.1.2.1.8. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia**

Pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan melihat distribusi pendapatan juga menjadi perhatian Bank Dunia yang kemudian membuat suatu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan tersebut. Dalam mengukur tingkat pemerataan pendapatan tersebut, Bank Dunia memfokuskan pada persentase pendapatan yang diterima oleh 40 % penduduk dengan pendapatan terendah.

Menurut Bank Dunia, ketimpangan distribusi pendapatan dikatakan tinggi jika persentase pendapatan yang diterima oleh 40 % penduduk berpendapatan terendah kurang dari 12 %, sedang jika persentasenya berada antara 12 % hingga 17%, dan ketimpangan rendah jika persentase mencapai lebih dari 17%.

**Tabel II. 18**  
**Persentase Pendapatan yang Diterima Penduduk Menurut Kelompok**  
**Pendapatan Kota Surabaya**

Tahun	40 % terbawah	40 % menengah	20 % tertinggi
2012	21,38	32,01	46,61
2013	23,55	36,62	39,83
2014	19,74	31,64	48,62
2015	17,81	32,34	49,85

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2013 diolah

Seperti disajikan pada Tabel II. 18, pada tahun 2015 ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Surabaya tergolong rendah, yaitu persentase pendapatan/pengeluaran yang dikuasai oleh 40 % penduduk termiskin mencapai lebih dari 17 % dari total pendapatan/pengeluaran penduduk. Persentase tersebut mencapai 17,81 %.

**2.1.2.1.9. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan**

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum

makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan Kota Surabaya tahun 2015 sebesar Rp. 418.930 (empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah). Angka Kemiskinan Kota Surabaya ditunjukkan pada Tabel II. 19.

**Tabel II. 19**  
**Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin**  
**Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

<b>Kemiskinan</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Triwulan I 2017</b>
Angka Kemiskinan (persen)	5,79	5,82	N/A	N/A
Garis Kemiskinan (Rp)	393.151	418.93	N/A	N/A
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	164,36	165,72	N/A	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2017

Memperhatikan data pada Tabel II. 19 tersebut di atas, bahwa jumlah penduduk miskin yang ada sebanyak 165.720 jiwa pada tahun 2015. Program dan kegiatan berbagai sektor yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya bertujuan untuk meringankan beban penduduk miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan maupun program dan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan skill melalui pelatihan, pemberdayaan UKM serta inkubasi dan klinik usaha mandiri. Intervensi tersebut diharapkan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin.

## **2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial**

### **2.1.2.2.1. Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperand alam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan rata-rata lama sekolah.

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf penduduk Kota Surabaya sebesar 100 persen pada tahun 2014-2015. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Kota Surabaya dengan usia 15

tahun ke atas tercatat sebanyak 2.537.150 jiwa, pada tahun 2016 sebanyak 2.537.150 jiwa dan seluruhnya dapat membaca dan menulis. Rekapitulasi data perkembangan AMH Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel II. 20**  
**Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 tahun yang Bisa Membaca dan Menulis	2.199.721	2.121.329	2.537.150	N/A
2	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun Keatas	2.199.721	2.121.329	2.537.150	N/A
3	Angka Melek Huruf (%)	100,00%	100,00%	100,00%	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan, 2017

Dari data pada Tabel II. 20 tersebut diatas, berdasarkan data yang tercatat di Dinas Pendidikan Kota Surabaya menunjukkan bahwa penduduk Kota Surabaya usia 15 tahun keatas seluruhnya telah mampu membaca dan menulis.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator yang melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar usia siswa di jenjang tersebut.

APM tahun 2014 jenjang SD/MI sebesar 97,02, jenjang SMP/MTs sebesar 95,87 persen; jenjang SMA/MA/SMK sebesar 93,47 persen. APM tahun 2015 jenjang SD/MI sebesar 95,02, jenjang SMP/MTs sebesar 95,03 persen, jenjang SMA/MA/SMK sebesar 92,55 persen. Sedangkan untuk APM Kota Surabaya sampai tahun 2016 jenjang SD/MI sebesar 83,75 persen jenjang SMP/MTs sebesar 81,07 persen; jenjang SMA/MA/SMK sebesar 85,59 persen. Pada triwulan I tahun 2017 APM jenjang SD/MI sebesar 99,59 perse dan jenjang SMP/MTs sebesar 86,23 persen. Khusus APM jenjang SMA/MA/SMK, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 telah menjadi kewenangan Provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

APM SD/MI dan SMP/MTs tercatat mengalami kenaikan. Hal ini selain dikarenakan sekolah telah melakukan *up date* data profil sekolah berdasarkan data siswa tahun ajaran baru 2016/2017 (*by name* siswa) sedangkan data penduduk per usia sekolah telah mengikuti data *up date* dari Dinas kependudukan dan Pencatatan

Sipil per triwulan I juga telah mencerminkan peningkatan konsistensi masyarakat untuk menyekolahkan putra putrinya sesuai jenjang usia ideal dengan jenjang pendidikannya. Rekap data perkembangan APM Kota Surabaya tahun 2014 – triwulan I 2017 disajikan pada Tabel II. 21 sebagai berikut:

**Tabel II. 21**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	SD/MI				
1.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 7-12 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	252.434	256.703	255.142	276.266
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	260.193	270.157	304.652	277.404
	APM SD/MI (persen)	97,02	95,02	83,75	99,59
2	SMP/MTs				
2.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 13-15 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	124.018	131.306	128.810	122.940
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	129.367	138.173	158.893	142.565
	APM SMP/MTs (persen)	95,9	95	81,07	86,23

Sumber: Dinas Pendidikan, 2017

Adapun rasio perempuan terhadap laki-laki untuk APM Kota Surabaya dapat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel II. 22**  
**Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Terhadap Laki-Laki**  
**Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1.	Rasio APM perempuan/laki-laki SD/MI (persen)	97,85	104	N/A	N/A
2.	Rasio APM perempuan/laki-laki SMP/MTs (persen)	106,47	105,06	N/A	N/A

Sumber: Laporan MDGs Kota Surabaya, 2017

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara

umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

APK jenjang SD/MI pada tahun 2014 sebesar 108,3 persen, dan pada tahun 2015 sebesar 105,24 persen. Sedangkan APK jenjang SMP/MTs, tahun 2014 sebesar 100,37 persen, dan pada tahun 2015 sebesar 105,03 persen. APK jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2014 sebesar 121,85 persen, dan pada tahun 2015 sebesar 105,08 persen. Pada tahun 2016, APK jenjang SD/MI sebesar 92,34 persen, APK jenjang SMP/MTs sebesar 84,14 persen dan APK jenjang SMA/MA/SMK sebesar 90,57 persen. Sedangkan sampai dengan Triwulan I 2017 jumlah APK jenjang SD/MI sebesar 104,07 persen dan APK jenjang SMP/MTs sebesar 91,46 persen. Rekap data perkembangan APK Kota Surabaya tahun 2014 – triwulan I 2017 disajikan pada Tabel II. 23 sebagai berikut.

**Tabel II. 23**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1.	SD/MI				
1.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	281.789	284.313	281.310	288.704
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	260.193	270.157	304.652	277.404
	APK SD/MI (persen)	108,3	105,24	92,34	104,07
2.	SMP/MTs				
2.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	129.845	145.123	135.283	130.390
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	129.367	138.173	158.893	142.565
	APK SMP/MTs (persen)	100,37	105,03	84,14	91,46

Sumber: Dinas Pendidikan, Triwulan I 2017

Rata-rata lama sekolah menurut BPS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Data perkembangan rata-rata lama sekolah Kota Surabaya tahun 2014 – triwulan I 2017 disajikan pada Tabel II. 24. Data tahun 2016 tersebut masih merupakan angka proyeksi (angka sangat sementara).

**Tabel II. 24**  
**Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Indikator	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Rata-Rata Lama Sekolah	10,07	10,24	10,41	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2017

Angka harapan lama sekolah menurut BPS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Data perkembangan angka harapan lama sekolah Kota Surabaya tahun 2014 – triwulan I 2017 rilis terbaru dari BPS adalah tahun 2016 (proyeksi dan angka sangat sementara), sehingga untuk triwulan I 2017 masih menggunakan data rilis tahun 2016 tersebut seperti disajikan pada tabel berikut.

**Tabel II. 25**  
**Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Indikator	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Angka Harapan Lama Sekolah	13,44	13,52	13,60	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2017

Dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Surabaya berharap mengenyam pendidikan melebihi jenjang menengah atau SMA.

#### 2.1.2.2.2. Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah salah satunya dapat diukur dengan angka harapan hidup (AHH) dan penurunan balita gizi buruk. Perkembangan AHH Kota Surabaya disajikan pada Tabel II. 26.

**Tabel II. 26**  
**Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Indikator	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Angka Harapan Hidup (persen)	73,85	73,85	N/A	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2017

AHH penduduk Kota Surabaya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 tetap pada angka 73.85 persen, sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan triwulan I tahun 2017 masih dalam proses perhitungan oleh BPS Kota Surabaya.

Status gizi masyarakat pada balita di Kota Surabaya secara umum terus menunjukkan kemajuan signifikan yang ditandai dengan menurunnya angka prevalensi gizi buruk pada balita. Persentase balita gizi buruk pada tahun 2014 sebesar 0,21% dan pada tahun 2015 sebesar 0,16%. Pada tahun 2016 persentase balita gizi buruk sebesar 0,16% sebagaimana tampak pada tabel berikut. Berikut ini merupakan rekapitulasi data prevalensi balita gizi buruk tahun 2014 – triwulan I 2017.

**Tabel II. 27**  
**Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Indikator	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Prevalensi Balita Gizi Buruk (persen)	0,21	0,16	0,16	N/A

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2017

**Tabel II. 28**  
**Perkembangan Balita Gizi Buruk Kota Surabaya (menurut Kecamatan)**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Kecamatan	2014			2015			2016			Triwulan I 2017		
		Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk
1	Kec. Asemrowo	2	3.495	0,06%	0	3.522	0,00%	5	3.629	0,14%	<b>Belum dilakukan survey PSG (Pemantauan Status Gizi)</b>		
2	Kec. Benowo	1	4.129	0,02%	2	4.004	0,05%	2	4.198	0,05%			
3	Kec. Bubutan	3	6.139	0,05%	5	6.108	0,08%	3	6.153	0,05%			
4	Kec. Bulak	5	2.522	0,20%	7	2.722	0,26%	5	2.887	0,17%			
5	Kec. Dukuh Pakis	7	2.583	0,27%	2	2.646	0,08%	3	2.849	0,11%			
6	Kec. Gayungan	5	2.474	0,20%	3	2.478	0,12%	11	2.291	0,48%			
7	Kec. Genteng	7	3.037	0,23%	6	3.002	0,20%	3	2.974	0,10%			
8	Kec. Gubeng	6	7.556	0,08%	5	7.319	0,07%	7	7.327	0,10%			
9	Kec. Gunung Anyar	2	2.733	0,07%	0	3.596	0,00%	0	2.672	0,00%			
10	Kec. Jambangan	2	3.527	0,06%	4	3.546	0,11%	6	3.562	0,17%			
11	Kec. Karangpilang	17	3.238	0,53%	15	3.277	0,46%	4	3.759	0,11%			
12	Kec. Kenjeran	12	10.222	0,12%	11	11.075	0,10%	4	10.888	0,04%			
13	Kec. Krembangan	4	7.446	0,05%	2	7.406	0,03%	5	7.533	0,07%			
14	Kec. Lakarsantri	2	3.195	0,06%	2	3.118	0,06%	2	3.760	0,05%			
15	Kec. Mulyorejo	31	4.934	0,63%	12	5.483	0,22%	5	5.624	0,09%			
16	Kec. Pabean Cantian	10	4.400	0,23%	9	4.441	0,20%	9	4.462	0,20%			
17	Kec. Pakal	40	4.664	0,86%	36	4.527	0,80%	48	4.496	1,07%			
18	Kec. Rungkut	9	6.033	0,15%	7	6.083	0,12%	9	6.210	0,14%			
19	Kec. Sambikerep	6	3.620	0,17%	8	4.741	0,17%	6	4.282	0,14%			



No.	Kecamatan	2014			2015			2016			Triwulan I 2017		
		Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk
20	Kec. Sawahan	16	12.793	0,13%	13	12.843	0,10%	12	12.865	0,09%	<b>Belum dilakukan survey PSG (Pemantauan Status Gizi)</b>		
21	Kec. Semampir	27	11.332	0,24%	9	11.406	0,08%	16	11.456	0,14%			
22	Kec. Simokerto	17	5.759	0,30%	13	5.777	0,23%	14	5.868	0,24%			
23	Kec. Sukolilo	16	5.667	0,28%	10	5.766	0,17%	11	5.751	0,19%			
24	Kec. Sukomanunggal	54	7.446	0,73%	48	7.346	0,65%	47	6.791	0,69%			
25	Kec. Tambaksari	6	10.687	0,06%	7	10.683	0,07%	7	10.520	0,07%			
26	Kec. Tandes	4	7.199	0,06%	11	6.675	0,16%	3	6.282	0,05%			
27	Kec. Tegalsari	18	6.030	0,30%	10	6.030	0,17%	7	5.991	0,12%			
28	Kec. Tenggilis Mejoyo	6	3.448	0,17%	1	3.072	0,03%	1	3.121	0,03%			
29	Kec. Wiyung	10	3.557	0,28%	5	3.789	0,13%	8	4.125	0,19%			
30	Kec. Wonocolo	3	4.957	0,06%	4	4.986	0,08%	2	5.111	0,04%			
31	Kec. Wonokromo	18	9.265	0,19%	15	9.263	0,16%	15	9.005	0,17%			
<b>Total</b>		<b>366</b>	<b>174.085</b>	<b>0,21%</b>	<b>282</b>	<b>176.728</b>	<b>0,16%</b>	<b>280</b>	<b>176.439</b>	<b>0,16%</b>			

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2017

Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), balita gizi buruk dan kurang dapat dilihat pada Tabel II. 29, Tabel II. 30, dan Tabel II. 31 sebagai berikut:

**Tabel II. 29**  
**Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Ibu melahirkan yang meninggal	39	38	37	7
2	Kelahiran Hidup	43.242	43.505	43.164	N/A
3	AKI per 100.000 KH	90,19	87,35	85,72	N/A

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

**Tabel II. 30**  
**Angka Kematian Bayi(AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah bayi lahir meninggal	243	282	276	26
2	Kelahiran Hidup	43.242	43.505	43.164	N/A
3	AKB per 1.000 KH	5,62	6,48	6,39	N/A

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

**Tabel II. 31**  
**Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah balita dengan status gizi buruk	366	282	280	N/A
2	Jumlah balita yang ditimbang	174.085	176.728	176.439	N/A
3	Persentase (persen)	0,21	0,16	0,15	N/A

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

**Tabel II. 32**  
**Prevalensi Balita Kurang Gizi (Gizi Buruk + Gizi Kurang) Kota Surabaya**  
**Tahun 2016 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah balita dengan status gizi buruk dan kurang	29.888	N/A
2	Jumlah balita yang ditimbang	176.439	N/A
3	Persentase (persen)	16,94	N/A

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

Dari data pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa Prevalensi Balita Gizi Buruk, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Balita gizi Buruk di Kota Surabaya telah mengalami penurunan setiap tahunnya, sedangkan prevalensi balita kurang gizi dibawah target bahkan capaiannya telah di bawah standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Meskipun capaiannya telah mencapai target yang telah ditetapkan, namun dari jumlah kasus kejadian masih cukup besar dan diupayakan menurun setiap tahunnya.

### 2.1.2.2.3. Ketenagakerjaan

Dengan semakin bertambahnya penduduk maka tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun hal ini belum diiringi dengan perkembangan lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka dalam kurun waktu tahun 2014 – tahun 2015 mempunyai trend meningkat dengan angka tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2015 yaitu sebesar 7,01%, adapun data tahun 2016 belum tersedia dikarenakan anggaran Sakernas Besar (Bulan Agustus) berdasarkan kebijakan pemerintah pusat digeser untuk kegiatan lain. Beberapa faktor yang menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran di Kota Surabaya antara lain faktor kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi namun tidak dibekali dengan ketrampilan dan mental kerja, tingkat pendidikan rendah, tingkat urbanisasi yang tinggi serta faktor jumlah lapangan kerja yang terbatas, faktor tenaga kerja kontrak (*outsourcing*), dan faktor pemutusan hubungan kerja. Berikut adalah rekap data tentang tingkat pengangguran terbuka Tahun 2014 - triwulan I 2017 disajikan pada Tabel II. 33.

**Tabel II. 33**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja	85.345	102.914	N/A	N/A
2	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	1.465.502	1.468.094	N/A	N/A
3	Persen Pengangguran Terbuka	5,82%	7,01%	N/A	N/A

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2017

Jumlah angkatan kerja di Kota Surabaya mengalami peningkatan dari tahun 2014 jumlah angkatan kerja di Kota Surabaya sebesar 1.465.502 menjadi 1.468.094 pada tahun 2015, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

**Tabel II. 34**  
**Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Surabaya Menurut Golongan Umur**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Golongan Umur	2014			2015			2016			Triwulan I 2017		
		Angkatan Kerja		Jumlah	Angkatan Kerja		Jumlah	Angkatan Kerja		Jumlah	Angkatan Kerja		Jumlah
		Bekerja	Mencari Pekerjaan		Bekerja	Mencari Pekerjaan		Bekerja	Mencari Pekerjaan		Bekerja	Mencari Pekerjaan	
1	15-19	51.799	25.307	77.106	45.923	23.289	69.212	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	20-24	134.873	31.449	166.322	156.253	38.194	194.447	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	25-29	188.850	8.725	197.575	188.405	19.949	208.354	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	30-34	230.950	5255	236.205	201.262	5.362	206.624	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	35-39	177.735	4.686	182.421	178.120	2.001	180.121	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	40-44	188.379	1.071	189.450	162.859	3.730	166.589	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	45-49	128.094	2.192	130.286	141.305	3.140	144.445	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	50-54	126.944	1.190	128.134	120.863	2.543	123.406	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	55-59	73.830	3.730	77.560	90.158	2.576	92.734	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	60+	78.703	1.840	80.543	80.032	2.130	82.162	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2017

Pada Tahun 2014 penduduk Surabaya yang bekerja sebesar 1.380.157 orang atau 94,17 persen dari keseluruhan angkatan kerja di Surabaya, sedangkan pada tahun 2015 penduduk Surabaya yang bekerja sebesar 1.365.180 orang atau 92.99 persen dari keseluruhan angkatan kerja.

Peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai sektor akan memberikan dampak positif baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan. Peningkatan kesempatan kerja yang diikuti dengan peningkatan produktivitas diharapkan mampu menambah penghasilan/pendapatan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan dan pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya insani, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi. Di samping itu, pembangunan seni, budaya dan olahraga juga dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan eksistensi bangsa melalui pembinaan prestasi yang setinggi-tingginya. Data perkembangan seni, budaya dan olahraga Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II. 35.

**Tabel II. 35**  
**Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Capaian Pembangunan	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Grup Kesenian	226	219	498	561
2	Jumlah Gedung Kesenian	4	4	4	4
3	Jumlah Klub Olahraga	43	43	43	43
4	Jumlah Gedung Olahraga	4	4	4	4

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2017

Dasar pembangunan seni budaya tentu adalah minat masyarakat kota Surabaya terhadap seni budaya itu sendiri, terutama minat akan budaya lokal. Salah satu wadah untuk menyalurkan minat terhadap budaya lokal adalah melalui kelompok / grup kesenian. Jumlah grup kesenian yang ada di Kota Surabaya tahun 2014 sebanyak 226, tahun 2015 sebanyak 219 grup kesenian sedangkan pada tahun 2016 terdapat 498

grup kesenian dan 4 gedung kesenian. Sampai dengan triwulan 1 tahun 2017 jumlah grup kesenian di Kota Surabaya sebanyak 561 grup kesenian dan 4 gedung kesenian.

Jumlah cabang olahraga pada tahun 2017 sebanyak 43 cabang olahraga, dan yang telah berprestasi di tingkat nasional maupun internasional sebanyak 41 cabang olahraga. Untuk memfasilitasi pembinaan cabang olahraga tersebut, diperlukan gedung olahraga yang baik dan memadai. Pada tahun 2017, gedung olahraga yang merupakan aset milik Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 4 unit antara lain Gelanggang Remaja, Gelora 10 Nopember, Gelora Bung Tomo dan gedung indoor Surabaya *Sport Center* (SSC). Selain itu, terdapat pula fasilitas gedung untuk pembinaan cabang-cabang olahraga milik KONI Provinsi Jawa Timur, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, dan milik perseorangan maupun badan usaha yang memperhatikan pengembangan olahraga.

### **2.1.3. Aspek Pelayanan Umum**

#### **2.1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan:

##### **2.1.3.1.1. Pendidikan**

Untuk mewujudkan Surabaya sebagai kota sentosa melalui peningkatan SDM yang berkualitas, salah satunya dilakukan melalui pelayanan bidang pendidikan yang merupakan pelayanan dasar. Keberhasilan pelayanan pendidikan dapat diukur melalui APK, APM, Angka Kelulusan (AL), dan Angka Putus Sekolah (APS).

##### **2.1.3.1.1.a Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Data perkembangan APK Kota Surabaya tahun 2014 – Triwulan I 2017 telah disajikan di atas pada Tabel II. 23 dan APK per kecamatan dalam Tabel II. 36 berikut.

**Tabel II. 36**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya**  
**Menurut Kecamatan Triwulan I Tahun 2017**

Kecamatan	APK SD/MI			APK SMP/MTS		
	jumlah penduduk usia 7-12 tahun	jumlah seluruh siswa di jenjang SD/MI	APK	jumlah penduduk usia 13-15 tahun	jumlah seluruh siswa di jenjang SMP/MTS	APK
Asemrowo	4.999	3.814	76,30%	2.429	1.680	69,16%
Benowo	6.396	6.523	101,99%	3.200	1.589	49,66%
Bubutan	9.681	9.055	93,53%	5.007	2.337	46,67%
Bulak	4.431	6.105	137,78%	2.300	2.564	111,48%
Dukuh Pakis	5.494	6.198	112,81%	2.735	2.613	95,54%
Gayungan	3.933	6.503	165,34%	2.078	2.685	129,21%
Genteng	5.122	7.089	138,40%	2.715	5.134	189,10%
Gubeng	12.361	14.034	113,53%	6.369	3.809	59,81%
Gunung Anyar	5.283	4.823	91,29%	2.549	1.412	55,39%
Jambangan	4.682	4.509	96,30%	2.364	3.571	151,06%
Karangpilang	6.666	7.017	105,27%	3.578	3.828	106,99%
Kenjeran	16.445	16.728	101,72%	8.580	8.097	94,37%
Krembangan	10.882	13.083	120,23%	5.756	8.354	145,14%
Lakarsantri	5.688	7.556	132,84%	2.840	4.416	155,49%
Mulyorejo	7.670	9.912	129,23%	3.974	5.505	138,53%
Pabean Cantian	7.383	4.592	62,20%	3.833	1.898	49,52%
Pakal	5.498	6.875	125,05%	2.850	3.283	115,19%
Rungkut	10.299	10.656	103,47%	5.137	5.017	97,66%
Sambikerep	5.935	5.122	86,30%	2.994	2.443	81,60%
Sawahan	19.594	16.306	83,22%	10.100	4.371	43,28%
Semampir	18.700	20.430	109,25%	9.636	5.833	60,53%
Simokerto	8.941	6.568	73,46%	4.646	3.711	79,88%
Sukolilo	9.941	11.758	118,28%	4.972	6.837	137,51%
Sukomanunggal	9.356	10.536	112,61%	4.731	5.895	124,60%
Tambaksari	20.554	17.924	87,20%	10.631	6.195	58,27%
Tandes	8.886	11.143	125,40%	4.241	4.828	113,84%
Tegalsari	8.952	10.576	118,14%	4.729	3.788	80,10%
Tenggilis Mejoyo	5.114	5.707	111,60%	2.525	2.908	115,17%
Wiyung	6.379	6.498	101,87%	3.393	2.625	77,37%
Wonocolo	7.192	8.770	121,94%	3.642	4.652	127,73%
Wonokromo	14.947	12.294	82,25%	8.031	8.512	105,99%
<b>Jumlah</b>	<b>277.404</b>	<b>288.704</b>	<b>104,07%</b>	<b>142.565</b>	<b>130.390</b>	<b>91,46%</b>

Sumber: Dinas Pendidikan, 2017



### 2.1.3.1.1.b Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Data perkembangan APM Kota Surabaya tahun 2014 – Triwulan I 2017 telah disajikan di atas pada Tabel II. 21 dan APM per kecamatan pada Tabel II. 37.

**Tabel II. 37**  
**Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Menurut Kecamatan**  
**Triwulan I Tahun 2017**

Kecamatan	APM SD/MI			APM SMP/MTS		
	jumlah penduduk usia 7-12 tahun	siswa berusia 7-12 tahun yang berada di jenjang SD/MI	APK	jumlah penduduk usia 13-15 tahun	siswa berusia 13-15 tahun yang berada di jenjang SMP/MTs	APK
Asemrowo	4.999	3.577	71,55%	2.429	1499	61,71%
Benowo	6.396	6.346	99,22%	3.200	1552	48,50%
Bubutan	9.681	8.754	90,42%	5.007	2166	43,26%
Bulak	4.431	5.876	132,61%	2.300	2384	103,65%
Dukuh Pakis	5.494	5.989	109,01%	2.735	2544	93,02%
Gayungan	3.933	6.235	158,53%	2.078	2541	122,28%
Genteng	5.122	6.868	134,09%	2.715	4966	182,91%
Gubeng	12.361	13.162	106,48%	6.369	3662	57,50%
Gunung Anyar	5.283	4.667	88,34%	2.549	1271	49,86%
Jambangan	4.682	4.358	93,08%	2.364	3478	147,12%
Karangpilang	6.666	6.780	101,71%	3.578	3706	103,58%
Kenjeran	16.445	15.690	95,41%	8.580	7430	86,60%
Krembangan	10.882	12.630	116,06%	5.756	7966	138,39%
Lakarsantri	5.688	7.412	130,31%	2.840	4272	150,42%
Mulyorejo	7.670	9.589	125,02%	3.974	5153	129,67%
Pabean Cantian	7.383	4.335	58,72%	3.833	1787	46,62%
Pakal	5.498	6.703	121,92%	2.850	3154	110,67%
Rungkut	10.299	10.037	97,46%	5.137	4805	93,54%
Sambikerep	5.935	4.983	83,96%	2.994	2332	77,89%
Sawahan	19.594	15.652	79,88%	10.100	4085	40,45%
Semampir	18.700	18.843	100,76%	9.636	5189	53,85%
Simokerto	8.941	6.273	70,16%	4.646	3414	73,48%
Sukolilo	9.941	11.381	114,49%	4.972	6522	131,17%
Sukomanunggal	9.356	10.122	108,19%	4.731	5587	118,09%
Tambaksari	20.554	17.126	83,32%	10.631	5682	53,45%
Tandes	8.886	10.782	121,34%	4.241	4538	107,00%
Tegalsari	8.952	10.176	113,67%	4.729	3624	76,63%

Kecamatan	APM SD/MI			APM SMP/MTS		
	jumlah penduduk usia 7-12 tahun	siswa berusia 7-12 tahun yang berada di jenjang SD/MI	APK	jumlah penduduk usia 13-15 tahun	siswa berusia 13-15 tahun yang berada di jenjang SMP/MTs	APK
Tenggilis Mejoyo	5.114	5.515	107,84%	2.525	2740	108,51%
Wiyung	6.379	6.315	99,00%	3.393	2530	74,57%
Wonocolo	7.192	8.314	115,60%	3.642	4365	119,85%
Wonokromo	14.947	11.776	78,79%	8.031	7996	99,56%
	277.404	276.266	99,59%	142.565	122.940	86,23%

Sumber: Dinas Pendidikan, 2017

Tabel II. 36 dan Tabel II. 37 menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan pendidikan sudah baik namun perlu dilakukan upaya pemerataan fasilitas layanan pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. APM dan APK seluruh jenjang sekolah di Kota Surabaya menunjukkan fluktuasi namun secara garis besar mengalami peningkatan.

Dari data pada Tabel II. 36 dan Tabel II. 37 terdapat beberapa kecamatan yang memiliki APK dan APM lebih dari 100 %, kondisi ini menunjukkan bahwa di wilayah tersebut jumlah sekolah lebih banyak dari wilayah lain dan sekolah-sekolahnya memiliki kualitas lebih baik, sehingga menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lainnya untuk bersekolah di wilayah tersebut. Sebaliknya kecamatan yang memiliki APK dan APM kurang dari 100 % menunjukkan kondisi bahwa di wilayah kecamatan tersebut ketersediaan atau jumlah sekolah sedikit dan kualitas sekolah masih kurang sehingga menyebabkan penduduk usia sekolah cenderung memilih bersekolah di luar wilayah kecamatan. Aspek yang mendorong tingginya nilai APK dan APM adalah sarana prasarana, fasilitas, kualitas tenaga pendidik dan penerapan kurikulum.

#### 2.1.3.1.1.c Angka Kelulusan (AL)

Angka kelulusan dihitung berdasarkan jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan yang lulus dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir.

AL untuk jenjang SD/MI tahun 2014 sampai 2015 mencapai angka 100 persen. Sedangkan AL untuk jenjang SMP/MTs tahun 2014 sebesar 99,99 persen dan tahun 2015 mencapai 100 persen. Untuk angka kelulusan pada tahun 2016, untuk jenjang

SD/MI sebesar 100 persen dan untuk jenjang SMP/MTs sebesar 99,97 persen. Angka Kelulusan Kota Surabaya tahun 2014 – triwulan I 2017 masih sesuai tahun 2016 karena akhir tahun ajaran baru dibulan Juni 2017 seperti disajikan pada Tabel II. 38.

**Tabel II. 38**  
**Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
<b>1.</b>	<b>SD/MI</b>				
1.1	Jumlah Siswa SD/MI yang Lulus	45.498	45.990	40.849	N/A
1.2	Jumlah Keseluruhan Siswa SD/MI Kelas 6	45.498	45.990	40.849	N/A
	AL SD/MI (persen)	100	100	100	N/A
<b>2.</b>	<b>SMP/MTs</b>				
2.1	Jumlah Siswa SMP/MTs yang Lulus	38.319	43.090	39.570	N/A
2.2	Jumlah Keseluruhan Siswa SMP/MTs Kelas 9	38.321	43.090	39.580	N/A
	AL SMP/MTs (persen)	99,99	100	99,97	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan, 2017

Kelulusan siswa ditentukan oleh masing-masing sekolah, alat ukur kelulusan tidak lagi berdasarkan Nilai Ujian Nasional, akan tetapi juga ditentukan poses pembelajaran dan prestasi siswa selama bersekolah dijenjang masing-masing. Dari data pada Tabel II. 38 menunjukkan bahwa rata-rata siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir dinyatakan lulus.

#### **2.1.3.1.1.d Angka Putus Sekolah (APS)**

Angka Putus Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah anak-anak usia sekolah yang sudah tidak lagi bersekolah atau yang tidak menamatkan pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok usia sekolah. Jadi semakin rendah APS, maka kondisi pendidikan menjadi semakin baik. Saat ini, penyebab utama putus sekolah lebih disebabkan karena kurangnya kesadaran orang tua maupun anak yang bersangkutan akan pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan, baik karena dari dalam diri anak yang bersangkutan merasa malas untuk pergi ke sekolah, terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang tidak mendukung untuk menempuh

pendidikan, maupun karena menikah sehingga tidak lagi menganggap pendidikan sebagai prioritas.

Pada tahun 2015 APS di jenjang SD/MI sedikit meningkat menjadi sebesar 0,00% dibandingkan pada tahun 2014 sebesar 0,0025%. APS SMP/MTs pada tahun 2015 sebesar 0,00%, naik dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 0,002%. APS di jenjang SMA/MA tahun 2015 sebesar 0,004%, dibandingkan tahun 2014 sebesar 0,01%. Pada tahun 2016, APS di jenjang SD/MI dan di jenjang SMP/MTs sebesar 0 persen, sedangkan di jenjang SMA/MA sebesar 0,01 persen dan di jenjang SMK sebesar 0,01 persen. Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya Tahun 2014 – triwulan I 2017 dapat dilihat pada Tabel II. 39.

**Tabel II. 39**  
**Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1.	SD/MI				
	Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang SD/MI	7	0	0	0
	Jumlah Keseluruhan Siswa SD/MI	281.789	284.313	281.310	285.627
	APS SD/MI (persen)	0,0025	0	0	0
2.	SMP/MTs				
	Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang SMP/MTs	3	0	0	0
	Jumlah Keseluruhan Siswa SMP/MTs	129.845	145.123	135.283	130.505
	APS SMP/MTs (persen)	0,002	0	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan, 2017

Seperti halnya angka kelulusan, dari data pada Tabel II. 39 di atas menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang mengalami putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan hanya sebagian kecil dari siswa jenjang SMA dan SMK yang mengalami putus sekolah dikarenakan mengikuti orang tua yang pindah tugas dan bekerja.

#### **2.1.3.1.1.e Angka Melanjutkan (AM)**

AM diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dengan jumlah siswa yang lulus ujian. Untuk angka melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa baru kelas 7 SMP/MTs dengan jumlah lulusan SD/MI. Sedangkan angka melanjutkan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah

siswa baru tingkat 10 SMA/MA/SMK dengan jumlah lulusan SMP/MTs.

Angka Melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 99,54% dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 99,60%. Penurunan juga terjadi pada Angka Melanjutkan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2014 sebesar 110,42% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 100,04%. Menurunnya Angka Melanjutkan tersebut (0,06%) di atas dikarenakan salah satunya karena keterbatasan akses untuk mendata lulusan siswa Surabaya yang melanjutkan ke luar kota Surabaya. Pada tahun 2016, Angka Melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs sebesar 105,51 persen dan Angka Melanjutkan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK sebesar 116,54 persen. Data Angka Melanjutkan sampai dengan Triwulan I 2017 masih menggunakan data sesuai tahun 2016 karena tahun ajaran baru pada bulan Juli 2017.

Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kota Surabaya Tahun 2014 – triwulan I 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II. 40**  
**Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Indikator	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	(AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs				
	Jumlah Siswa Baru Tingkat I Pada Jenjang SMP/MTs	45.316	45.778	43.099	N/A
	Jumlah Lulusan pada Jenjang SD/MI Tahun Sebelumnya	45.498	45.990	40.849	N/A
	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs (persen)	100,8	99,54	105,51	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan, 2017

Seperti halnya angka kelulusan dan angka putus sekolah, dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil siswa yang tidak melanjutkan, hal ini dikarenakan mengikuti orang tua yang pindah tugas dan bekerja.

#### **2.1.3.1.1.f Rasio Ketersediaan Sekolah dibanding Penduduk Usia Sekolah**

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas ataupun guru. Dengan demikian jika ketersediaan ruang kelas dan guru pengajar

masih kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar.

Data ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kota Surabaya Tahun 2014 – triwulan I 2017 disajikan pada Tabel II. 41.

**Tabel II. 41**  
**Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>				
1.1.	Jumlah gedung sekolah	971	862	733	739
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	260.193	270.157	304.652	277.404
1.3.	Rasio	1 : 268	1 : 313	1 : 415	1.375
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>				
2.1	Jumlah gedung sekolah	375	356	341	348
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	129.367	138.173	158.893	130.505
2.3	Rasio	0,28	0,31	1 : 465	1.375

Sumber : Dinas Pendidikan, 2017

**Tabel II. 42**  
**Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2015**

KECAMATAN	SD/MI					SMP/MTs					SMA/MA/SMK					
	Jumlah SD	Jumlah MI	Total	Jumlah Penduduk Usia 7-12	Rasio	Jumlah SMP	Jumlah MTs	Total	Jumlah Penduduk Usia 13-15	Rasio	Jumlah SMA	Jumlah MA	Jumlah SMK	Total	Jumlah Penduduk Usia 16-18	Rasio
Asemrowo	15	5	20	4782	1:240	4	0	4	2340	1:585	1	0	1	2	2181	1 : 1091
Benowo	11	5	16	5897	1:369	3	2	5	3044	1:609	2	1	1	4	2843	1 : 711
Bubutan	37	2	39	9422	1:242	9	0	9	4972	1:553	1	0	3	4	4754	1 : 1189
Bulak	16	5	21	4306	1:206	5	1	6	2257	1:377	2	0	1	3	2028	1 : 676
Dukuh Pakis	30	1	31	5228	1:169	14	1	15	2702	1:181	6	0	0	6	2489	1 : 415
Gayungan	18	1	19	3798	1:200	8	1	9	2035	1:227	5	0	2	7	1953	1 : 279
Genteng	23	1	24	4993	1:209	11	0	11	2727	1:248	13	0	5	18	2568	1 : 143
Gubeng	44	4	48	12085	1:252	18	0	18	6268	1:349	9	0	8	17	6008	1 : 354
Gununganyar	12	0	12	5014	1:418	7	0	7	2438	1:349	0	0	2	2	2398	1 : 1199
Jambangan	11	4	15	4508	1:301	6	0	6	2282	1:381	3	0	3	6	2054	1 : 343
Karangpilang	19	3	22	6453	1:294	12	0	12	3550	1:296	5	0	4	9	3234	1 : 360
Kenjeran	27	23	50	15519	1:311	14	4	18	8062	1:448	3	0	2	5	7447	1 : 1490
Krembangan	31	8	39	10493	1:270	17	1	18	5592	1:311	7	0	2	9	5331	1 : 593
Lakarsantri	19	5	24	5502	1:230	7	2	9	2771	1:308	6	0	1	7	2467	1 : 353
Mulyorejo	36	2	38	7365	1:194	12	0	12	3933	1:328	5	0	3	8	3550	1 : 444
Pabean Cantian	18	4	22	7202	1:328	8	0	8	3700	1:463	3	0	2	5	3564	1 : 713
Pakal	17	7	24	5233	1:219	6	3	9	2650	1:295	4	1	1	6	2532	1 : 422
Rungkut	23	5	28	9820	1:351	7	2	9	5133	1:571	5	2	2	9	4874	1 : 542
Sambikerep	13	6	19	5682	1:300	9	1	10	2894	1:290	7	1	4	12	2508	1 : 209
Sawahan	57	1	58	19154	1:331	16	2	18	9882	1:549	7	0	9	16	9317	1 : 583
Semampir	50	31	81	17875	1:221	22	5	27	9240	1:343	4	1	4	9	8614	1 : 958
Simokerto	27	6	33	8702	1:264	9	2	11	4611	1:420	6	1	3	10	4395	1 : 440

KECAMATAN	SD/MI					SMP/MTs					SMA/MA/SMK					
	Jumlah SD	Jumlah MI	Total	Jumlah Penduduk Usia 7-12	Rasio	Jumlah SMP	Jumlah MTs	Total	Jumlah Penduduk Usia 13-15	Rasio	Jumlah SMA	Jumlah MA	Jumlah SMK	Total	Jumlah Penduduk Usia 16-18	Rasio
Sukolilo	39	0	39	9531	1:245	17	1	18	4821	1:268	12	0	10	22	4482	1 : 204
Sukomanunggal	39	1	40	9123	1:229	18	0	18	4562	1:254	6	1	8	15	4339	1 : 290
Tambaksari	50	8	58	19867	1:343	18	5	23	10478	1:456	8	2	4	14	9650	1 : 690
Tandes	21	9	30	8574	1:286	13	2	15	4112	1:275	1	2	1	4	3749	1 : 938
Tegalsari	36	3	39	8634	1:222	17	0	17	4646	1:274	4	0	0	4	4496	1 : 1124
Tenggilis Mejoyo	18	0	18	4842	1:269	9	0	9	2468	1:275	3	0	0	3	2366	1 : 789
Wiyung	17	1	18	6123	1:341	6	0	6	3329	1:555	1	1	0	2	3151	1 : 1576
Wonocolo	25	3	28	6828	1:244	10	2	12	3671	1:306	9	3	7	19	3429	1 : 181
Wonokromo	42	7	49	14666	1:300	19	1	20	7985	1:400	11	0	9	20	7623	1 : 382

Sumber: Dinas Pendidikan, 2017



Dari data pada Tabel II. 41 di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kebutuhan akan ketersediaan sekolah di jenjang SD dan SMP semakin meningkat. Namun jika dilihat rasio ketersediaan sekolah seperti data pada Tabel II. 42 ada beberapa wilayah kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan sekolah tinggi dan ada beberapa wilayah kecamatan dengan rasio ketersediaan sekolah rendah. Kecamatan yang memiliki rasio terbesar adalah Kecamatan Gununganyar dengan nilai rasio sebesar 1:418, sedangkan kecamatan yang memiliki rasio terkecil adalah Kecamatan Dukuh Pakis dengan nilai rasio sebesar 1:169. Pada tingkat SMP/MTs Kecamatan Benowo memiliki rasio tertinggi yaitu 1:609 dan Kecamatan Dukuh Pakis merupakan Kecamatan dengan rasio terendah yaitu 1:181.

Rasio kecamatan yang ketersediaan sekolahnya rendah justru menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lain untuk sekolah di wilayah tersebut sehingga menyebabkan APK dan APM di wilayah kecamatan tersebut tinggi. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki rasio ketersediaan sekolahnya tinggi perlu direncanakan penyediaan fasilitas pendidikan baru atau mengembangkan daya tampung sekolah yang ada agar penduduk usia sekolah dapat tertampung pendidikannya.

Selain ketersediaan sekolah, kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh mutu lembaga pendidikan yang dapat dilihat dari akreditasi lembaga pendidikan tersebut. Akreditasi memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektifitas, efisiensi, produktifitas dan inovasinya. Selain itu akreditasi juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa sekolah sudah memenuhi standar yang ditetapkan.

Dari data Dinas Pendidikan Tahun 2015 terdapat 322 sekolah yang terakreditasi A, 168 sekolah yang terakreditasi B dan 31 sekolah yang terakreditasi C. Terdapat 1073 sekolah yang belum terakreditasi dan 6 sekolah yang tidak terakreditasi. tahun 2016 terdapat 322 sekolah yang terakreditasi A, 168 sekolah yang terakreditasi B dan 31 sekolah yang terakreditasi C. Terdapat 1073 sekolah yang belum terakreditasi dan 6 sekolah yang tidak terakreditasi. Sedangkan untuk lembaga kursus/pelatihan berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Tahun 2016, terdapat 31 lembaga kursus/pelatihan yang telah terakreditasi dan 470 lembaga kursus/pelatihan belum terakreditasi.

Disamping pendidikan di sekolah dan lembaga kursus/pelatihan juga terdapat Pusat Kegiatan Belajar Mengajar yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan berupa kejar paket A, B dan C. Berdasarkan data Dinas Pendidikan tahun 2015 terdapat 36 PKBM yang tersebar di kecamatan dengan total peserta 1982 peserta, namun hanya 1788 peserta yang lulus. Sedangkan pada tahun 2016 terdapat 36 PKBM yang tersebar di kecamatan dengan total peserta 1982 peserta, namun hanya 1788 peserta yang lulus

**2.1.3.1.1.g Rasio Guru dibanding Murid**

Kebutuhan guru yang memenuhi kualifikasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Dengan pendidikan guru yang sesuai dengan standar kualifikasi maka diharapkan akan mampu menghasilkan kualitas siswa didik yang lebih berkualitas pula. Dan tentunya juga dibutuhkan ketersediaan guru yang berkompetensi di setiap sekolah.

Pada tahun 2015, jumlah guru di jenjang SD/MI sebanyak 12.418 orang dengan jumlah murid sebanyak 284.313 siswa, sehingga rasio guru SD/MI sebesar 1:23. Jumlah guru di jenjang SMP/MTs pada tahun 2015 sebanyak 6.460 orang dengan jumlah murid sebanyak 145.123 siswa, sehingga rasio guru SMP/MTs sebesar 1:22.

**Tabel II. 43**  
**Jumlah Guru dan Murid Kota Surabaya Tahun 2014-2016**

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>				
1.1	Guru	12.767	12.418	N/A	N/A
1.2	Murid	281.794	284.313	281.310	N/A
1.3	Rasio	1 : 22	1 : 23	N/A	N/A
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>				N/A
2.1	Guru	7.723	6.460	N/A	N/A
2.2	Murid	129.845	145.123	135.283	N/A
2.3	Rasio	1 : 17	1 : 22	N/A	N/A

Sumber : Dinas Pendidikan, 2017

Terkait dengan kualitas guru dapat dilihat dari jenjang pendidikan guru dan sertifikasi guru sebagaimana tabel berikut.

**Tabel II. 44**  
**Jumlah Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan**  
**Tahun 2016**

JENJANG	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	TOTAL
TK	0	N/A	N/A	13	0	3407	112	0	<b>3532</b>
SD	143	8	183	26	N/A	4,375	645	3	<b>5383</b>
SMP	34	11	12	41	0	2324	631	22	<b>3075</b>
<b>TOTAL</b>	<b>177</b>	<b>19</b>	<b>195</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>10106</b>	<b>1388</b>	<b>25</b>	<b>11990</b>

Sumber : Dinas Pendidikan, 2017

**Tabel II. 45**  
**Jumlah Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan**  
**Tahun 2016**

JENJANG	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	TOTAL
TK	584	63	116	51	0	2786	84	1	<b>3685</b>
SD	863	49	195	121	N/A	8314	341	4	<b>9887</b>
SMP	223	23	28	108	N/A	4285	371	2	<b>5040</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1670</b>	<b>135</b>	<b>339</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>15385</b>	<b>796</b>	<b>7</b>	<b>18612</b>

Sumber : Dinas Pendidikan, 2017

**Tabel II. 46**  
**Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Tahun 2016**

No	Jenjang	Kondisi 2015 (Telah Sertifikasi)			Jumlah Total Guru			Selisih Guru Yang Belum Sertifikasi		
		PNS	NON PNS	JML	PNS	NON PNS	JML	PNS	NON PNS	JML
1	TK	455	1755	<b>2210</b>	689	4757	<b>5446</b>	234	3002	<b>3236</b>
2	SD	3808	2031	<b>5839</b>	8981	5117	<b>14098</b>	5173	3086	<b>8259</b>
3	SMP	2286	1512	<b>3798</b>	2884	5939	<b>8819</b>	598	4423	<b>5021</b>
4	SLB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	SMA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	SMK	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	PENGAWAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	<b>JUMLAH</b>	<b>6549</b>	<b>5298</b>	<b>11847</b>	<b>12554</b>	<b>15809</b>	<b>28363</b>	<b>6005</b>	<b>10511</b>	<b>16516</b>

Sumber : Dinas Pendidikan, 2017

Dari data pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa masih ada 13.511 guru di seluruh jenjang pendidikan yang belum sertifikasi. Diharapkan dengan program dan kegiatan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya jumlah yang bersertifikasi akan mengalami peningkatan.

### 2.1.3.1.2. Kesehatan

Kualitas SDM salah satunya dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan meningkatnya AHH dan perilaku masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam meningkatkan AHH, terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, salah satunya melalui cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam serta layanan kesehatan ibu dan anak yaitu cakupan pelayanan ibu nifas, cakupan kunjungan bayi, balita gizi buruk yang mendapat perawatan yang dapat dilihat pada Tabel II. 47 sampai Tabel II. 50.

**Tabel II. 47**  
**Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani <24 Jam**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam	69	28	38	9
2	Jumlah kelurahan yang mengalami KLB	69	28	38	9
3	Persentase (persen)	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

**Tabel II. 48**  
**Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan	41.939	42.846	42.548	9.981
2	Jumlah ibu nifas	45.505	45.680	45.322	44.963
3	Persentase (persen)	92,37%	93,80%	93,88%	22,20%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

**Tabel II. 49**  
**Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah kunjungan bayi	40.315	40.455	40.086	9.780
2	Jumlah bayi	42.568	43.178	42.767	42.377
3	Persentase (persen)	94,71%	93,69%	93,73%	23,08%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

**Tabel II. 50**  
**Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan	366	282	280	58
2	Jumlah balita gizi buruk	366	282	280	58
3	Persentase (persen)	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

Terdapat 10 jenis PHBS di rumah tangga yaitu: 1) persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan; 2) memberikan bayi ASI eksklusif; 3) menimbang balita setiap bulan; 4) menggunakan air bersih; 5) mencuci tangan dengan air bersih dan sabun; 6) menggunakan jamban sehat; 7) memberantas jentik di rumah sekali seminggu; 8) makan buah dan sayur setiap hari; 9) melakukan aktifitas fisik setiap hari, dan 10) tidak merokok dalam rumah. Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dimulai dari lingkungan yang terkecil. Lingkungan terkecil dan efektif untuk mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat adalah rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat, yaitu memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Perkembangan rumah tangga ber- PHBS dapat dilihat pada Tabel II. 51 di bawah dan diharapkan setiap tahun jumlah rumah tangga yang ber-PHBS nya semakin meningkat dan derajat kesehatan masyarakat semakin baik.

**Tabel II. 51**  
**Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS	141.162	160.758	157.878	N/A
2	Jumlah Rumah Tangga Dipantau	210.369	223.584	210.302	N/A
3	Persentase (persen)	67,1	71,9	75,07	N/A

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

Rumah tangga ber- PHBS juga didukung dengan adanya kelurahan siaga aktif yang dapat dilihat pada Tabel II. 52.

**Tabel II. 52**  
**Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah kelurahan siaga aktif	154	154	154	154
2	Jumlah kelurahan siaga	154	154	154	154
3	Persentase (persen)	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

Akses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah maupun upaya-upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui posyandu. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 jumlah posyandu mengalami peningkatan, hal ini disebabkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan meningkat, sedangkan pada tahun 2016 jumlah posyandu mengalami penurunan karena terdapat penggabungan beberapa posyandu yang menyesuaikan jumlah balita diwilayahnya masing-masing. Jumlah posyandu dan balita Kota Surabaya Tahun 2014 – triwulan I 2017 dapat dilihat dalam Tabel II. 53.

**Tabel II. 53**  
**Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah posyandu	2.820	2.826	2.824	2.778
2	Jumlah balita	218.774	217.873	215.713	213.590
3	Rasio posyandu per 1.000 penduduk	12,89	12,97	13,09	13,01

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2017

Dari data Tabel II. 53 diatas, menunjukkan bahwa rasio posyandu per 100 penduduk angkanya relatif stagnan berkisar angka 12-13. Keberadaan posyandu sangatlah penting karena merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, bersama masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan dasar di Kota Surabaya yang terus meningkat, maka Pemerintah Kota meningkatkan pelayanan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap dari 20

Puskesmas di tahun 2014 menjadi 21 puskesmas di tahun 2015. Pada tahun 2016, terdapat 21 puskesmas menjadi puskesmas rawat inap dan sampai dengan triwulan I 2017, sebanyak 21 puskesmas menjadi puskesmas rawat inap. Jika ditinjau dari skala wilayah Kota Surabaya dengan data jumlah penduduk Kota Surabaya sampai dengan triwulan I 2017 sejumlah **3,307,300** jiwa, maka 1 Puskesmas kurang lebih melayani 1.750 jiwa. Apabila dibandingkan dengan standar nasional bahwa 1 Puskemas melayani 30.000 jiwa, maka pada saat ini sarana kesehatan dasar di Kota Surabaya masih mencukupi.

Jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, dan klinik mengalami fluktuasi dari tahun 2014 sampai triwulan I 2017 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II. 54.

**Tabel II. 54**  
**Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah puskesmas	62	63	63	63
2	Jumlah klinik	243	261	296	304
3	Jumlah pustu	60	59	59	59

Sumber: Dinas Kesehatan, 2017

Sebagai fasilitas kesehatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit berperan dalam memberikan layanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Data rumah sakit dapat dilihat pada Tabel II. 55.

**Tabel II. 55**  
**Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Penduduk	2.853.661	2.943.528	3.307.300	3.307.300
2	Rumah Sakit Umum (Pemerintah/ Provinsi)	3	3	3	3
3	Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah/ Provinsi	5	5	4	4
4	Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	7	7	7	7
5	Rumah Sakit Daerah	2	2	2	2
6	Rumah Sakit Swasta	44	44	43	44
<b>Jumlah Rumah Sakit</b>		<b>61</b>	<b>61</b>	<b>59</b>	<b>60</b>
<b>Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk</b>		<b>0,0213</b>	<b>0,0207</b>	<b>0.0178</b>	<b>0.0181</b>

Sumber : Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah SDM tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di masyarakat. Pada tahun 2014, jumlah dokter di kota Surabaya sebanyak 6.364 orang, dengan rasio sebesar 2,23 dokter per 1.000 penduduk. Terjadi peningkatan jumlah dokter pada tahun 2015, menjadi 6.839 orang, dengan rasio sebesar 2,32 dokter per 1.000 penduduk atau 23,2 dokter per 100.000 penduduk. Pada tahun 2016, jumlah dokter sebanyak 7.358 orang, dengan rasio 2,22 per 1000 penduduk. Dan sampai dengan triwulan I 2017, jumlah dokter di Kota Surabaya sebanyak 74,88 Apabila dibandingkan dengan rasio jumlah dokter di Indonesia berdasarkan Sistem Kesehatan Nasional tahun 2012 sebesar 19 dokter per 100.000 penduduk, maka pada saat ini jumlah dokter di Kota Surabaya masih mencukupi. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II. 56.

**Tabel II. 56**  
**Jumlah Dokter Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah penduduk	2.853.661	2.943.528	3.307.300	3.307.300
2	Jumlah dokter	6.364	6.839	7.358	7.488
3	Rasio dokter per 1.000 penduduk	2,23	2,32	2,22	2,23

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2017

Pemberian layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah berupaya untuk terus ditingkatkan. Hal ini dapat diukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di 2 (dua) rumah sakit umum pemerintah yang dapat dilihat pada Tabel II. 57. Pada tahun 2017, pelaksanaan survey kepuasan masyarakat akan dilaksanakan pada bulan April.

**Tabel II. 57**  
**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Instansi	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
RSUD Bhakti Dharma Husada	74,67	-	78,91	Tahap Pelaksanaan
RSUD dr. Mohamad Soewandhie	72,83	-	77,02	

Sumber : Bagian Organisasi, 2017

Catatan : IKM Tahun 2015 di RSUD Bhakti Dharma Husada dan RSUD dr. Mohamad Soewandhie tidak dilakukan.



Selain itu, peningkatan mutu pelayanan kesehatan juga diupayakan melalui akreditasi fasilitas kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, puskesmas wajib terakreditasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2015 terdapat 3 puskesmas yang telah diakreditasi yaitu puskesmas asemrowo, puskesmas tambakrejo, dan puskesmas Gayungan, dan pada tahun 2016 terdapat 12 puskesmas telah dilakukan akreditasi diantaranya yaitu Puskesmas Pucang Sewu, Puskesmas Dupak, Puskesmas Jagir, Puskesmas Simomulyo, Puskesmas Sawahan, Puskesmas Tanah Kali Kedinding, Puskesmas Balongsari, Puskesmas Medokan Ayu, Puskesmas Gunung Anyar, Puskesmas Keputih, Puskesmas Pegirian, Puskesmas Jeruk. Untuk rumah sakit umum daerah, hanya RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang telah dikareditasi pada tahun 2015 dengan hasil akreditasi paripurna, sedangkan untuk RSUD Bhakti Dharma Husada pada tahun 2016 telah terakreditasi dengan hasil akreditasi utama.

### **2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

#### **2.1.3.1.3.a Pekerjaan Umum**

Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan kota serta mengoptimalkan jalan yang mengalami *bottle neck* di Kota Surabaya yang terintegrasi dengan jaringan jalan regional dan nasional.

Pada Tahun 2014 panjang jalan kondisi baik adalah 1.648,84 km dari panjang jalan secara keseluruhan 1.679,60 km, dengan prosentase 98,17%. Pada Tahun 2015, panjang jalan kondisi baik mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2014, yaitu menjadi sepanjang 1.660,17 km dari panjang jalan secara keseluruhan sepanjang 1.684,00 km, dengan prosentase sebesar 98,58%. Sementara pada Tahun 2016, panjang jalan dalam kondisi baik 1.662,99 km, dengan prosentase 98,61%. Persentase panjang jalan kondisi baik di Kota Surabaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dapat dilihat pada Tabel II. 58.

**Tabel II. 58**  
**Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (Km)	1.648,84	1.660,17	1.662,99	-
Panjang Jalan (Km)	1.679,60	1.684,00	1.686,38	-
Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik (%)	98,17%	98,58%	98,61%	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2017

#### **2.1.3.1.3.b Penataan Ruang**

Kota Surabaya merupakan kota yang berkembang secara pesat dan dinamis, sehingga membutuhkan dasar terkait arah dan pedoman pemanfaatan ruang yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana rincinya. Kota Surabaya telah memiliki RTRW yang berupa Perda No. 12 tahun 2014 tentang RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034 dan perlu didetailkan dalam rencana rinci. Dengan pesatnya perkembangan kota, maka kualitas perencanaan ruang perlu ditingkatkan yang terintegrasi dengan rencana-rencana sektoral lainnya.

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan ruang, upaya yang telah dilakukan antara lain adalah dengan melakukan integrasi rencana tata ruang dengan rencana sektoral lainnya dan meningkatkan koordinasi penataan ruang melalui optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Surabaya. Sedangkan dalam rangka peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang kota, upaya yang telah dilakukan antara lain menggunakan referensi tunggal dalam penyusunan peta rencana tata ruang yang kemudian menjadi dasar bagi perizinan pemanfaatan ruang kota. Peta rencana tata ruang kota tersebut berbasis GIS dan dapat diakses langsung oleh masyarakat dalam aplikasi perizinan Surabaya Single Window (SSW).

Rencana tata ruang wilayah kota dan rencana rincinya menjadi dasar untuk penerbitan perizinan pemanfaatan ruang dan administrasi pertanahan. Penerbitan perizinan pemanfaatan ruang berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang kota. Berdasarkan jenisnya, terdapat 3 (tiga) jenis IMB yang diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya yaitu IMB rumah tinggal, IMB non

rumah tinggal serta IMB Reklame. Jumlah IMB yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Surabaya disajikan pada Tabel II. 59.

**Tabel II. 59**  
**IMB yang diterbitkan Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Rumah Tinggal	4.461	6.411	7.196	930
2	Non Rumah Tinggal	1.306	1.239	1.762	114
3	Reklame	1.413	902	2.450	1.044
<b>Total</b>		<b>7.180</b>	<b>8.552</b>	<b>11.408</b>	<b>2.088</b>

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2017

Meningkatnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang kota dapat diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah ijin mendirikan bangunan yang diterbitkan. Penerbitan ijin tersebut telah sesuai dengan perencanaan dan pemanfaatan ruang kota.

#### **2.1.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Pertumbuhan penduduk secara pesat terutama di perkotaan umumnya merupakan akibat dari urbanisasi, sehingga menimbulkan ancaman meluasnya lingkungan hunian atau permukiman kumuh di perkotaan. Permasalahan di kawasan perumahan dan permukiman, yaitu masih terdapat kawasan yang kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarananya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan (sampah, IPAL Komunal dan MCK ) dan sistem drainase lingkungan yang perlu ditingkatkan.

Berdasarkan SK Walikota No. 188.45/143/436.1.2/2015 tentang Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kota Surabaya ditetapkan 26 Kelurahan dengan luas 145,89 Ha sebagai kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (Gambar II.11 terlampir). Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan permukiman kumuh antara lain melalui peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman dilakukan dalam rangka mendukung program nasional 100-0-100. Daftar kawasan prioritas penataan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dapat dilihat pada Tabel II. 60.

**Tabel II. 60**  
**Daftar Kawasan Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman di Kota Surabaya**

No	Kecamatan	Kelurahan	Keterangan
1	Wonokromo	Sawunggaling	<b>PRIORITAS I</b>
2	Bulak	Kenjeran	
3	Bulak	Kedung Cowek	
4	Bulak	Sukolilo Baru	
5	Kenjeran	Bulak Banteng	
6	Rungkut	Rungkut Kidul	
7	Rungkut	Kalirungkut	
8	Semampir	Wonokusumo	
9	Semampir	Sidotopo	
10	Gubeng	Airlangga	<b>PRIORITAS II</b>
11	Mulyorejo	Kalisari	
12	Pakal	Benowo	
13	Simokerto	Tambakrejo	
14	Sukomanunggal	Putat Gede	
15	Tenggilis Mejoyo	Kutisari	
16	Krembangan	Morokrembangan	
17	Asemrowo	Asemrowo	<b>PRIORITAS III</b>
18	Bubutan	Bubutan	
19	Bubutan	Gundih	
20	Bulak	Kenjeran	
21	Gunung Anyar	Gunung Anyar Tambak	
22	Semampir	Sidotopo	
23	Tandes	Tandes	
24	Wonokromo	Darmo	
25	Krembangan	Dupak	
26	Tandes	Karangpoh	

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2017

Salah satu faktor penilaian kawasan kumuh adalah cakupan layanan sanitasi di kawasan tersebut. Untuk itu untuk menurunkan luasan permukiman kumuh di Kota Surabaya dapat dilakukan dengan upaya pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat untuk meningkatkan cakupan layanan sanitasi.

Terkait dengan upaya perbaikan kualitas kawasan permukiman salah satunya dilakukan melalui perbaikan rumah tinggal tidak layak huni yang diutamakan pada kawasan prioritas. Data terkait jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki dapat dilihat pada Tabel II. 61 berikut:

**Tabel II. 61**  
**Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki di Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	602	723	749	22

Sumber: Dinas Sosial, 2017

Pemerintah Surabaya terus berupaya dalam mengentaskan kemiskinan, salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan terpadu rehabilitasi sosial daerah kumuh (RSDK) di Kota Surabaya, baik untuk perbaikan fisik lingkungan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat di lingkungan perkampungan.

Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) dalam kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni ini merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan / atau keluarga miskin utamanya dikawasan permukiman kumuh.

Sesuai Perwali Surabaya Nomor 41 Tahun 2015, kegiatan RSDK kota Surabaya ini memiliki tujuan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan/atau keluarga miskin utamanya di kawasan permukiman kumuh;
- Meningkatkan kualitas lingkungan hunian melalui suatu upaya penyadaran dan perlunya penanganan terpadu baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana maupun kondisi sosial ekonomi masyarakatnya;
- Pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreatifitas, dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan di lingkungan tempat tinggalnya;
- Meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomian keluarga. Dengan sasaran menanggulangi masyarakat miskin di Surabaya.

RSDK Kota Surabaya merupakan kegiatan pembangunan berdasar partisipasi masyarakat (*community based development*). Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk melakukan pemberdayaan kepada warga masyarakat setempat agar dapat

meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan.

Luas kawasan terbangun atau yang mendapatkan fasilitas perbaikan lingkungan permukiman per kecamatan Kota Surabaya pada tahun 2015 sebesar 232.412,79 m<sup>2</sup> dengan luasan kawasan yang terlayani sebesar 1.162.063,96 m<sup>2</sup>. Pada tahun 2016, luas kawasan terbangun atau yang mendapat fasilitas perbaikan lingkungan permukiman per kecamatan Kota Surabaya sebesar 16.869,01 m<sup>2</sup> dengan luasan kawasan yang terlayani sebesar 84.345,03 m<sup>2</sup>, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

**Tabel II. 62**  
**Luas Kawasan Terlayani Menurut Kecamatan Kota Surabaya**  
**Tahun 2015 – Triwulan I 2017**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Kawasan Terlayani Tahun 2015		Luas Kawasan Terlayani Tahun 2016		Luas Kawasan Terlayani Triwulan I 2017	
			Luas Kawasan Terbangun (m2)	Luas Kawasan Terlayani (m2)	Luas Kawasan Terbangun (m2)	Luas Kawasan Terlayani (m2)	Luas Kawasan Terbangun (m2)	Luas Kawasan Terlayani (m2)
1	Kec. Asemrowo	15.440.000	3.957,58	19.787,90	0	0	N/A	N/A
2	Kec. Benowo	26.780.000	20.957,33	104.786,63	0	0	N/A	N/A
3	Kec. Bubutan	3.680.000	1.220,95	6.104,75	692	3.460,00	N/A	N/A
4	Kec. Bulak	6.780.000	1.630,25	8.151,25	1.454,43	7.272,15	N/A	N/A
5	Kec. Dukuh Pakis	9.940.000	641,36	3.206,80	0	0	N/A	N/A
6	Kec. Gayungan	6.070.000	8.947,45	44.737,25	852,5	4.262,50	N/A	N/A
7	Kec. Genteng	4.050.000	3.537,38	17.686,90	1.331,40	6.657,00	N/A	N/A
8	Kec. Gubeng	8.000.000	6.877,28	34.386,40	592,5	2.962,50	N/A	N/A
9	Kec. Gunung Anyar	8.710.000	4.933,15	24.665,75	0	0	N/A	N/A
10	Kec. Jambangan	4.190.000	972,5	4.862,50	273,9	1.369,50	N/A	N/A
11	Kec. Karangpilang	9.230.000	5.310,30	26.551,50	0	0	N/A	N/A
12	Kec. Kenjeran	7.640.000	24.989,32	124.946,60	1.723,05	8.615,25	N/A	N/A
13	Kec. Krembangan	8.340.000	2.889,27	14.446,34	0	0	N/A	N/A
14	Kec. Lakarsantri	20.430.000	5.247,00	26.235,00	300	1.500,00	N/A	N/A
15	Kec. Mulyorejo	14.210.000	8.409,91	42.049,55	602	3.010,00	N/A	N/A
16	Kec. Pabean Cantian	6.800.000	3.929,32	19.646,58	0	0	N/A	N/A
17	Kec. Pakal	19.010.000	10.539,35	52.696,75	41,93	209,63	N/A	N/A
18	Kec. Rungkut	21.080.000	12.029,23	60.146,13	525	2.625,00	N/A	N/A
19	Kec. Sambikerep	16.050.000	7.534,43	37.672,15	0	0	N/A	N/A

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Kawasan Terlayani Tahun 2015		Luas Kawasan Terlayani Tahun 2016		Luas Kawasan Terlayani Triwulan I 2017	
			Luas Kawasan Terbangun (m2)	Luas Kawasan Terlayani (m2)	Luas Kawasan Terbangun (m2)	Luas Kawasan Terlayani (m2)	Luas Kawasan Terbangun (m2)	Luas Kawasan Terlayani (m2)
20	Kec. Sawahan	6.930.000	6.149,68	30.748,40	208,2	1.041,00	N/A	N/A
21	Kec. Semampir	8.770.000	7.627,44	38.137,18	0	0	N/A	N/A
22	Kec. Simokerto	2.590.000	6.217,20	31.086,00	0	0	N/A	N/A
23	Kec. Sukolilo	23.680.000	6.327,60	31.638,00	975,3	4.876,50	N/A	N/A
24	Kec. Sukomanunggal	9.230.000	7.441,51	37.207,55	1.441,30	7.206,50	N/A	N/A
25	Kec. Tambaksari	9.000.000	17.834,72	89.173,60	0	0	N/A	N/A
26	Kec. Tandes	11.060.000	12.846,51	64.232,53	1.261,16	6.305,80	N/A	N/A
27	Kec. Tegalsari	4.290.000	5.730,63	28.653,14	0	0	N/A	N/A
28	Kec. Tenggilis Mejoyo	5.520.000	7.603,40	38.017,00	462,9	2.314,50	N/A	N/A
29	Kec. Wiyung	12.460.000	849,7	4.248,50	1.855,79	9.278,95	N/A	N/A
30	Kec. Wonocolo	6.780.000	6.964,04	34.820,20	657	3.285,00	N/A	N/A
31	Kec. Wonokromo	8.470.000	12.267,03	61.335,15	1.618,65	8.093,25	N/A	N/A
<b>Total</b>		<b>325.210.000</b>	<b>232.412,79</b>	<b>1.162.063,96</b>	<b>16.869,01</b>	<b>84.345,03</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, 2017



Selain dengan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni secara bertahap, penangan rumah tidak layak huni di Kota Surabaya juga dilaksanakan melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Secara rinci jumlah pemohon rumah susun dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II. 63**  
**Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya**

Tahun	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Jumlah Pemohon Rusun	583	1199	801	212

Sumber: Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2017

Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tinggal yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan 79 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 15 lokasi yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Surabaya, dan pada triwulan I 2017 Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan 81 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 15 lokasi, yang disajikan pada Tabel II. 64 berikut.

**Tabel II. 64**  
**Jumlah dan Lokasi Persebaran Rusunawa**

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan/ Kecamatan	Tipe	Blok	Luas lahan (m2)	Keterangan
1	Dupak Bangunrejo	Kel. Dupak Kec. Krembangan	18	6	± 3.000	Dibangun th. 1989/1990 (APBN)
2	Sombo	Kel. Simolawang Kec. Simokerto	18	10	± 41. 044	Dibangun th. 1993/1994 (APBN)
3	Urip Sumoharjo	Kel. Embongkaliasin Kec. Genteng	21	3	± 3.500	Dibangun th. 1975 direhab th. 2004/2005 (APBD I)
4	Penjaringan Sari	Kel Penjaringan Sari Kec.Rungkut	18	3	± 32.350	Dibangun th. 1995 (APBN)
			21	6		Dibangun th. 2004 (APBN)
			24	2		Dibangun th. 2009 (APBN)
5	Wonorejo	Kel. Wonorejo Kec. Rungkut	21	2	± 5.466	Dibangun th. 2004 (APBN)
			21	4		Dibangun th. 2005/2006 (APBN)
6	Waru Gunung	Kel. Warugunung Kec. Karangpilang	21	10	± 29,845	Dibangun th. 1996 kerjasama dg PERUMNAS

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan/ Kecamatan	Tipe	Blok	Luas lahan (m2)	Keterangan
7	Randu	Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran	21	6	± 44.290	Dibangun t. 2008 (APBN)
8	Tanah Merah	Kel. Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran	21	4	± 28.810	Dibangun th. 2008 (APBN)
			24	4		
9	Grudo	Kel dr Soetomo Kec Tegalsari	24	2	± 5.000	Dibangun 2011 (APBN)
10	Pesapen	Kel. Krembangan Selatan Kec. Krembangan	24	1	± 2.500	Dibangun 2011-2012 (APBN)
11	Jambangan	Kel. Jambangan Kec. Jambangan	24	1	± 2.977,3	Dibangun 2011-2012 (APBN)
12.	TPI/PPI Romokalisari (1-3)	Kel. Romokalisari Kec. Benowo	24	10	± 25.000	Dibangun 2013-2015 (APBN)
13.	Siwalankerto I	Kel. Siwalankerto Kec. Wonocolo	24	2	± 8.000	Dibangun 2013-2014 (APBN)
14.	Jl. Bandarejo	Kel. Sememi Kec. Benowo	24	2	± 4.320	Dibangun 2012 (APBN)
15.	Gununganyar	Kelurahan Gununganyar Tambak Kecamatan Gununganyar	36	3	± 9.438	Dibangun 2014 (APBN)
<b>Total</b>				<b>81</b>		

Sumber : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2017

#### 2.1.3.1.5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya lainnya terkait pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

##### 2.1.3.1.5.a Penegakan Perda

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan

masyarakat dan disiplin aparaturnya dalam menegakkan peraturan. Data jumlah Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada Tabel II. 65 berikut.

**Tabel II. 65**  
**Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	497	532	648	648
2	Jumlah penduduk	2.853.661	2.943.528	3.307.300	3.316.131
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	1,74	1,81	1,96	1,95

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2017

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya memberikan ketentuan bahwa Satpol PP bertugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Salah satu upaya untuk melaksanakan tugas tersebut melalui patroli dalam rangka pemantauan dan penertiban pelanggaran perda/K3.

Pada tahun 2014, jumlah patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 adalah sejumlah 132 kali patroli dalam 24 jam/setiap harinya, Pada tahun 2015, jumlah patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 adalah sejumlah 162 kali patroli dalam 24 jam/setiap harinya. Sedangkan pada tahun 2016 jumlah patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 mengalami kenaikan yaitu sejumlah 168 kali patroli dalam 24 jam/setiap harinya, dan pada triwulan I 2017 jumlah patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 sebanyak 183 patroli sebagaimana tabel berikut.

**Tabel II. 66**  
**Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

URAIAN	T A H U N			
	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3	132	162	168	183

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2017

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan. Pelanggaran perda/K-3, antara lain, pelanggaran HO, IMB, Reklame, Kebersihan, Parkir Umum, Anjal/Gepeng, PKL, PSK dan Perda lainnya. Pada tahun 2014 dan 2015 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah 100%. Hal ini dapat menggambarkan kinerja aparat dalam penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan). Demikian pula pada tahun 2016, dari pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) sejumlah 47.067, keseluruhannya telah dapat diselesaikan. Sehingga tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah 100% dari 47.067 obyek yang ditangani. Pada triwulan I 2017, sebanyak 9.896 pelanggaran K3 telah diselesaikan atau sebesar 100 persen. Data penyelesaian pelanggaran K3 dapat dilihat pada Tabel II. 67.

**Tabel II. 67**  
**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3	84.382	72.218	47.067	9.896
2	Jumlah pelanggaran K3	84.382	72.218	47.067	9.896
3	% penyelesaian pelanggaran K3	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2017

Selain anggota Satpol PP, upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban juga didukung dengan adanya keanggotaan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Anggota Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di kota Surabaya pada tahun 2014 berjumlah sebanyak 35.556 orang. Dengan jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2014 sebesar 2.853.661 orang maka rasio jumlah tenaga linmas per 10.000 orang penduduk adalah sebanyak 124,60 orang. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah linmas adalah sebanyak 36.969 orang, maka rasio jumlah tenaga linmas per 10.000 orang penduduk adalah sebanyak 125,59 orang dari total jumlah penduduk sebanyak 2.943.528 orang. Pada tahun 2016, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 75 personil Linmas, dan pada triwulan I 2017, jumlah linmas adalah sebanyak 19.372 orang dengan jumlah penduduk Kota Surabaya sebesar 3.316.131 orang. Data rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk dapat dilihat pada Tabel II. 68.

**Tabel II. 68**  
**Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Linmas	35.556	36.969	24.859	19.372
2	Jumlah penduduk	2.853.661	2.943.528	3.307.300	3.316.131
3	Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk	124,6	125,59	75,16	58,42

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2017

Terdapat penurunan jumlah personil Linmas yang disebabkan oleh adanya petugas Linmas yang pindah ke luar kota, menikah, memiliki pekerjaan, serta meneruskan pendidikannya. Untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib sebagai salah satu prasyarat pelaksanaan pembangunan selain peningkatan petugas Satpol PP dan personil Linmas juga dilakukan pemasangan CCTV di setiap lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

Masih terdapat kejadian unjuk rasa yang mengarah pada tindakan anarkis pada tahun 2016 sebanyak 19 kejadian anarkis, dan pada triwulan I 2017 sebanyak 2 kejadian anarkis. Guna mencegah dan meminimalisasi kondisi tersebut, diperlukan kesiagaan petugas Linmas dan Satpol PP di Kota Surabaya.

**2.1.3.1.5.b Penanganan Bencana Kebakaran**

Salah satu pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani bencana kebakaran yakni cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Surabaya. Cakupan tersebut diukur dari peningkatan jumlah mobil pemadam kebakaran terhadap jumlah penduduk. Selain itu Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya dalam meningkatkan cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran melalui pembangunan pos pemadam kebakaran. Peningkatan dari cakupan pelayanan bencana tersebut tercantum dalam Tabel II. 69 berikut.

**Tabel II. 69**  
**Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	57	60	57	57
2	Jumlah Penduduk	2.853.661	2.943.528	3.307.300	3.316.131
3	Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	92,56%	92,56%	93%	93%

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2017

Pesatnya pembangunan yang diikuti oleh arus urbanisasi yang meningkat menimbulkan potensi munculnya kawasan-kawasan padat penduduk dengan sarana dan prasarana/infrastruktur yang belum memadai. Umumnya penataan jaringan utilitas seperti jaringan listrik menjadi salah satu penyebab dominan bencana kebakaran sebagai salah satu bencana perkotaan, di samping kejadian bencana lainnya.

**Tabel II. 70**  
**Kejadian Kebakaran per Penyebab**

No	Penyebab	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Hubungan Listrik	99	153	142	24
2	Api Terbuka	404	417	125	14
3	Api Mekanis	0	0	3	0
4	Dalam Penyelidikan	74	38	30	15
5	Tidak Ada Keterangan	8	0	0	0
<b>Total</b>		<b>585</b>	<b>608</b>	<b>300</b>	<b>53</b>

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran, 2017

Penanggulangan bencana kebakaran dilakukan Pemerintah Kota dengan merespon laporan kejadian kebakaran hingga siap sampai di tempat tujuan dalam jangka waktu maksimal 15 menit. Waktu tanggap ini dapat terlaksana didukung oleh upaya dan kesigapan kerja tim pemadam kebakaran serta ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran yang optimal. Pada tahun 2016, rata-rata pemenuhan waktu tanggap Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kejadian kebakaran telah mencapai 100 persen, di mana rata-rata pada tahun sebelumnya hanya mencapai 94 persen. Rincian tingkat waktu tanggap dapat dilihat pada Tabel II. 71.

**Tabel II. 71**  
**Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap ( <i>Response Time Rate</i> ) ≤ 15 Menit	536	604	300	53
2	Jumlah Kejadian Kebakaran	596	608	300	53

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, 2017

Sepanjang tahun 2014 tercatat telah terjadi 596 kejadian kebakaran dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 536 kejadian. Pada tahun 2015, jumlah kejadian kebakaran meningkat dibanding tahun 2014 yaitu 608 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 604 kejadian. Dan pada tahun 2016 terjadi 300 kejadian kebakaran dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 300 kejadian. Pada tahun 2017 triwulan 1, jumlah kejadian kebakaran yaitu 53 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 53 kejadian, sebagaimana tampak pada tabel di atas.

Cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015 dapat dilihat bahwa jumlah pos pemadam kebakaran dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin bertambah sehingga Pemerintah Kota berupaya dalam menambah jumlah pos pemadam kebakaran untuk memperluas skala

pelayanan kebakaran Kota Surabaya. Sampai dengan triwulan I 2017, jumlah pos pemadam kebakaran sebanyak 20 unit.

**Tabel II. 72**  
**Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	19	20	20	20
2	Jumlah Penduduk	2.853.661	2.943.528	3.307.300	3.316.131

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2017

Berikut adalah beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar penanggulangan kebakaran dapat berjalan dengan optimal di masing-masing WMK:

- a. Cakupan layanan WMK belum merata, tetapi terdapat kawasan yang cakupan layanannya saling berhimpit dan tumpang tindih.
- b. Terdapat kawasan yang belum dilayani WMK pos kebakaran pembantu (2,5 km), memiliki beberapa lapangan, terjadi kebakaran cukup sering namun tanpa ada sumber air sama sekali (atau tidak dilalui sungai).
- c. Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk sedang dan tinggi, jumlah kejadian kebakaran banyak, kawasan kumuh luas, titik kemacetan banyak, tidak ada lapangan, tidak ada taman, tetapi memiliki jumlah sumur kebakaran banyak dan dilalui sungai.
- d. Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk rendah, jumlah kejadian kebakaran banyak, tidak ada kawasan kumuh, titik kemacetan sedang, tidak ada lapangan, tidak ada taman, memiliki jumlah sumur kebakaran sedikit bahkan tidak ada sama sekali tetapi dilalui sungai.

#### **2.1.3.1.5.c Pembinaan Politik dan Organisasi Masyarakat**

Sesuai dengan ketentuan umum Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan disebutkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam



pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya merupakan bagian dari Ormas. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, setiap Ormas di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sedangkan untuk Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Bagi Ormas yang telah mendapat SKT akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan. Sebagai sebuah organisasi oleh anggota masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau yang disebut Ormas juga memiliki peran penting dalam rangka pemberdayaan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Adapun jumlah Ormas tahun 2014 – triwulan I 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II. 73**  
**Jumlah Ormas Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Ormas Aktif	146	151	51	32
2	Jumlah Ormas Terdaftar	146	151	167	167

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2017

Pemerintah Kota Surabaya melakukan pembinaan/pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja Ormas. Bentuk pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk rincian dapat dilihat pada Tabel II. 74 berikut.

**Tabel II. 74**  
**Kegiatan Pembinaan terhadap Ormas Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap ormas	3	3	1	0

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2017

Pembinaan terhadap Ormas dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas. Pemberdayaan Ormas melalui antara lain fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pada tahun 2017, kegiatan pembinaan terhadap ormas dilaksanakan pada triwulan II.

#### **2.1.3.1.6. Sosial**

Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya untuk menangani permasalahan sosial khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup (jasmani, rohani, dan sosial) secara wajar.

##### **2.1.3.1.6.a PMKS yang Ditangani**

Bentuk penanganan yang diterima PMKS antara lain berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan, pemulangan PMKS ke daerah asal, perbaikan rumah tidak layak huni, pemberian permakanan, pembinaan mental, pemberian beasiswa, dan pelayanan di 5 (lima) UPTD Dinas Sosial, yaitu UPTD Griya Werdha melayani dan menangani lanjut usia miskin dan terlantar, UPTD Kampung Anak negeri yang melayani dan menangani anak jalanan, anak nakal dan anak terlantar, UPTD Babat Jerawat melayani dan menangani eks penderita kusta, UPTD Ponsos Kalijudan melayani dan menangani anak berkebutuhan khusus dan pengasramaan

mahasiswa miskin berprestasi serta UPTD Liponsos Keputih yang melayani dan menangani gelandangan, penderita psikotik dan PMKS hasil penertiban.

**Tabel II. 75**  
**Penanganan PMKS Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah PMKS yang ada	47.199	49.881	50.222	50.222
2	Jumlah PMKS yang ditangani	27.652	28.907	30.468	27.945
3	Persentase PMKS yang ditangani (persen)	58,59	57,95	60,67	55,64

Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya, 2017

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa penanganan PMKS oleh Pemerintah Kota Surabaya meningkat tetapi belum dapat melayani seluruh PMKS di Kota Surabaya.

#### **2.1.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar**

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, yaitu urusan:

##### **2.1.3.2.1. Tenaga Kerja**

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Surabaya cenderung menurun dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak diimbangi dengan peningkatan angkatan kerja usia 15 tahun ke atas, yaitu sebesar 1.465.502 pada tahun 2014 menjadi 1.468.094 pada tahun 2015. Hal ini dimungkinkan bahwa sebagian penduduk usia 15 tahun ke atas, masih melanjutkan pendidikan sekolah. Adapun data tahun 2016 belum dapat disediakan dikarenakan anggaran untuk Sakernas besar (bulan agustus) pada tahun 2016 di geser oleh Pemerintah Pusat untuk kepentingan yang lain. Secara rinci, rasio angkatan kerja 15 tahun keatas terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, dapat dilihat pada Tabel II. 76.

**Tabel II. 76**

**Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Angkatan Kerja 15 Tahun Keatas	1.465.502	1.468.094	N/A	N/A
2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	2.201.854	2.220.853	2.537.150	N/A
3	Rasio angkatan kerja	0,66	0,66	N/A	N/A

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2017

**2.1.3.2.1.a Sengketa Pengusaha dan Pekerja**

Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara pekerja dengan pengusaha antara lain adanya pengaduan terkait masalah jamsostek, masalah upah pekerja, dan sistem kontrak kerja waktu tertentu. Secara rinci rasio jumlah sengketa pekerja pengusaha terhadap jumlah perusahaan, dapat dilihat pada Tabel II. 77.

**Tabel II. 77**

**Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Sengketa Pekerja Pengusaha	366	244	275	75
2	Jumlah Perusahaan	12.690	12.782	12.782	12.863
3	Rasio sengketa	2,88	1,91	2,15	0,58

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2017

Jumlah sengketa pekerja pengusaha pada tahun 2014 sebanyak 366, menurun pada tahun 2015 menjadi 244 dan pada tahun 2016 sebesar 275 sengketa. Sengketa pada tahun 2016 tersebut dipicu oleh kenaikan UMK yang menyebabkan terjadinya pemutusan Hubungan kerja dan adanya hak- hak yang belum terpenuhi.

**2.1.3.2.1.b Pencari Kerja yang Ditempatkan dan Difasilitasi**

Data pengangguran terbuka terbesar mempunyai pendidikan terakhir SLTA baik umum maupun kejuruan sehingga perlu dilakukan upaya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja khususnya untuk penyiapan tenaga kerja siap

pakai. Data pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada Tabel II. 78.

**Tabel II. 78**  
**Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

No	Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Tahun			
		2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Tidak/belum pernah sekolah			N/A	N/A
2	Tidak/belum tamat SD	1.102	1.855	N/A	N/A
3	Sekolah Dasar	7.769	6.772	N/A	N/A
4	SLTP	14.779	11.807	N/A	N/A
5	SLTA			N/A	N/A
	Umum	23.023	35.468	N/A	N/A
	Kejuruan	25.021	35.218	N/A	N/A
6	Diploma I/II/III/Akademi	2.688	1.337	N/A	N/A
7	Universitas	10.963	10.457	N/A	N/A
	<b>Jumlah</b>	<b>85.345</b>	<b>102.914</b>	N/A	N/A

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2017

Untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengurangi angka tersebut dengan cara memfasilitasi para pencari kerja dengan kegiatan pelatihan ketrampilan kerja, pemagangan, bimbingan *softskill*, bursa kerja, dan sebagainya. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran.

Dengan adanya pelatihan, jumlah angkatan kerja yang ditempatkan semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014 pencari kerja yang difasilitasi sebesar 12.307 orang dan 3.902 orang diantaranya berhasil ditempatkan, sedangkan pada 2015 jumlah pencari kerja yang difasilitasi sebesar 22.091 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 5.225 orang. Sementara itu, pada tahun 2016, jumlah pencari kerja yang difasilitasi sebesar 7.502 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 3.803 orang. Secara rinci pencari kerja yang difasilitasi dan ditempatkan dapat dilihat pada Tabel II. 79.

**Tabel II. 79**  
**Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Pencari Kerja yang Difasilitasi dan berhasil ditempatkan	3.902	5.225	3.803	227
2	Jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi	12.307	22.091	7.502	629

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2017

Jumlah pencari kerja yang difasilitasi dan ditempatkan oleh Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2016 mengalami penurunan karena difokuskan pada data pencari kerja yang ber KTP Surabaya. Dengan ini diharapkan kegiatan fasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja diharapkan dapat lebih efektif mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran. Namun demikian, peningkatan tersebut tidak seimbang dengan meningkatnya jumlah pencari kerja yang difasilitasi. Hal ini disebabkan lapangan pekerjaan yang semakin berkurang tidak mampu menampung pencari kerja yang telah memperoleh fasilitasi. Diharapkan dengan keahlian yang telah diperoleh dari fasilitasi oleh Pemerintah Kota Surabaya pencari kerja tersebut mampu membuka lapangan pekerjaan yang baru dari sektor informal agar mampu mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Kota Surabaya.

#### **2.1.3.2.1.c Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja**

Keselamatan dan perlindungan Tenaga Kerja merupakan aspek yang penting terkait ketenagakerjaan. Dengan adanya keselamatan dan perlindungan tenaga kerja atau K3, dapat memberikan manfaat dalam menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja melalui jaminan keselamatan kerja. Persentase perusahaan yang menerapkan K3 mengalami peningkatan pada 2016. Secara rinci rekap data presentase perusahaan yang menerapkan K3 dapat dilihat pada Tabel II. 80.

**Tabel II. 80**  
**Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	3.242	3.303	5.174	5.215
2	Jumlah Perusahaan	12.476	12.782	12.782	12.863
3	Persentase Perusahaan yang Menerapkan K3 (persen)	25,98	25,84	40,48	40,45

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2017

Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 pada tahun 2014 sebanyak 3.242 perusahaan dari 12.476 perusahaan atau sebesar 25,98 persen, sedangkan pada tahun 2015 perusahaan yang menerapkan sistem K3 terdapat 3.303 perusahaan dari 12.782 perusahaan yang ada di Surabaya, yaitu sebesar 25,84 persen. Pada tahun 2016 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 meningkat menjadi 5.174 perusahaan atau 40,48% dari total perusahaan yang terdaftar.

#### **2.1.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak. Indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dan hak anak adalah jumlah perempuan yang bekerja, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan, jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga.

##### **2.1.3.2.2.a Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya**

Pada tahun 2015 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 10.525 orang dari 559.357 orang atau sebesar 1,88 persen dari keseluruhan pekerja perempuan yang ada di Surabaya. Pada tahun 2016 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 10.159 orang. Adapun data tahun 2016 belum dapat disediakan dikarenakan anggaran untuk Sakernas besar (bulan agustus) pada tahun 2016 di geser oleh Pemerintah Pusat untuk kepentingan yang lain. Data partisipasi

perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II. 81.

**Tabel II. 81**  
**Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Pekerja Perempuan	566.649	559.357	N/A	N/A
2	Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya	10.112	10.525	10.159	8.619
3	Persen partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kota	1,78	1,88	N/A	N/A

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Badan Kepegawaian dan Diklat, 2017

Dari data pada Tabel II. 81 di atas menunjukkan bahwa banyak perempuan yang bekerja di luar sektor pemerintahan, dan persentasenya mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

#### 2.1.3.2.2.b Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Surabaya pada tahun 2014 sebesar 566.649 orang atau 94,53% dari jumlah angkatan kerja perempuan. Sementara itu pada tahun 2015, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 536.473 orang atau 93,68% dari jumlah angkatan kerja perempuan, dan Adapun data tahun 2016 belum dapat disediakan dikarenakan anggaran untuk Sakernas besar (bulan agustus) pada tahun 2016 di geser oleh Pemerintah Pusat untuk kepentingan yang lain . Data partisipasi angkatan kerja perempuan dapat dilihat pada Tabel II. 82.

**Tabel II. 82**  
**Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1.	Jumlah angkatan kerja perempuan	599.414	572.644	N/A	N/A
2.	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	566.649	536.473	N/A	N/A
3.	persen partisipasi angkatan kerja perempuan	94,53	93,68	N/A	N/A

Sumber : BPS dan Dinas Tenaga Kerja, 2017



**2.1.3.2.2.c Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kasus KDRT secara rinci dapat dilihat pada Tabel II. 83 di bawah ini.

**Tabel II. 83  
KDRT Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Rumah Tangga	846.472	896.967	N/A	N/A
2	Jumlah KDRT	70	41	77	24
3	Rasio KDRT	0,008	0,005	N/A	N/A

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, 2017

Fenomena KDRT ibarat fenomena gunung es, kasus yang dilaporkan dengan fakta yang ada di masyarakat berbeda. Meskipun dari data pada Tabel II. 83 di atas rasio KDRT mengalami penurunan, Pemerintah Kota Surabaya harus tetap waspada dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan terbukanya akses bagian korban KDRT untuk mengadu ke berbagai layanan yang ada di masyarakat diantaranya adalah PPTP2A, Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM), Pos Curhat dan Halo Anak Surabaya serta Satgas perlindungan perempuan dan Anak.

Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dalam indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan *Trafficking* (perdagangan orang), untuk rekap data penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dapat dilihat pada Tabel II. 84.

**Tabel II. 84**  
**Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	219	287	263	85
2	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terselesaikan	219	287	263	85
3	Persen penyelesaian pengaduan	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, 2017

Pemerintah Kota Surabaya telah memfasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN), Psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, *home visit*, *outreach*, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan keterampilan) dan pemberdayaan *dishelter* (rumah aman).

Dalam hal pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap anak Pemerintah Kota berupaya untuk mewujudkan Kecamatan yang Responsif Gender dan Kelurahan Ramah Anak. Pada tahun 2014, terdapat 3 kecamatan yang responsif gender. Kemudian pada tahun 2015 ditingkatkan menjadi 6 kecamatan yang responsif gender dan 15 kelurahan ramah anak. Pada tahun 2016, terdapat 11 kecamatan yang responsif gender dan 30 kelurahan ramah anak. Dan sampai dengan triwulan I 2017, terdapat 11 kecamatan yang responsif gender dan 30 kelurahan ramah anak karena penentuan Kecamatan responsive gender pada triwulan IV dan Kelurahan ramah anak pada triwulan III.

Dari keseluruhan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam bidang pengarusutamaan gender maka Indeks Pembangunan Gender Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II. 85.

**Tabel II. 85**  
**Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,65	93,65	93,66***	N/A

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2017

\*\*\* Angka Sangat Sementara

### 2.1.3.2.3. Pangan

Ketahanan pangan diukur dari ketersediaan pangan utama (beras), dibandingkan dengan tingkat konsumsi pangan utama (beras). Berikut tabel Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017.

**Tabel II. 86**  
**Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No	Uraian	2014	2015	2016*	Triwulan I 2017
1	Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Kg)	443.021.157	404.158.210	479.602.970	151.242.150
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	2.853.661	2.902.736	3.307.300	3.307.300
3	Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita/th)	155,24	139,23	145,01	45,72*

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

Pada Tabel II. 86 di atas menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama di Kota Surabaya cenderung fluktuatif yaitu pada tahun 2014 sebesar 155,24 kg/kapita/th, kemudian pada tahun 2015 turun menjadi 139,23 kg/kapita/th dan pada tahun 2016 naik menjadi 145,01 kg/kapita/th. Hal ini salah satunya disebabkan karena tidak stabilnya produksi beras di daerah penghasil akibat cuaca yang tidak menentu.

Berdasarkan data dari Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya tingkat konsumsi beras masyarakat Kota Surabaya pada tahun 2016 rata-rata sebesar 63,93 kg/kapita/th, sehingga apabila dibandingkan dengan ketersediaan pangan kota Surabaya tahun 2016 masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Selain diukur dari ketersediaan pangan utama, ketahanan pangan diukur juga dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH adalah indikator

untuk mengukur pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan gizi yang cukup dan seimbang. Semakin tinggi skor pola pangan menunjukkan satuan pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.

Berdasarkan Tabel II. 87 dapat disampaikan bahwa Pola pangan harapan masyarakat kota Surabaya pada tahun 2016 sebesar 95,28, hal ini menunjukkan bahwa satuan pangan yang dikonsumsi masyarakat sudah semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.

**Tabel II. 87**  
**Pola Pangan Harapan Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Pola Pangan Harapan	92,93	95	95,28	N/A

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2017

#### 2.1.3.2.4. Pertanahan

Seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Surabaya, maka kebutuhan akan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan masyarakat akan semakin meningkat pula. Penyediaan sarana dan prasarana yang akan dilakukan meliputi penyediaan sarana penunjang kegiatan masyarakat, sistem jaringan jalan dan drainase. Namun ketersediaan lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kebutuhan masyarakat sangatlah terbatas. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut melalui pengadaan lahan untuk merealisasikan rencana pembangunan sehingga dapat terwujud sarana, prasarana dan fasilitas yang terpadu dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya memiliki cukup banyak aset khususnya aset tak bergerak berupa tanah yang tersebar di tiap-tiap wilayah Kota Surabaya yang pemanfaatannya dapat dimaksimalkan dan disesuaikan dengan arahan pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya dan Rencana Rincinya. Pada Tabel II. 89 dapat disimpulkan bahwa hingga tahun 2015, masih 48,84 persen dari keseluruhan aset tanah Pemerintah Kota yang telah bersertifikat, sedangkan sisanya masih belum memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat. Pada tahun 2016, sebanyak 744 aset tanah Pemerintah Kota telah bersertifikat dan pada triwulan I 2017 sebesar 47,86 persen dari keseluruhan aset

tanah Pemerintah Kota telah bersertifikat. Pengamanan administrasi berupa pencatatan / inventarisasi aset, sertifikasi dan pengamanan fisik berupa pemasangan pagar, papan, patok merupakan upaya yang terus menerus dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam meningkatkan pengelolaan tanah aset bagi pembangunan untuk kepentingan umum, namun masih terdapat aset tanah maupun bangunan yang belum diamankan secara administrasi dan fisik.

**Tabel II. 88**  
**Jumlah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Tahun	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Jumlah Aset Pemerintah kota yang telah bersertifikat	580	611	744	750
Total aset pemerintah	1251**	1251**	1567	1567
Presentase Aset Pemerintah yang telah bersertifikat	46,36%	48,84%	47,48%	47,86%

Sumber : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya,

\*\*\*) Total aset 2011-2015 adalah aset tanah dan bangunan yang dikelola oleh DPBT

**Tabel II. 89**  
**Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1.	Jumlah Kasus yang Terdaftar	22	23	29	26
2.	Jumlah Kasus yang Diselesaikan	4	4	6	2
3.	persen Kasus yang Diselesaikan	18,18%	17,39%	20,68%	7,69%

Sumber : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2017

Kasus tanah diatas merupakan kasus terkait kepemilikan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang ditangani/terdaftar di Pengadilan. Kasus yang belum selesai di tahun terdaftar masih terus berlanjut di tahun berikutnya (ditambahkan dalam jumlah kasus terdaftar di tahun berikutnya).

#### 2.1.3.2.5. Lingkungan Hidup

Pertumbuhan kota dan penduduk Kota Surabaya, menyebabkan terjadinya peningkatan pembangunan dan penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi

pemicu terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain tingginya produksi sampah kota serta pencemaran udara dan air, sehingga pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan persampahan dan optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau menjadi upaya yang utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Volume produksi sampah Kota Surabaya didasarkan pada asumsi timbulan sampah yang dihasilkan tiap orang per hari. Volume produksi sampah Kota Surabaya dalam satuan m<sup>3</sup>/hari yaitu pada tahun 2014 sebanyak 9.185,94 m<sup>3</sup>/hari kemudian pada tahun 2015 sebanyak 9.475,21 m<sup>3</sup>/hari dan pada tahun 2016 sebanyak 9.710,61 m<sup>3</sup>/hari, seiring dengan perkembangan kota sebagaimana rekap data pada Tabel II. 90.

**Tabel II. 90**  
**Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Volume Produksi Sampah (m <sup>3</sup> /hari)	9.185,94	9.475,21	9.710,61	10.674,63
2	Jumlah Sampah yang ditangani di TPA (m <sup>3</sup> /hari)	4.853	4.926	5.237,7	5.539,15
3	Persentase Sampah yang ditangani di TPA (persen)	53%	52%	53,94%	51,89%

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, 2017

Seiring dengan peningkatan volume produksi sampah diperlukan adanya peningkatan daya tampung TPS yang dapat melayani pertumbuhan penduduk dan perlunya upaya pengoptimalan fungsi TPS dalam mereduksi volume sampah yang akan diangkut ke TPA melalui pembangunan TPS 3R. Tabel terkait jumlah TPS tahun 2014-triwulan I 2017 dapat dilihat pada Tabel II. 91.

**Tabel II. 91**  
**Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Penduduk	2.853.661	2.943.528	3.307.300	3.316.131
2	Jumlah TPS (unit)	184	185	187	187

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, 2017

Di samping masalah persampahan dalam pengelolaan lingkungan hidup terkait pemenuhan kebutuhan terhadap Ruang Terbuka Hidup (RTH) perlu diperhatikan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang baik secara fisik, ekologis, maupun sosial bagi warga kota maka keberadaan RTH terutama RTH Publik di perkotaan sangat diperlukan. Rendahnya kualitas lingkungan dan penyediaan ruang terbuka publik secara psikologis dapat menyebabkan kondisi mental dan kualitas sosial masyarakat perkotaan makin buruk dan tertekan. Karena kebutuhan kota terhadap RTH tersebut maka penyediaan dan pengelolaan RTH harus dilakukan secara proporsional terhadap pembangunan infrastruktur fisik kota.

Luasan RTH publik Kota Surabaya sampai dengan tahun 2015 mencapai 20,74 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 6.853,46 Ha yang meliputi RTH makam, RTH lapangan, RTH telaga/waduk/boezem, RTH dari penyerahan fasum dan fasos, RTH kawasan lindung, RTH hutan kota, RTH taman dan jalur hijau. Pada tahun 2016 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,73 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.267,72 Ha. Secara rinci luasan RTH publik dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II. 92**  
**Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

NO.	JENIS RTH PUBLIK	2014	2015	2016	Triwulan I 2017*
1	RTH makam	281,55	281,55	283,53	283,53
2	RTH lapangan dan stadion	346,55	346,55	350,34	N/A
3	RTH telaga/waduk/boezem	176,42	176,42	191,86	N/A
4	RTH dari fasum dan fasos permukiman	151,33	160,43	204,61	N/A
5	RTH kawasan lindung dan pesisir timur	4.198,54	4.203,67	4.548,59	4.548,59
6	RTH hutan	41,89	41,89	45,23	45,17
7	RTH taman dan jalur hijau (JH)	1.641,20	1.642,95	1.643,55	1.643,67
Jumlah Luasan RTH Publik total		<b>6.837,48</b>	<b>6.853,46</b>	<b>7.267,72</b>	N/A
Luas Kota Surabaya		<b>33.048</b>	<b>33.048</b>	<b>33.451</b>	N/A
Persentase luas RTH terhadap luas kota (persen)		<b>20,69</b>	<b>20,74</b>	<b>21,73</b>	N/A

Sumber: Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2017

Secara kuantitas, proporsi dan jumlah RTH publik di Kota Surabaya telah memenuhi standar minimum kebutuhan RTH publik suatu kota, namun sebagian besar dari RTH publik tersebut masih belum dimanfaatkan atau berfungsi secara optimal sebagai paru-paru kota. Upaya yang dilakukan dalam penyediaan, pengelolaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara umum diarahkan optimalisasi fungsi, kualitas dan distribusi RTH publik secara proporsional di seluruh Kota Surabaya serta melibatkan partisipasi / peran serta masyarakat dan pihak swasta dengan menjalin kerjasama secara komprehensif dengan berbagai stakeholder.

Jumlah kasus dugaan pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan masyarakat pada tahun 2014 tercatat terdapat 81 kasus pencemaran lingkungan, sedangkan pada tahun 2015 ada sebanyak 78 kasus pencemaran lingkungan yang secara keseluruhan dapat ditangani, dan pada tahun 2016 jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 75 kasus yang secara keseluruhan juga dapat ditangani. Sampai dengan triwulan I 2017, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 21 kasus, dan sebanyak 21 kasus dapat ditangani.

Berikut rekapitulasi data persentase penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya tahun 2014 sampai dengan triwulan I 2017 yang disajikan pada Tabel II. 93.

**Tabel II. 93**  
**Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Permasalahan Lingkungan yang ada	81	78	75	21
2	Jumlah Permasalahan Lingkungan yang Diselesaikan Pemerintah Kota	81	78	75	21
3	Persentase Penegakan Hukum (persen)	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2017



Terjadinya permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya disebabkan oleh berbagai jenis kegiatan usaha yang berbeda-beda baik dalam bentuk industri, rumah sakit, hotel, mall, apartemen, maupun kantor. Dari jenis kegiatan usaha tersebut bisa ditentukan limbah apa yang dihasilkan baik padat, cair, dan udara. Limbah padat yaitu berupa sampah domestik maupun sampah B3. Limbah cair dihasilkan dari kegiatan usaha yang menggunakan air, baik itu domestik maupun air proses. Sedangkan pencemaran udara antara lain berupa gas buang hasil dari pembakaran seperti adanya *boiler*, *genset*, *furnace*, *dryer*, serta suara kebisingan dari kegiatan usaha. Dengan adanya beragam aktivitas dari kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, maka perlu adanya tolak ukur kesadaran masyarakat pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Di antara pelaku usaha ada yang sudah melakukan seluruh pengelolaan lingkungan dengan baik, dan juga ada yang belum melakukan seluruhnya. Oleh karena itu untuk menginventarisir penataan pengelolaan lingkungan dapat dilakukan suatu upaya pengawasan dan pemantauan yang diwujudkan dalam bentuk penilaian ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan antara lain aspek administrasi (aspek ini meliputi perijinan dan rekomendasi dokumen lingkungan) dan aspek teknis (aspek ini meliputi pengendalian pencemaran air bagi yang berpotensi menghasilkan limbah cair, pengendalian pencemaran udara bagi yang menggunakan alat penghasil emisi, pengelolaan TPS Limbah B3). Nilai inilah yang nantinya bisa dijadikan sebagai target pencapaian bersama dan sistem kontrol bersama.

Penyelesaian ketiga permasalahan lingkungan hidup tersebut dapat diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) yang bertujuan memberikan informasi tentang kondisi lingkungan hidup menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, tutupan hutan dan persampahan sebagai indikator.

Pengukuran indikator Kualitas Air Sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Mutu air badan air dipantau melalui uji sampel air badan air Kota Surabaya dengan lokasi pengambilan sampel sebagai berikut.

Tabel II. 94

## Lokasi Pengambilan Sampel Pengujian Air Badan Air Kota Surabaya

No.	Nama Sungai	Kelas Air	Lokasi sampel
1	Kali Surabaya	II	Jl. Wonokromo
2.	Kali mas ( Hulu)	III	Jl. Ngagel
3.	Kali mas ( Tengah)	III	Jembatan Keputran
4.	Kali mas (Hilir)	III	Jembatan Kebon Rojo
5.	Kali Wonokromo ( Hulu )	III	Jl. Jagir
6.	Kali Wonokromo (Hilir)	III	Jembatan Merr C
7.	Kali Jeblokan (Hulu)	III	Jl. Petojo
8.	Kali Jeblokan (Hilir)	III	Jl. Kedung Cowek
9.	Kali Kebonagung	III	Jl. Rungkut Industri
10.	Kali Makmur	III	Jl. Lidah Kulon

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2017

Indeks Kualitas Udara dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep- 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara. Indeks kualitas udara dipantau pada kepadatan transportasi tinggi, kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan area sekolah sehingga dapat mewakili kualitas udara ambien di Kota Surabaya.

Perhitungan indeks tutupan hutan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administratif kota. Karena Kota Surabaya tidak memiliki hutan maka untuk menghitung indeks tutupan lahan digunakan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Oleh karena itu indikator di bidang persampahan mencakup:

1. Pengurangan sampah yang terdiri atas peran serta masyarakat dan pengurangan sampah skala kawasan dan perkotaan
2. Tingkat pelayanan persampahan yang mencakup sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
3. Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Berdasarkan undang-undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi pasal 25 menyatakan bahwa konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat, mencakup seluruh tahap pengelolaan energi. Dalam undang-undang ini juga disebutkan dalam pasal 21 bahwa Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Listrik.

Konversi energi adalah perubahan bentuk energi dari yang satu menjadi bentuk energi lain. Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Pemerintah Kota Surabaya memulai upaya konversi dan konservasi energi dengan cara penerapan solar cell, pemasangan PJU dengan LED, mengkonversi gas metan dari sampah organik menjadi listrik di rumah kompos/TPS dan TPA Benowo dan penggunaan BBG untuk kendaraan roda empat yang terdaftar pada tahun 2015 sebanyak 257 mobil. Selain itu, dibangun juga kincir angin di beberapa titik lokasi. Namun, upaya memulai konversi dan konservasi energi ini belum diterapkan oleh masyarakat Surabaya secara keseluruhan.

**Tabel II. 95**  
**Jumlah Upaya Penerapan Konservasi Energi**

Jenis Lampu	Satuan	Jumlah (titik)			
		2014	2015	2016	Triwulan I 2017
PJU LED	Unit	888	281	1.741	122
PJU Konversi HPS ke LED	Unit	375	328	1.883	0
PJU Solar Cell	Unit	8	0	0	0
<i>Solar cell</i> di Sekolah Adiwiyata	Unit	18	0	0	0
<i>Solar cell</i> di gedung pemerintah	Lokasi	0	0	3	0
Kincir Angin	Unit	0	4	4	0

Jenis Lampu	Satuan	Jumlah (titik)			
		2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Warning Light (APIL) Solar Cell	Unit	40	26	0	0
Traffic Light (APIL) Solar Cell	Unit	2	0	0	0

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang, 2017

#### 2.1.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan bagi penduduk yang wajib ber-KTP adalah kepemilikan KTP. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk PAD secara Nasional, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 KTP non elektronik tidak berlaku lagi dan hanya berlaku KTP elektronik. Data penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 96**  
**Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Tahun	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP
2014	2.160.362	2.026.310
2015	2.218.411	2.066.693
2016	2.267.213	2.057.533
Triwulan I 2017	2.278.471	2.199.392

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2017

Dari data pada Tabel II. 96 di atas menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP yang salah satunya disebabkan karena kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan.

#### 2.1.3.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran. Keberhasilan pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat diukur melalui

indikator jumlah akseptor KB, jumlah cakupan peserta KB aktif, dan jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I.

**2.1.3.2.7.a Jumlah Akseptor KB**

Akseptor KB merupakan akseptor KB baru yaitu pasangan usia subur (PUS) yang pertama kali menggunakan alat kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah mengalami keguguran/melahirkan. Jumlah akseptor KB pada tahun 2014 sebesar 62.205 atau sebesar 12,91 persen dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebesar 481.687 dan jumlah akseptor KB pada tahun 2015 sebesar 53.989 atau sebesar 10,62 persen dari jumlah PUS 508.308 sedangkan jumlah akseptor KB pada tahun 2016 sebesar 40.349 atau sebesar 7,96 persen dari jumlah PUS 504.416. Selengkapnya untuk data pasangan usia subur dan jumlah akseptor KB dapat dilihat pada Tabel II. 97.

**Tabel II. 97**  
**Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	481.687	508.380	506.416	505.368
2	Jumlah Akseptor KB	62.205	53.989	40.349	10.645
3	Rasio Akseptor KB (persen)	12,91	10,62	7,96	2,11

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2017

**2.1.3.2.7.b Jumlah Cakupan Peserta KB Aktif**

Peserta KB aktif merupakan PUS yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Peserta KB aktif mengalami penurunan dari tahun ke tahun yang diakibatkan oleh adanya angka *drop out* peserta KB jenis pil, suntik dan kondom. Upaya yang dilakukan untuk menekan turunnya angka peserta KB aktif adalah revitalisasi Keluarga Berencana melalui pembinaan kelompok KB pria dan pembentukan Kampung KB. Selengkapnya untuk data jumlah pasangan usia subur dan jumlah peserta program KB aktif dapat dilihat pada Tabel II. 98.

**Tabel II. 98**  
**Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	481.687	508.380	506.416	505.368
2	Jumlah Peserta Program KB Aktif	392.206	407.724	415.241	398.075
3	Cakupan Peserta KB Aktif	81,42	80,2	81,99	78,77

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, Tahun 2016

Sehubungan dengan upaya pengendalian penduduk melalui pelayanan KB, maka salah satu targetnya adalah Pasangan Usia Subur yaitu wanita usia 15-49 tahun yang telah menikah. Pada tahun 2014 terdapat 481.687 PUS, tahun 2015 terdapat 508.380 PUS, dan pada tahun 2016 terdapat 506.416 PUS. Sampai dengan triwulan I 2017, terdapat 505.368 PUS dengan jumlah peserta KB aktif sebanyak 398.075

Keberhasilan program Keluarga Berencana, salah satunya diukur dari indikator Total Fertility Rate (TFR) yang merupakan indikator untuk melihat jumlah nak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Fungsi TFR yaitu untuk membantu para perencana program pembangunan dalam meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan Ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Capaian TFR Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II. 99.

**Tabel II. 99**  
**Total Fertility Rate (TFR) Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Total Fertility Rate (TFR)	1,809	1,716	1,78***	N/A

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2017

\*\*\*angka sangat sementara

Catatan : Tahun 2015 merupakan data olahan Susenas

#### 2.1.3.2.7.c Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019.

Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyediaan pelayanan KB gratis bagi masyarakat yang berasal dari Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I). Selain itu secara mikro kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas keluarga dengan kecilnya jumlah anggota suatu keluarga diharapkan dapat meningkatkan gizi, tingkat kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya.

Pada tahun 2014, jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I sebesar 193.550 atau 27,18% dari jumlah keluarga sebesar 712.172. Data keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I dapat dilihat pada Tabel II. 100.

**Tabel II. 100**  
**Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah keluarga	712.172	N/A	N/A	N/A
2	Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	193.550	N/A	N/A	N/A
3	Persentase Keluarga Pra Sejahtera Dan Sejahtera I	27,18	N/A	N/A	N/A

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, 2017

Catatan : Realisasi tahun 2015, 2016, triwulan I 2017 masih dalam proses analisis pendataan keluarga 2015 oleh BKKBN

Dalam hal mewujudkan keluarga yang sejahtera, maka memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, utamanya kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Pada tahun 2014 dan 2015 terdapat 867 BKB, 129 BKR, dan 256 BKL yang aktif melakukan kegiatan. Pada tahun 2016, sebanyak 233 BKB, 31 BKR, dan 31 BKL yang aktif melakukan kegiatan, dan sampai dengan triwulan I 2017, sebanyak 325 BKB baru.

#### **2.1.3.2.7.d Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat. Jenis Lembaga Kemasyarakatan

terdiri dari a) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain; b) Lembaga Adat; c) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan; d) RT/RW; e) Karang Taruna; f) Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Jumlah lembaga LKMK di Kota Surabaya sebanyak 154 lembaga.

Tim Penggerak PKK Kelurahan di Pemerintah Kota Surabaya adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel II. 101 dan Tabel II. 102.



**Tabel II. 101**  
**Kelompok Binaan PKK Menurut Kecamatan Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Kecamatan	2014			2015			2016			Triwulan I 2017		
		Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
1.	Asemrowo	3	593	198	3	593	198	4	502	126	4	502	126
2.	Benowo	4	734	184	4	734	184	5	597	119	5	597	119
3.	Bubutan	5	1.390	232	5	1.390	232	6	1.677	280	6	1.677	280
4.	Bulak	4	513	103	4	513	103	5	545	109	5	545	109
5.	Dukuh Pakis	4	732	183	4	732	183	5	611	122	5	611	122
6.	Gayungan	4	604	121	4	604	121	5	682	136	5	682	136
7.	Genteng	5	1.007	252	5	1.007	252	6	1.125	188	6	1.125	188
8.	Gubeng	6	1.593	266	6	1.593	266	7	1.616	231	7	1.616	231
9.	Gunung Anyar	4	745	149	4	745	149	5	745	149	5	745	149
10.	Jambangan	4	774	129	4	774	129	5	650	130	5	650	130
11.	Karangpilang	4	1.028	171	4	1.028	171	5	777	155	5	777	155
12.	Kenjeran	4	4.970	1.243	4	4.970	1.243	5	1.246	249	5	1.246	249
13.	Krembangan	5	1.168	292	5	1.168	292	6	1.605	268	6	1.605	268
14.	Lakarsantri	6	761	152	6	761	152	7	642	92	7	642	92
15.	Mulyorejo	6	657	131	6	657	131	7	865	124	7	865	124
16.	Pabean Cantian	5	1.201	240	5	1.201	240	6	1.332	222	6	1.332	222
17.	Pakal	4	820	205	4	820	205	5	782	156	5	782	156
18.	Rungkut	6	1.474	211	6	1.474	211	7	1.669	238	7	1.669	238
19.	Sambikerep	4	587	147	4	587	147	5	938	188	5	938	188
20.	Sawahan	6	3.679	736	6	3.679	736	7	2.287	327	7	2.287	327
21.	Semampir	5	3.974	662	5	3.974	662	6	2.323	387	6	2.323	387

No.	Kecamatan	2014			2015			2016			Triwulan I 2017		
		Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
22.	Simokerto	5	1.230	308	5	1.230	308	6	1.393	232	6	1.393	232
23.	Sukolilo	7	1.527	255	7	1.527	255	8	1.531	191	8	1.531	191
24.	Sukomanunggal	6	1.119	280	6	1.119	280	7	1.095	156	7	1.095	156
25.	Tambaksari	8	2.598	325	8	2.598	325	9	2.702	300	9	2.702	300
26.	Tandes	6	1.347	269	6	1.347	269	7	1.323	189	7	1.323	189
27.	Tegalsari	5	1.339	335	5	1.339	335	6	1.100	183	6	1.100	183
28.	Tenggilis	4	1.285	214	4	1.285	214	5	649	130	5	649	130
29.	Wiyung	4	755	189	4	755	189	5	636	127	5	636	127
30.	Wonocolo	5	1.060	177	5	1.060	177	6	956	159	6	956	159
31.	Wonokromo	6	2.856	714	6	2.856	714	7	2.098	300	7	2.098	300
<b>Total</b>		<b>154</b>	<b>44.120</b>	<b>286</b>	<b>154</b>	<b>44.120</b>	<b>286</b>	<b>185</b>	<b>36.699</b>	<b>197</b>	<b>185</b>	<b>36.699</b>	<b>197</b>

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

Kelompok binaan PKK merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Kelurahan meliputi PKK RW, PKK RT dan Dasa Wisma. Besarnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK.

Jumlah kelompok binaan PKK Kota Surabaya sebanyak 44.120 pada tahun 2014 dan 2015, dengan rata-rata 286 yang dibina oleh Tim Penggerak PKK Kelurahan sedangkan tahun 2016 dan triwulan I 2017 sebanyak 36.699, dengan rata-rata 197 yang dibina oleh Tim Penggerak PKK Kelurahan dan Kecamatan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II. 102**  
**Kelompok Binaan PKK Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah PKK	154	154	185	185
2	Jumlah kelompok Binaan	44.120	44.120	36.699	36.699
3	Rata-rata Jumlah kelompok Binaan PKK	286	286	197	197

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan salah satu program penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat berupa inkubasi dan klinik usaha mandiri yang bertujuan membentuk karakteristik seorang pengusaha, Peningkatan strategi untuk mengembangkan karakteristik kewirausahaan, ide-ide bisnis, penelitian pasar sederhana untuk mengetahui pelanggan dan pesaing, rencana pemasaran, Perencanaan bisnis yang dapat membantu dalam memulai usaha, mampu membentuk badan hukum bisnis, menentukan bentuk badan hukum bisnis yang paling sesuai, mampu merekrut SDM, kemampuan membedakan berbagai jenis biaya, menghitung biaya langsung, tidak langsung dan total biaya produk, mempersiapkan rencana penjualan dan biaya, menghitung modal yang dibutuhkan, mengetahui jenis usaha dan sumber modal awal, mengevaluasi rencana

bisnis, memiliki rencana aksi yang menyatakan informasi tambahan yang dibutuhkan dalam bidang usaha makanan, handycraft, produk rumah tangga, menjahit, membatik serta jasa pijat refleksi. Adapun tahapan pelaksanaan dalam inkubasi dan Klinik Usaha Mandiri terdiri dari pelatihan surveyor dan pendamping, kepengusahaan dasar, MOU kepesertaan, analisa kebutuhan dasar, rancangan strategis untuk intervensi peserta, tindak lanjut pelatihan, market test dan networking, refleksi lanjut kemudian *coaching* dan *mentoring* sampai mandiri.

Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan dalam indikator Persentase PMKS terutama keluarga miskin usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi. Data PMKS terutama keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif ditunjukkan pada Tabel II. 103.

**Tabel II. 103**  
**Keluarga Miskin Yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif**  
**di Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Jumlah Keluarga Miskin Yang Telah Melakukan Usaha Ekonomi Produktif	1655	1725	1824	1885

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan dalam indikator Persentase PMKS terutama keluarga miskin usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi. Data PMKS terutama keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif ditunjukkan pada Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan salah satu program penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat berupa inkubasi dan klinik usaha mandiri yang bertujuan membentuk karakteristik seorang pengusaha, Peningkatan strategi untuk mengembangkan karakteristik kewirausahaan, ide-ide bisnis, penelitian pasar sederhana untuk mengetahui pelanggan dan pesaing, rencana pemasaran, Perencanaan bisnis yang dapat membantu dalam memulai

usaha, mampu membentuk badan hukum bisnis, menentukan bentuk badan hukum bisnis yang paling sesuai, mampu merekrut SDM, kemampuan membedakan berbagai jenis biaya, menghitung biaya langsung, tidak langsung dan total biaya produk, mempersiapkan rencana penjualan dan biaya, menghitung modal yang dibutuhkan, mengetahui jenis usaha dan sumber modal awal, mengevaluasi rencana bisnis, memiliki rencana aksi yang menyatakan informasi tambahan yang dibutuhkan dalam bidang usaha makanan, handycraft, produk rumah tangga, menjahit, membatik serta jasa pijat refleksi. Adapun tahapan pelaksanaan dalam inkubasi dan Klinik Usaha Mandiri terdiri dari pelatihan surveyor dan pendamping, kepengusahaan dasar, MOU kepesertaan, analisa kebutuhan dasar, rancangan strategis untuk intervensi peserta, tindak lanjut pelatihan, market test dan networking, refleksi lanjut kemudian *coaching* dan *mentoring* sampai mandiri.

Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan dalam indikator Persentase PMKS terutama keluarga miskin usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi. Data PMKS terutama keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif ditunjukkan pada Tabel II. 103.

Tabel II. 103 diatas kelompok keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif akan tetap diupayakan diberikan pendampingan agar memenuhi kriteria bagi Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pembinaan kearah peningkatan usaha dan omzet bagi kelompok usaha keluarga miskin yang telah berjalan.

Sampai dengan tahun 2016, Program Pemberdayaan Masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat sebanyak 100 persen dari total Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di tingkat dasar yang telah dibentuk, baik yang bersifat aktif maupun pasif dalam pengembangan hasil produknya. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II. 104 berikut.

**Tabel II. 104**  
**Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Total Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	431	95	431	482
2	Program Pemberdayaan Masyarakat yang Dikembangkan dan Dipelihara Masyarakat	431	95	431	482
3	% Program Pemberdayaan Masyarakat	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

### 2.1.3.2.8. Perhubungan

Kota Surabaya sampai dengan saat ini memiliki 4 terminal yang melayani angkutan umum dengan jenis bis dan angkutan kota (angkot) yang terdiri dari Terminal Purabaya, Terminal Tambak Oso Wilangun, Terminal Joyoboyo dan Terminal Bratang dengan fluktuasi jumlah angkutan darat di Kota Surabaya pada tahun 2014 sejumlah 10.256 kendaraan, sejumlah 10.369 kendaraan pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 sejumlah 10.202 kendaraan seperti yang disajikan pada Tabel II. 105. Sampai dengan triwulan 1 TA 2017, jumlah angkutan darat yang beroperasi di Kota Surabaya berjumlah 9.777 kendaraan. Untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan restrukturisasi angkutan kota (mikrolet dan bus kota) untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di bidang transportasi.

**Tabel II. 105**  
**Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2015	Triwulan I 2017
1	Jumlah Terminal Bis	4	4	4	4
2	Jumlah Angkutan Darat	10.256	10.369	10.202	9.777

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2017

Dalam merealisasikan restrukturisasi angkutan kota tersebut, Pemerintah Kota Surabaya masih menjamin pelayanan transportasi (angkutan umum dalam trayek dan tidak dalam trayek) eksisting. Salah satu contohnya adalah pemberian ijin trayek yang dikeluarkan kepada pemilik angkutan umum seperti yang disajikan pada

Tabel II. 106. Dalam pemberian ijin trayek tersebut, angkutan umum harus memenuhi syarat laik jalan dan pelayanan kepada masyarakat.

**Tabel II. 106**  
**Rasio Ijin Trayek Kota Surabaya, Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Penduduk	2.853.661	2.943.528	3.307.300	3.316.131
2	Jumlah Ijin Trayek yang Dikeluarkan	6.870	7.370	7.017	1.095
3	Rasio Ijin Trayek	0,0024	0,0025	0,0023	0,00033

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2017

Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dari tahun 2014 sampai tahun 2015 mengalami kenaikan. Pada tahun 2014, jumlah ijin trayek yang dikeluarkan sebanyak 6.870 ijin dengan jumlah penduduk sebanyak 2.853.661 jiwa sehingga rasio ijin trayek sebesar 0,0024. Pada tahun 2015 ijin yang dikeluarkan sebanyak 7.370 dengan jumlah penduduk sebanyak 2.943.528 jiwa sehingga rasio ijin trayek sebesar 0,0025. Sampai dengan tahun 2016, ijin trayek yang dikeluarkan sebanyak 7.017 ijin dengan jumlah penduduk sebanyak 3.307.300 jiwa sehingga rasio ijin trayek sebesar 0,0023. Sementara sampai dengan triwulan 1 tahun 2017, ijin trayek yang dikeluarkan sebanyak 1.095 ijin dengan jumlah penduduk sebanyak 3.316.131 jiwa sehingga rasio ijin trayek sebesar 0,00033.

Untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum (baik penumpang dan barang) di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya melalui pemeriksaan kendaraan melalui Uji KIR. yang berada di UPTD PKB Tandes dan Wiyung, khususnya bagi angkutan penumpang dan angkutan barang. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala selama tiap hari kerja. Jumlah kendaraan yang lulus uji pada tahun 2015 sebanyak 103.902 kendaraan, dan sampai dengan tahun 2016 sebanyak 123.830 kendaraan. Sementara sampai dengan triwulan 1 tahun 2017, jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebanyak 34.217. Rekapitulasi jumlah kendaraan yang lulus uji dapat dilihat dalam Tabel II. 107.

**Tabel II. 107**  
**Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum*	33.071	33.971	37.575	11.096
2	Jumlah kendaraan wajib uji KIR	100.091	102.052	97.377	77.714
3	Jumlah kendaraan yang diuji KIR	109.191	141.742	133.463	37.200
4	Jumlah kendaraan lulus uji KIR	104.069	103.902	123.830	34.217

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2017

Demi menjaga kondisi lalu lintas di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan setiap tahunnya, yang salah satunya berupa pemasangan rambu-rambu baik rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Jumlah pemasangan rambu-rambu di Kota Surabaya selalu meningkat dari tahun ke tahun, di mana sampai tahun 2015 telah mencapai 11.283 unit, sampai dengan tahun 2016 mencapai 12.775 unit, dan sampai dengan triwulan I 2017 berjumlah 12.935 unit dimana Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan melaksanakan penambahan pemasangan rambu baru selama triwulan pertama sebanyak 160 unit (sampai dengan bulan Februari 2017), dapat dilihat pada Tabel II. 108. Dengan adanya penambahan jumlah rambu tersebut, diharapkan mampu mengubah perilaku berkendara para pengguna kendaraan serta menjadi lebih taat dan tertib terhadap peraturan.

**Tabel II. 108**  
**Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	9.910	11.283	12.775	12.935

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2017

#### **2.1.3.2.9. Komunikasi dan Informatika**

Guna mendukung jangkauan jaringan komunikasi, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi telah melakukan pemeliharaan terhadap



sejumlah tower yang tersebar di berbagai lokasi dan alat komunikasi (HT) pada tiap SKPD. Sampai dengan akhir tahun 2016, tower yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah sebanyak 88 Unit dengan rincian ketinggian 6 meter sebanyak 1 unit, 12 meter sebanyak 19 unit, 16 meter sebanyak 10 unit, 20 meter sebanyak 23 unit, 24 meter sebanyak 7 unit, 30 meter sebanyak 13 unit, 40 meter sebanyak 14 unit, dan 85 meter sebanyak 1 unit; sedangkan jumlah alat komunikasi (HT) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah 802 unit. Selain menggunakan menara dan alat komunikasi (HT), untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan infrastruktur TIK khususnya jangkauan jaringan, Pemerintah Kota Surabaya juga menggunakan sejumlah infrastruktur lain maupun bekerjasama dengan pihak ketiga.

**Tabel II. 109**  
**Jaringan Komunikasi Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Menara (Tower) (unit)	91	90	88	0
Alat Komunikasi (HT)	670	688	802	233

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2017

Pemerintah Kota Surabaya memiliki situs resmi yang dapat diakses pada alamat <http://www.surabaya.go.id>. Selain halaman utama, juga terdapat 26 sub domain dalam website tersebut yang dikelola oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Karena media komunikasi bukan hanya melalui internet, Pemerintah Kota juga melakukan sejumlah upaya untuk mengelola dan membangun komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan tatap muka secara langsung seperti dialog melalui media massa maupun beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat.

**Tabel II. 110**  
**Website Milik Pemerintah Kota Surabaya, Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Website Milik Pemerintah Kota	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2017

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi berusaha meningkatkan pelayanan publiknya dengan mendayagunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Salah satu bentuk pendayagunaan ini adalah dengan menggunakan aplikasi sebagai sarana untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kota telah membangun 30 sistem informasi pelayanan perijinan dan 10 sistem informasi pelayanan non perijinan, dan pada triwulan I 2017 jumlahnya belum mengalami penambahan karena masih dalam proses membangun sistem informasi. Karena masih banyak terdapat layanan perizinan dan non perizinan yang belum berbasis TIK maka Pemerintah Kota terus mengupayakan untuk membangun aplikasi guna meningkatkan jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis TIK seperti dapat dilihat pada Tabel II. 111.

**Tabel II. 111**  
**Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Online Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan	5	5	6	0
2	Sistem Informasi Pelayanan Non Perijinan	0	0	7	0

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2017

#### **2.1.3.2.10. Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil**

Pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) serta Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian. Daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif di Kota Surabaya adalah daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi. UMK menjadi satu sektor yang memiliki peran strategis terhadap perekonomian Kota Surabaya, yang antara lain ditunjukkan dengan penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB Kota Surabaya melalui peningkatan produktivitas usaha.

##### **2.1.3.2.10.a Koperasi**

Peningkatan jumlah anggota koperasi di Kota Surabaya disertai dengan peningkatan pertumbuhan jumlah anggota koperasi, hal ini menunjukkan bahwa

pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dikatakan berhasil. Pada tahun 2014 anggota koperasi berjumlah 252.345 orang, pada tahun 2015 jumlah anggota koperasi meningkat menjadi 252.645 orang sedangkan pada tahun 2016 jumlah anggota koperasi adalah sebanyak 261.799 orang. Sampai dengan triwulan 1 tahun 2017 jumlah anggota koperasi adalah sebanyak 261.789 orang. Secara rinci pertumbuhan anggota koperasi dapat dilihat pada Tabel II. 112.

**Tabel II. 112**  
**Jumlah Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Jumlah anggota koperasi	252.345	252.645	261.799	261.789

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2017

Pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dikatakan cukup berhasil ditunjukkan dengan peningkatan jumlah koperasi aktif. Pada tahun 2014 jumlah koperassi yang ada di Kora Surabaya sebanyak 1.637, dari jumlah koperasi tersebut sebanyak 1.357 koperasi merupakan koperasi aktif. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah koperasi yang ada di Kota Surabaya adalah sebanyak 1.669 koperasi dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 1.403 koperasi. Pada tahun 2016 jumlah koperasi di Kota Surabaya adalah sebanyak 1.726 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.461 koperasi. Sampai dengan triwulan 1 tahun 2017 jumlah koperasi di kota Surabaya sebanyak 1.741 koperasi, dari jumlah tersebut sebanyak 1.476 koperasi merupakan koperasi aktif. Secara rinci presentase koperasi aktif dapat dilihat pada Tabel II. 113.

**Tabel II. 113**  
**Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah koperasi	1.637	1.669	1.726	1.741
2	Jumlah koperasi aktif	1.357	1.403	1.461	1.476
3	persen koperasi aktif	82,9	84,06	84,65	84,78

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2017

Jumlah koperasi aktif di surabaya mengalami peningkatan namun jika dibandingkan dengan total volume usaha maka rasio volume usaha koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi pada tahun 2016 mengalami penurunan dibanding tahun 2015, untuk itu perlu dilakukan upaya meningkatkan produktivitas

koperasi. Pada tahun 2014 volume usaha koperasi sebesar 1.597 milyar dari 1.357 koperasi, pada tahun 2015 volume usaha koperasi sebesar 1.605 milyar dari 1.403 koperasi dan pada tahun 2016 jumlah volume usaha koperasi adalah sebesar 1.657 milyar dari 1.463 koperasi. Sampai dengan triwulan 1 tahun 2017 volume usaha koperasi aktif sebesar 456 milyar rupiah dari 1.476 koperasi. Secara rinci rasio volume usaha koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi dapat dilihat pada Tabel II.113.

**Tabel II. 114**  
**Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi Aktif**  
**di Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Jumlah Koperasi Aktif	1.357	1.403	1.463	1.476
Volume Usaha Koperasi Aktif (Rp. Milyar)	1.597	1.605	1.657	456
Rasio	1,18	1,14	1,13	0,31

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2017

#### **2.1.3.2.10.b Usaha Mikro dan Kecil**

Dasar perekonomian juga ditunjukkan dengan peningkatan jumlah UMKM. Pada tahun 2014, jumlah UMKM di Kota Surabaya tercatat sebanyak 28.759 UMKM yang terdiri dari 18.921 usaha mikro, 7.116 usaha kecil dan 2.722 usaha menengah. Sedangkan pada tahun 2015, jumlah UMKM di Kota Surabaya tercatat sebanyak 29.507 UMKM yang terdiri dari 19.650 Usaha Mikro, 7.150 Usaha Kecil dan 2.707 Usaha Menengah. Pada tahun 2016 tercatat 26.854 UMKM di mana sebanyak 22.924 merupakan Usaha Mikro dan Kecil. Sampai triwulan 1 tahun 2017, jumlag UMKM di Kota Surabaya mencapai 11.707 unit usaha dimana 92,90% atau 10.876 unit usaha merupakan usaha mikro dan kecil. Jumlah usaha kecil dan menengah yang tercatat merupakan usaha kecil dan menengah yang telah memiliki ijin dan untuk usaha mikro yang tercatat merupakan jumlah usaha mikro baik yang memiliki ijin maupun yang masih belum memiliki ijin. Secara rinci rekap data presentase usaha mikro dan kecil Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II. 115.

**Tabel II. 115**  
**Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah seluruh UMKM	28.759	29.507	26.854	11.707
2	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	26.037	26.800	22.924	10.876
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	90,54	90,83	85,37	92,90

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2017

#### 2.1.3.2.11. Penanaman Modal

Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat di lihat melalui *multiplier effect* yang di timbulkannya. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi.

##### 2.1.3.2.11.a PMA dan PMDN

Penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (*direct investment*) maupun penanaman modal portofolio surat berharga (*portofolio investment*). Berikut ini tabel realisasi penanaman modal langsung PMDN dan PMA di Kota Surabaya. Jumlah proyek PMDN dan PMA kota Surabaya selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II. 116 di bawah ini.

**Tabel II. 116**  
**Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Proyek PMDN	9	8	15	-
2	Jumlah Proyek PMA	24	12	43	1
3	Total	33	20	58	1

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2017

Penanaman Modal Kota Surabaya menunjukkan bahwa nilai investasi di Kota Surabaya pada tahun 2014 sebanyak 33 investasi. Jumlah investasi tersebut menurun pada tahun 2015 menjadi 20 investasi dan pada tahun 2016 tercatat sejumlah 58 investasi. Sampai triwulan I tahun 2017 realisasi investasi di Kota Surabaya sejumlah 1 investasi PMA dengan nilai investasi sebesar 1,2 juta USD.

Menurut jenisnya, realisasi investasi lebih banyak berasal dari investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dibanding dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada tahun 2014 realisasi investasi dari PMA sebanyak 24 dan PMDN sebanyak 9 investasi. Sementara pada tahun 2015 realisasi investasi PMA sebanyak 12 investasi dan PMDN sebanyak 6 investasi dan pada tahun 2016 realisasi PMA sebanyak 43 investasi dan PMDN sebanyak 15 investasi. Kinerja investasi yang relatif baik tidak terlepas prospek perekonomian domestik yang dipersepsikan masih cukup baik disertai iklim usaha yang kondusif.

Laporan realisasi Penanaman Modal di Surabaya merupakan potret atas aktivitas penanaman modal berdasarkan persetujuan perijinan baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II. 117 di bawah ini.

**Tabel II. 117**  
**Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Persetujuan				
1.1	Jumlah Proyek	76	35	109	40
1.2	Nilai Investasi (Rp Milyar)	1.653,75	3.648,67	2.371,45	1.119,32
	(USD Juta)	184,17	38,53	351,62	50,00
2	Realisasi				
2.1	Jumlah Proyek	33	20	58	1
2.2	Nilai Investasi (Rp Milyar)	639,63	1.026,53	3.797,87	0
	(USD Juta)	45,29	14,66	209,65	1,20

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2017

Adanya investasi PMA dan PMDN di Kota Surabaya menimbulkan dampak positif terhadap tingkat tenaga kerja di Surabaya. Peningkatan nilai dan proyek investasi PMA dan PMDN berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru yang berkaitan dengan daya serap tenaga kerja sebagai dampak investasi langsung, dimana rekap tabel dapat dilihat pada Tabel II. 118 di bawah ini.

**Tabel II. 118**

**Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah PMA/PMDN	33	20	58	1
2	Jumlah Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada Perusahaan PMA/PMDN	2.171	1.203	6.897	22
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	94,39	60,15	118,91	22

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2017

Sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, pada sisi penawaran tingginya investasi akan meningkatkan kapasitas barang dan jasa yang dihasilkan sementara pada sisi permintaan peran investasi juga akan menciptakan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal, realisasi investasi baik dari penanaman PMA dan PMDN pada tahun 2015 sebanyak 20 proyek. Dari jumlah proyek tersebut tersebut jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 1.203 orang maka nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya pada tahun 2015 terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 60,15, dan pada tahun 2016 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 6.897 orang maka nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 118,91.

**2.1.3.2.12. Kepemudaan dan Olah Raga**

Pencapaian prestasi olahraga tidak terlepas dari fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi pelaku olahraga. Prasarana olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya bersifat terbuka (*outdoor*) maupun tertutup (*indoor*) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya diantaranya adalah Lapangan Atletik THOR, Lapangan Softball dan Hockey Dharmawangsa, Gelora 10 Nopember, Lintasan Drag race Bung Tomo dan Gelora Bung Tomo. Sampai dengan tahun 2014 Pemerintah Kota Surabaya telah membangun sebanyak 272 lapangan olahraga, meningkat menjadi 346 lapangan olahraga pada tahun 2015 dan menjadi sejumlah 428 lapangan olahraga pada tahun 2016. Sampai dengan triwulan I tahun 2017, total lapangan olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya adalah sejumlah 428 lapangan yang berada di atas lahan fasilitas umum perumahan dan permukiman

maupun di tanah aset BTKD di wilayah kota Surabaya. Untuk rincian dapat dilihat pada Tabel II. 119.

**Tabel II. 119**  
**Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah lapangan olahraga	272	346	428	428
2	Jumlah penduduk	2.853.661	2.943.528	3.307.300	3.316.131
3	Rasio lapangan olahraga	1 : 10.491	1 : 8.507	1 : 7.727	1 : 7.747

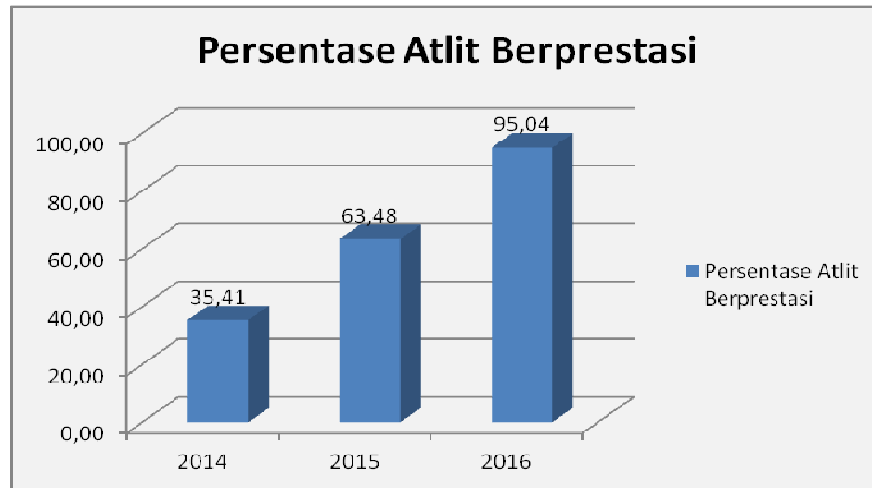
Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil dan Dinas Kepemudaan & Olahraga, 2017

Namun sebaran prasarana olahraga di Kota Surabaya memang belum merata. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya lahan kosong di beberapa wilayah kota. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Surabaya tetap berupaya untuk pemeratakan sebaran prasarana olahraga di seluruh kelurahan di wilayah Kota Surabaya dengan berbagai cara diantaranya yaitu dengan pengadaan lahan.

Dengan penyediaan fasilitas tersebut diharapkan masyarakat Kota Surabaya khususnya generasi muda, dapat memanfaatkan waktu luang untuk diarahkan untuk kegiatan yang positif. Hal ini juga akan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat Kota Surabaya secara umum dan menumbuhkan bibit-bibit atlit olahraga secara khusus.

Pada tahun 2014 terdapat 1652 orang atlit yang dibina dan sejumlah 585 orang diantaranya berhasil meraih prestasi olahraga di tingkat regional, nasional maupun internasional. Selanjutnya pada tahun 2015 terdapat 1350 orang atlit yang dibina dan sejumlah 857 orang diantaranya berhasil meraih prestasi olahraga di tingkat regional, nasional maupun internasional. Secara keseluruhan persentase atlit olahraga yang berprestasi dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 35persen menjadi 63 persen. Pada tahun 2016, nilai persentasi atlit yang berprestasi sangat memuaskan yaitu mencapai 95 persen, dari 847 orang atlit olahraga yang dibina sejumlah 805 orang diantaranya meraih prestasi olahraga ditingkat regional, nasional maupun internasional.





**Gambar II. 9**

**Persentase Atlet Berprestasi**

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2017

Kepemudaan dan Olahraga juga erat kaitannya dengan pemuda-pemuda yang dapat menjadi kader. Kota Surabaya juga telah mengadakan pembinaan untuk kader anti kenakalan remaja. Pada tahun 2015 total sebanyak 180 kader anti kenakalan remaja telah terbentuk di Kota Surabaya.

Dalam bidang kepemudaan, Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki program dan kegiatan khusus terkait pembinaan kepemudaan diantaranya adalah pembentukan pemuda kader anti kenakalan remaja (anti narkoba dan peduli HIV AIDS). Pada tahun 2015 terdapat sejumlah 180 orang pemuda yang dibentuk menjadi kader anti kenakalan remaja. Selanjutnya dalam tahun 2016 terdapat sejumlah 389 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya.

**2.1.3.2.13. Statistik**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar untuk Statistik sebelumnya dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan melaksanakan kegiatan penyusunan dan analisa data dan informasi perencanaan pembangunan. Pemerintah Kota Surabaya telah menyusun buku PDRB Kota Surabaya dan Informasi Data Pokok Surabaya sebagai bagian penyelenggaraan statistik, serta disusunnya buku Surabaya Dalam Angka.

**Tabel II. 120**  
**Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Kota Surabaya,**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Dokumen	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1.	PDRB Kota Surabaya	Ada	Ada	Tidak ada	N/A
2.	PDRB Kecamatan	Ada	Ada	Tidak ada	N/A
3.	Informasi Data Pokok Surabaya	Ada	Ada	Tidak Ada	N/A
3.	Surabaya Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	N/A

Sumber : Bappeko Surabaya, 2017

Selain itu pelaksanaan sektoral juga telah diselenggarakan di SKPD masing-masing, dalam rangka mendukung dan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan sektoral di masing-masing SKPD, seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat & Keluarga Berencana terkait pengumpulan dan pengolahan data kemiskinan, Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah melalui PD Pasar Surya terkait harga pasar, dsb.

Dengan memperhatikan urgensi data dan informasi pembangunan dalam perencanaan seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota perlu mengupayakan kualitas data dan informasi pembangunan daerah yang ditunjukkan melalui penyediaan data dan informasi yang valid untuk mendukung pengukuran indikator kinerja seperti yang tertuang pada PRJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

#### **2.1.3.2.14. Kebudayaan**

Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka mendukung bidang kepariwisataan banyak mengadakan kegiatan festival seni dan budaya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kota maupun pihak swasta.

##### **2.1.3.2.14.a Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**

Banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya bertujuan untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan serta memberi kesempatan pada seniman – seniman kota Surabaya untuk menampilkan karyanya. Disisi lain, banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi kelompok seni di Surabaya, Oleh karena itu diperlukan kerja sama dengan stakeholder untuk meningkatkan jumlah penyelenggaraan seni dan

budaya. Perkembangan penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat dilihat pada Tabel II. 121 di bawah ini.

**Tabel II. 121**  
**Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Tahun	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	449	613	887	103

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2017

Pada tahun 2014 sebanyak 449 festival seni dan budaya yang diselenggarakan di Kota Surabaya, sedangkan tahun 2015 sebanyak 613 festival seni dan budaya. Untuk tahun 2016 festival seni dan budaya yang dilaksanakan di kota Surabaya sebanyak 887 festival, sedangkan sampai dengan triwulan 1 2017 sebanyak 103 festival seni dan budaya yang diselenggarakan. Banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya bertujuan untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan serta memberi kesempatan pada seniman – seniman kota Surabaya untuk menampilkan karyanya.

**2.1.3.2.14.b Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya**

Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung perkembangan kesenian menyediakan sarana berupa gedung / tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan kesenian / berekspresi di UPTD Tugu Pahlawan, THR dan Balai Pemuda serta UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel.

**2.1.3.2.14.c Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya**

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada di kota Surabaya, pemerintah kota melakukan upaya perlindungan dan pelestarian dalam bentuk pemberian penetapan terhadap benda, situs dan kawasan sebagai cagar budaya dan pengawasan agar jika ada proses renovasi tidak sampai merubah bentuk aslinya. Jumlah benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya sampai dengan tahun 2014 sebanyak 257, sedangkan pada tahun 2015 terdapat 273 benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pada tahun 2016 dan sampai dengan triwulan 1 2017 tidak ada penambahan cagar budaya yang ditetapkan

karena masih dalam proses evaluasi terhadap bangunan / benda yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah cagar budaya tersebut masih memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya.

Rekap data jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada di bawah ini.

**Tabel II. 122**  
**Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Total Benda, Situs dan Kawasan yang Dimiliki Daerah	257	273	273	273
2	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	257	273	273	273
3	persen pelestarian	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2017

#### 2.1.3.2.15. Perpustakaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2009, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya taman bacaan dan sudut baca.

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya dalam mengembangkan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan dan TBM, menyelenggarakan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Kecamatan, Kelurahan, RW, Rumah Sakit, Puskesmas, Taman, Dinas, Rusun, Liponsos dan Terminal serta menyediakan layanan TBM yang tersebar secara merata, menyelenggarakan perpustakaan keliling yang menggunakan sarana angkutan yang melayani di sekolah dan taman kota, menyediakan Sumber Daya Manusia dan biaya operasional pada layanan perpustakaan dan TBM, melaksanakan promosi budaya gemar membaca dengan mengadakan pameran buku, bedah buku, lomba-lomba pemasyarakatan perpustakaan, seminar, lokakarya, penyebarluasan informasi melalui brosur/leaflet, spanduk, banner, billboard, media cetak dan elektronik,

melaksanakan kerjasama dan jaringan antar perpustakaan, melaksanakan bimbingan teknis kepada tenaga pengelola perpustakaan, melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Taman Bacaan Masyarakat dan Perpustakaan bukan hanya di Pemerintah Kota, namun ada perpustakaan milik non pemerintah Kota yang diselenggarakan masyarakat dan Perguruan Tinggi. Data yang tercatat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada Tabel II. 123.

**Tabel II. 123**  
**Jumlah Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Perpustakaan Milik Pemda	2	2	2	2
2	Perpustakaan Milik Non Pemda	59	59	61	61
3	Total	61	61	63	63

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2017

Untuk menambah kunjungan di Perpustakaan diperlukan buku yang variatif dan koleksi baru. Jumlah koleksi buku sampai dengan tahun 2016 sebanyak 133.281 judul buku dan jumlah koleksi buku bertambah 64.159 buku menjadi 844.140 buku. Sampai dengan Triwulan I 2017 belum ada penambahan jumlah buku dikarenakan masih belum proses pengadaan buku. Data jumlah judul buku sebagaimana Tabel II. 124.

**Tabel II. 124**  
**Jumlah Koleksi Buku Layanan Baca Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah judul buku	119.256	126.482	133.281	133.281
2	Jumlah buku	714.160	780.970	844.140	844.140

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2017

Jumlah kunjungan perpustakaan milik Pemerintah Kota Surabaya ditampilkan pada Tabel II. 125. Pada tahun 2016, indikator yang digunakan sebagai pengukur kinerja adalah rata-rata kunjungan layanan baca per bulan, yaitu sebanyak 396.869 orang dari total 4.762.438 orang. Sampai dengan Triwulan I jumlah kunjungan di titik layanan Perpustakaan sebanyak 1.203.614 kunjungan.

Pengunjung perpustakaan ini antara lain merupakan pengunjung perpustakaan daerah, taman bacaan masyarakat, maupun perpustakaan keliling.

**Tabel II. 125**  
**Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Kunjungan layanan baca per bulan (orang)	3.243.366	4.711.419	4.762.438	1.203.614

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2017

Pembangunan dan pengembangan perpustakaan yang dilakukan pada periode sebelumnya ditekankan pada peningkatan jumlah kunjungan. Selanjutnya perlu diukur peningkatkan kemampuan literasi terutama pada siswa sekolah, yang diukur melalui tes *reading text leveling*. Tes *reading text leveling* bertujuan untuk mengukur kemampuan membaca siswa sesuai dengan level standar usia siswa. Upaya peningkatan minat baca dilakukan dengan meningkatkan jumlah even literasi yang diselenggarakan. Kegiatan literasi dilaksanakan dengan kegiatan Wisata buku, Bedah buku, Literasi Ceria, Pertura, Dongeng keliling bersama Komunitas Yout Peace Festival, Dongeng Keliling bersama Pusling dan Proyek Literasi Pembuatan Antologi Puisi.

#### **2.1.3.2.16. Kearsipan**

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta pendampingan dan monitoring penerapan penggunaan sistem pola baru yang dikembangkan dengan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip sistem pola baru, menggunakan kartu kendali dengan sistem rubrik (berdasarkan permasalahan), sistem seri (berdasarkan kesamaan jenis), penataan arsipnya telah berdasarkan kode klasifikasi, memiliki sarana dan prasarana antara lain meliputi: almari katalog, filling cabinet, map gantung, lembar disposisi, lembar pengantar, daftar pengendali, kartu kendali masuk dan keluar.

Data Perangkat Daerah (PD) dan pengelola arsip sistem pola baru selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II. 126.

**Tabel II. 126**  
**Pengelolaan Arsip Secara Baku Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2016	Triwulan I 2017
1.	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip pola baru	24	30
2.	Jumlah Perangkat Daerah dan unit kerja	226	226
3.	Persentase Pengelolaan Arsip pola baru (%)	10,61 %	13,27 %

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2017

Pada tahun 2016 Perangkat Daerah (PD) yang telah menerapkan pengelolaan kearsipan pola baru, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel II. 126, dimana yang menjadi pengukuran kinerja adalah persentase Perangkat Daerah dan unit kerja yang tertib kearsipan, yakni 24 dari 226 Perangkat Daerah (10,61%). Sampai dengan Triwulan I Tahun 2017 jumlah PD yang tertib kearsipan menjadi 30 PD; dan persentase Perangkat Daerah dan unit kerja yang diakuisisi dokumen arsip, yakni 14 dari 72 SKPD (19%). Pada Triwulan I Tahun 2017 Jumlah Perangkat Daerah yang tertib kearsipan menjadi 30 Perangkat Daerah dan persentase Perangkat Daerah yang diakuisisi dokumen arsip, yakni 14 dari 72 Perangkat Daerah (19%). Pada Triwulan I Tahun 2017 jumlah Perangkat Daerah yang diakuisisi bertambah 3 Perangkat Daerah, menjadi 17 Perangkat Daerah (23.6%). Perangkat Daerah yang tertib kearsipan adalah yang tetap konsisten mengelola kearsipan sesuai ketentuan yaitu telah memiliki SDM tenaga pengelola arsip, telah menggunakan program/aplikasi, telah tertib penataan pemberkasan arsip dan pembuatan daftar arsip, dan telah memiliki sarana prasarana kearsipan Arsip Dinamis Aktif dan Arsip Dinamis Inaktif. Realisasi indikator tersebut ditampilkan pada Tabel II. 127.

**Tabel II. 127**  
**Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang Tertib Tata Kearsipan dan yang Diakuisisi Dokumen Arsip Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2015	2016	Triwulan I 2017
1.	Jumlah Perangkat Daerah dan unit kerja yang tertib sistem tata kearsipan	N/A	24	30
2.	Jumlah Perangkat Daerah dan unit kerja yang diakuisisi dokumen arsip	8	6	3
3.	Jumlah Perangkat Daerah dan unit kerja	N/A	226	226
4.	Persentase Perangkat Daerah dan unit kerja yang tertib sistem tata kearsipan (akumulasi)	N/A	10,70%	13.27%
5.	Persentase Perangkat Daerah dan unit kerja yang diakuisisi dokumen arsip (akumulasi)	N/A	19%	23,61%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2017

Untuk pengelolaan arsip sesuai dengan pola baru diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompeten pada kearsipan atau yang pernah dilaksanakan. Tabel II. 128 tentang peningkatan SDM pengelola kearsipan Kota Surabaya selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2014, 2015 dan 2016, kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan dilaksanakan melalui pendampingan dan evaluasi serta lomba teknis sistem tata kearsipan, sedangkan pada tahun 2017 peningkatan SDM pengelola kearsipan juga dilaksanakan melalui pendampingan yang sekaligus evaluasi serta lomba teknis sistem tata kearsipan. Sampai dengan Triwulan I Peningkatan SDM kearsipan dilaksanakan melalui pendampingan di 6 Perangkat Daerah.

**Tabel II. 128**  
**Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	3	3	2	1

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2017



### 2.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan, yaitu urusan:

#### 2.1.3.3.1. Kelautan dan Perikanan

Perkembangan kelautan dan perikanan di Surabaya dapat dilihat pada Tabel II. 129 dan Tabel II. 130.

**Tabel II. 129**  
**Kontribusi Sub Kategori Perikanan terhadap PDRB Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Total Nilai Tambah PDRB	365.354.831,12	406.196.760,34	452.345.242,07	N/A
Total Nilai Tambah Sub Kategori Perikanan	589.117,25	655.562,00	721.552,58	N/A
Kontribusi Sub Kategori Perikanan terhadap PDRB	0,16%	0,16%	0,16%	N/A

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2016

Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya pada tahun 2014, sebesar 0,16% atau sebesar Rp 589.117,3 juta rupiah dari total PDRB sebesar Rp 365.354.831,12 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2015, kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya sebesar 0,16% atau sebesar Rp 655.562,00 juta rupiah dari total PDRB sebesar Rp 406.196.760,3 juta rupiah. Di tahun 2016, kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya sebesar 0,16% atau sebesar Rp721.552,58 juta rupiah dari total PDRB sebesar Rp452.345.242,07 juta rupiah.

Nilai tambah sub kategori kelautan dan perikanan relatif dapat mengikuti perkembangan PDRB Kota dengan kontribusi yang relatif stabil yaitu pada kisaran 0,16%. Berdasarkan data produksi perikanan pada Tabel II. 130 dapat disajikan bahwa jumlah produksi perikanan sampai dengan 2015 mengalami penurunan, oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan produktivitas dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, penyuluhan dan pendampingan yang intensif sehingga pada tahun 2016 jumlah produksi perikanan dapat meningkat sebesar 26,01% dari tahun

2015. Data terkait dengan jumlah produksi usaha perikanan laut, perikanan tambak, perairan umum, kolam, dan jaring apung dapat disajikan pada Tabel II. 130.

**Tabel II. 130**  
**Jumlah Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No	Jenis Usaha	Jumlah Produksi (ton)			
		2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1.	Perikanan Laut	7.292,45	6.840,06	10.578,30	2.539,75
2.	Perikanan Tambak	6.530,32	6.785,15	6.915,03	1.210,35
3.	Perairan umum	277,02	88,49	93,38	21,65
4.	Kolam	1.025,88	1.101,27	1.116,48	98,98
5.	Jaring Apung	140,41	139,18	144,82	15,28
<b>Jumlah</b>		<b>15.266,08</b>	<b>14.954,15</b>	<b>18.849,44</b>	<b>3.886,01</b>

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2017

Pada Tabel II. 130 terlihat bahwa Produksi perikanan pada tahun 2016 yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah pada perikanan laut yaitu pada tahun 2015 sebesar 6.840,06 ton menjadi sebesar 10.578,30 ton pada tahun 2016. Hal ini disebabkan karena disamping anomali cuaca pada tahun 2016 tidak begitu ekstrim sebagaimana tahun sebelumnya juga karena mulai meningkatnya kemampuan nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan serta dalam mengantisipasi cuaca buruk.

Untuk tingkat konsumsi ikan kota Surabaya pada tahun 2016 sebesar 40,33 kg/kapita/th atau tercapai sebesar 91,91% dari yang ditargetkan nasional yaitu 43,88 kg/kapita/th. Upaya untuk memasyarakatkan gemar makan ikan terus dilakukan oleh Pemerintah kota Surabaya baik melalui sosialisasi/penyuluhan juga pelatihan diversifikasi pangan berbahan baku dari ikan. Perkembangan tingkat konsumsi ikan Kota Surabaya disajikan pada Tabel II. 131.

**Tabel II. 131**  
**Konsumsi Ikan Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kap/thn)	32,06	35,2	40,33	18,67*
2	Target Nasional (Kg/kap/thn)	38	40	43,88	47,12
3	Persentase Konsumsi Ikan (persen)	84,37	88	91,91	39,62

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2017

**2.1.3.3.2. Pariwisata**

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan daya tarik obyek-obyek wisata sehingga mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel II. 132 mengenai jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke Kota Surabaya.

Pada tahun 2015 jumlah kunjungan wisatawan ke kota Surabaya sebanyak 15.737.644 wisatawan dengan perincian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 638.583 wisatawan sedangkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 15.099.061 wisatawan. Sedangkan pada tahun 2016 kunjungan wisatawan ke kota Surabaya sebanyak 21.352.786 wisatawan dengan perincian jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 772.058 wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebanyak 20.580.728 wisatawan.

**Tabel II. 132**  
**Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	742.084	638.583	772.058	282.990
2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	15.929.745	15.099.061	20.580.728	3.391.900
<b>Jumlah</b>		<b>16.671.829</b>	<b>15.737.644</b>	<b>21.352.786</b>	<b>3.674.890</b>

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2017

Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perkembangan perekonomian kota Surabaya dan multiplier efek bagi kesejahteraan masyarakat. Jumlah Kunjungan Wisatawan berdasarkan objek wisata sebagaimana Tabel II. 132. Jika dibandingkan dengan total kunjungan wisata ke surabaya masih relatif kecil, hal ini menunjukkan bahwa daya tarik objek wisata di surabaya belum optimal sehingga masih diperlukan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata yang efektif.

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas obyek-obyek wisata sehingga mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan dan berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya. Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata sebagaimana tertera pada Tabel II. 133 hanya memperhitungkan jumlah wisatawan yang berkunjung pada 20

obyek wisata yang ada di kota Surabaya, belum memperhitungkan wisatawan yang berkunjung ke tempat-tempat wisata kuliner, lapangan golf, mall, maupun obyek wisata lainnya seperti hutan mangrove, museum Bank Indonesia, rumah pahlawan, dsb. Dari data pada Tabel II. 133 dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata tersebut pada tahun 2014 sebanyak 5.583.822 orang dan pada tahun 2015 sebanyak 6.034.129 orang. Sedangkan untuk tahun 2016 kunjungan wisatawan ke obyek – obyek wisata sebanyak 5.622.177 orang dan obyek wisata yang paling banyak dikunjungi adalah kawasan wisata religi Ampel. Sampai dengan triwulan 1 2017 jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata sebanyak 1.067.996 orang dan obyek wisata yang paling banyak pengunjungnya masih kawasan religi Ampel.

**Tabel II. 133**  
**Kunjungan Wisata Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Uraian	2014		2015		2016		Triwulan I 2017	
	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)
THP Kenjeran	526.617	9,43	493.191	8,17	747.950	13,30	179.566	17,60
Kenjeran Park	670.529	12,01	715.690	11,86	549.144	9,77	N/A	N/A
Taman Prestasi	32.872	0,59	31.553	0,52	41.925	0,75	14.170	1,39
Taman Hiburan Rakyat	15.359	0,28	16.960	0,28	18.725	0,33	3.995	0,39
Taman Remaja Surabaya	382.276	6,85	354.230	5,87	157.470	2,80	27.796	2,72
Monumen Tugu Pahlawan	166.565	2,98	223.463	3,7	246.400	4,38	58.163	5,70
Kawasan Wisata Religi Ampel	1.950.698	34,93	2.040.476	33,82	1.513.076	26,91	323.102	31,67
Masjid Al-Akbar	25.149	0,45	38.027	0,63	75.123	1,34	24.573	2,41
Masjid Cheng Ho	18.583	0,33	24.914	0,41	20.918	0,37	5.026	0,49
Kebun Binatang	1.121.246	20,08	1.148.465	19,03	1.157.643	20,59	253.046	24,81
Monumen Kapal Selam	18.286	0,33	181.032	3	333.122	5,93	38.252	3,75
Monumen Jalesveva Jayamahe	43.734	0,78	15.065	0,25	-	-	-	-
Loka Jala Srana	42.217	0,76	30.762	0,51	48.247	0,86	2.556	0,25
Rumah wafat WR. Soepratman	960	0,02	470	0,01	804	0,01	263	0,03
Makam DR. Soetomo	9.602	0,17	3.554	0,06	5.101	0,09	3.157	0,31
Patung Djoko Dolog	3.114	0,06	1.627	0,03	5.399	0,10	N/A	N/A
Balai Pemuda	80.241	1,44	264.875	4,39	252.299	4,49	65.783	6,45
House Of Sampoerna	176.710	3,16	194.700	3,23	212.100	3,77	19.600	1,92
Ciputra Water Park	283.722	5,08	233.388	3,87	227.704	4,05	47.931	4,49
Museum Kesehatan	15.342	0,27	21.687	0,36	9.027	0,16	1.017	0,10
<b>Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata</b>	<b>5.583.822</b>	<b>100</b>	<b>6.034.129</b>	<b>100</b>	<b>5.622.177</b>	<b>100</b>	<b>1.067.996</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2017

### 2.1.3.3.3. Pertanian

Perkembangan pertanian di Surabaya dapat dilihat dari kontribusi sub kategori pertanian terhadap perekonomian surabaya dan produktivitas serta hasil produksi pertanian di Surabaya. Sebagaimana Tabel II. 134 sampai dengan Tabel II. 135 berikut:

**Tabel II. 134**  
**Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Total Nilai Tambah PDRB	365.354.831,12	406.196.760,34	452.345.242,07	N/A
Total Nilai Tambah Sub Kategori Pertanian	82.456,89	91.158,03	98.797,92	N/A
Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB	0,02%	0,02%	0,02%	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016

Kontribusi Sub Kategori pertanian di Surabaya terhadap PDRB kota Surabaya dari tahun ke tahun relatif kecil yaitu 0,02%, hal ini disebabkan karena semakin terbatasnya lahan pertanian di kawasan kota Surabaya serta mulai beralihnya mata pencaharian petani ke sektor yang lain yang lebih menjanjikan dari segi ekonomi. Hal ini perlu dilakukan upaya yang dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian dengan mengaplikasikan teknologi tepat guna, pemilihan jenis komoditi serta penyuluhan dan pendampingan yang intensif.

**Tabel II. 135**  
**Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar**  
**Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1.	Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ton)	9.424,51	11.177,96	11.799,80	4.623
2.	Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ha)	1.687,00	1.760,31	2.289	893
3.	Produktivitas (ton/ha)	5,59	6,35	5,16	5,2

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2017

Pada Tabel II. 135 disajikan data bahwa jumlah produksi padi/bahan pangan utama lainnya di kota Surabaya pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 5,6% dari tahun 2015 atau meningkat dari 11.177,96 ton menjadi 11.799,80 ton. Peningkatan jumlah produksi tersebut dikarenakan adanya penambahan luas areal penanaman akibat adanya penambahan pola tanam yang semula 1 atau 2 kali tanam menjadi 2 atau 3 kali tanam dalam satu tahun. Sedangkan produktivitas justru mengalami penurunan yaitu pada tahun 2015 sebesar 6,35 ton/ha menjadi 5,16 ton/ha, hal ini dikarenakan kondisi cuaca yang tidak menentu sehingga berpengaruh pada tingkat produktivitas tanaman padi.

**Tabel II. 136**  
**Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017*
1.	Jumlah Produksi Padi (ton)	9.424,51	11.177,96	11.799,80	4.623
2.	Jumlah Produksi Jagung (ton)	366,43	948,79	519,2	97,71
3.	Jumlah Produksi Lombok (ton)	115,43	299	406,9	167,8
4.	Jumlah Produksi Sayur (ton)	566,37	584,81	757,2	342,46
5.	Jumlah Produksi Buah (ton)	10.058,57	3.726,10	4.466,57	0

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2017

Produksi hasil pertanian menurut jenis komoditi (padi, jagung, lombok, sayur dan buah) dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Untuk tahun 2016 komoditi yang mengalami peningkatan produksi yaitu padi, lombok dan sayur, sedangkan jagung dan buah mengalami penurunan. Produksi jagung mengalami penurunan antara lain disebabkan berkurangnya luas areal penanaman jagung karena beralih ke komoditi padi. Data perkembangan produksi hasil pertanian menurut jenis komoditi disajikan sebagaimana Tabel II. 136.

#### **2.1.3.3.4. Perdagangan**

Perdagangan di Surabaya merupakan salah satu sektor/kategori yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Kota Surabaya yaitu lebih dari 26persen, hal ini ditunjukkan dengan perkembangan jumlah pasar modern, pasar

tradisional yang dikelola PD Pasar dan pembangunan pasar oleh pemerintah kota sebagaimana Tabel II. 137 sampai dengan Tabel II. 139.

**Tabel II. 137**  
**Jumlah Pasar Modern Di Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No	Jenis Pasar Modern	Tahun			
		2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Factory Outlet	31	31	0	0
2	Supermarket	35	48	53	53
3	Minimarket	348	476	317	317
4	Departement Store	18	8	7	7
5	Mall/Plaza	24	33	28	28
6	Waralaba Asing	29	29	0	0
Total		603	625	405	405

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Surabaya, 2017

Perkembangan pasar modern yang cukup pesat perlu adanya upaya untuk melakukan pengendalian agar tidak mematikan pasar tradisional dan usaha kecil. Kehadiran toko modern diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan daya saing UMK (usaha Mikro Kecil). Untuk menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan pembangunan pasar-pasar tradisional, serta berupaya meningkatkan peran PD. Pasar Surya untuk mengoptimalkan pengelolaan pasar-pasar tradisional yang dikelola.

**Tabel II. 138**  
**Pasar Yang Dibangun Oleh Pemerintah Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No	Tahun			
	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Pasar Sememi/ Bandarejo (Lanjutan)	Pasar Sememi/ Bandarejo (Lanjutan)	N/A	N/A
2	Pasar Gunung Anyar (Lanjutan)	Pasar Gunung Anyar (Lanjutan)	N/A	N/A
3	Nambangan/ Kenjeran	Nambangan/ Kenjeran	N/A	N/A
4	Kakahrejo	Kakahrejo	N/A	N/A
5	Dupak	Dupak	N/A	N/A

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2017



**Tabel II. 139**  
**Jumlah Pasar PD Pasar Surya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Cabang	Tahun			
	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Selatan	17	17	17	17
Timur	22	22	22	22
Utara	28	28	28	28
<b>Total</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>

Sumber : PD Pasar Surya, 2017

Perkembangan sektor perdagangan selain ditunjukkan dengan perkembangan pasar modern, juga dapat dilihat dari ijin usaha perdagangan yang mengalami peningkatan cukup signifikan dalam kurun waktu 5 tahun, sebagaimana pada Tabel II. 140 berikut:

**Tabel II. 140**  
**Jumlah Usaha Berdasarkan Ijin yang Berlaku Di Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No	Jenis Perusahaan	Tahun			
		2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Perdagangan	12.803	14.666	13.670	3.977
2	Industri	303	309	275	63
<b>Total</b>		<b>13.106</b>	<b>14.975</b>	<b>13.945</b>	<b>4.040</b>

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Surabaya, 2017

Dalam upaya mewujudkan Kota Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional yang berdaya saing global, dilakukan integrasi fasilitas pendukung perdagangan dan jasa (termasuk di dalamnya pelabuhan laut dan udara, pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, terminal dan stasiun) melalui implementasi manajemen logistik kota/city logistic.

Aktivitas perdagangan dikota surabaya dapat dilihat dari aktivitas ekspor impor yang tercermin dari Tabel II. 141.

**Tabel II. 141**  
**Ekspor Bersih Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Nilai Ekspor (US \$)	18.022.413.011	16.452.486.419	17.901.405.669	N/A
2	Nilai Impor (US \$)	17.056.615.375	14.888.180.928	14.849.559.537	N/A
3	Nilai Ekspor Bersih (US \$)	965.797.636	1.564.305.491	3.051.846.132	N/A

Sumber: Bank Indonesia, 2017

Berdasarkan perkembangannya, neraca perdagangan Kota Surabaya pada tahun 2016 tercatat surplus sebesar US \$3.051.846.132 yang lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang tercatat sebesar US \$1.564.305.491. Neraca perdagangan yang mengalami surplus tersebut didorong seiring dengan meningkatnya permintaan eksternal, dari US\$16.452.486.419 pada tahun 2015 menjadi US \$17.901.405.669 pada tahun 2016. Meningkatnya permintaan eksternal turut dipengaruhi oleh perbaikan kondisi ekonomi mitra dagang Kota Surabaya seperti China, Amerika Serikat dan Jepang. Dengan demikian, terjagana kondisi ekonomi mitra dagang Kota Surabaya mendorong peningkatan net ekspor Kota Surabaya selama tahun 2016.

#### **2.1.3.4. Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Manajemen Non Pelayanan Dasar**

##### **2.1.3.4.1. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**

Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh PD, yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

RPJMD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam hal ini, rencana program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Melalui RKPD, Renstra serta Renja PD, program-program pembangunan pada RPJMD dijabarkan secara operasional menjadi rencana kegiatan yang

dilaksanakan di setiap tahun. Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan, maka kinerja program dan kegiatan diukur secara periodik untuk memastikan kegiatan yang direncanakan secara efektif menunjang pencapaian keberhasilan program.

Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Surabaya telah menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015. Dokumen tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 tahun 2012 untuk RPJPD dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 tahun 2012 untuk RPJMD. Sehingga dengan ditetapkan dokumen perencanaan tersebut dalam peraturan daerah, Pemerintah Kota telah memiliki dokumen perencanaan yang memiliki kekuatan hukum. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II. 142**  
**Dokumen Perencanaan Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Jenis Dokumen	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	RPJPD	Ada	Ada	Ada	Ada
2	RPJMD	Ada	Ada	Ada	Ada
3	RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, 2017.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rencana capaian kinerja program pembangunan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Program-program pembangunan yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan dilaksanakan melalui program pembangunan daerah. Pada tahun 2014 dan 2015 jumlah program pembangunan pada RKPD adalah sebanyak 60 program. Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan program-program pembangunan telah mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur.

**Tabel II. 143**  
**Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan	58	58	79	102
2	Jumlah Program RKPD	58	60	79	102
3	Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, 2017

**Tabel II. 144**  
**Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Tahun	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	89,66%	88,33%	94,94%	N/A

Sumber : Bappeko Surabaya, 2017

Salah satu unsur pembentuk tata kelola pemerintah adalah terkait tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat ditunjukkan dari rata-rata penyerapan anggaran kegiatan, sehingga diperlukan upaya untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan efisien.

**Tabel II. 145**  
**Rata – Rata Penyerapan anggaran Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya**

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Rata-rata penyerapan anggaran kegiatan	82,66	74,35	89,29	N/A

Sumber : Bappeko diolah, 2017

#### 2.1.3.4.2. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah

##### 2.1.3.4.2.a Tata Kelola Pemerintahan

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja meliputi

perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Penilaian evaluasi SAKIP dapat dilihat pada Tabel II. 146.

**Tabel II. 146**  
**Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	CC	B	B	-
2.	Nilai Evaluasi SAKIP	57,48	60,2	63,08	-

Sumber : Bagian Organisasi, 2017

Pada tahun 2016, telah dilaksanakan penilaian evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Surabaya untuk tahun 2015 dengan nilai 63,08 atau tingkat akuntabilitas kinerjanya B. Hasil penilaian evaluasi SAKIP tahun 2016 belum dapat diketahui karena baru akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2017 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Dari segi ketatalaksanaan, perangkat daerah menjalankan ketatalaksanaan dengan berpedoman pada *standard operational procedure* (SOP). Dalam hal ini, perangkat daerah perlu melakukan pemrosesan produk inti atau rancangan SOP sampai ditetapkan dalam Peraturan Walikota maupun surat keputusan Kepala SKPD.

Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya menjalankan ketatalaksanaan pelaksanaan pemerintahan dengan berpedoman pada adanya *standard operational procedure* (SOP) pada setiap jenis pelayanan. Pada 329 jenis pelayanan, sebanyak 267 jenis pelayanan atau 81,16% telah memiliki *standard operational procedure* (SOP).

**Tabel II. 147**  
**Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP Tahun 2016 – Triwulan I 2017**

No	Uraian	2016	Triwulan I 2017
1.	Jumlah jenis pelayanan	329	Tahap Pelaksanaan
2.	Jumlah jenis pelayanan yang memiliki SOP	267	
3.	Persentase jenis pelayanan yang memiliki SOP	81,16%	

Sumber : Bagian Organisasi, 2017

Pemerintah Kota Surabaya juga berkomitmen untuk terus mensinkronkan produk hukum daerah dengan peraturan perundangan di atasnya. Hal ini ditunjukkan pada Tabel II. 148.

**Tabel II. 148**  
**Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1.	Jumlah rancangan produk hukum	89	87	73	12
2.	Jumlah rancangan produk hukum yang diselesaikan	89	87	73	12
3.	Persentase rancangan produk hukum yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bagian Hukum, 2017

#### 2.1.3.4.2.b Pelayanan Publik

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Hasil SKM menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Surabaya disajikan pada Tabel II. 149 berikut.

**Tabel II. 149**  
**Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Survey Kepuasan Masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada
Rata-rata nilai SKM Pelayanan Pemerintah Kota Surabaya	77,13	72,89	82,67	Tahap Pelaksanaan

Sumber: Bagian Organisasi, 2017

Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat pada tahun 2016 telah mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2016 dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil, UPTSA Surabaya Pusat, UPTSA Surabaya Timur, RSUD Bhakti Dharma Husada, RSUD Dr. M. Soewandhie, Laboratorium Kesehatan Daerah, 63 puskesmas, 31 kecamatan, dan 154 kelurahan di Kota Surabaya. Dari survey tersebut diperoleh hasil untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk kategori sangat puas, UPTSA Surabaya Pusat masuk kategori puas, UPTSA Surabaya Timur masuk kategori sangat puas, RSUD Bhakti Dharma Husada, RSUD Dr. M. Soewandhie, Laboratorium Kesehatan Daerah, 63 Puskesmas masuk kategori puas, 28 kecamatan masuk kategori sangat puas dan 3 kecamatan masuk kategori puas. Sedangkan 89 kelurahan masuk kategori sangat puas dan 65 kelurahan masuk kategori puas. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa belum semua unit pelayanan publik termasuk dalam kategori sangat puas. Tahun 2017 pelaksanaan survey kepuasan masyarakat akan dilaksanakan pada bulan April.

#### **2.1.3.4.2.c Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya**

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik kerjasama antar pemerintah daerah maupun kerjasama dengan pihak luar negeri merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dilaksanakan guna mengembangkan dan meningkatkan kerjasama, antara lain dengan perluasan jaringan kerjasama Kota Surabaya dengan mitra kerjasama di dalam dan di luar negeri serta peningkatan kualitas upaya tindak lanjut kerjasama guna menciptakan integrasi antar daerah dalam menyelesaikan permasalahan lintas sektor.

Kerjasama bidang perdagangan baru akan dilaksanakan pada tahun 2017. Pada tahun 2016 terdapat 112 MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga. Dari jumlah tersebut sebanyak 94 MoU atau 83,93% memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya. Untuk kerjasama luar negeri, terdapat 8 MoU dan 6 MoU diantaranya memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya. Dari keseluruhan 120 MoU kerjasama antar daerah, pihak ketiga, dan luar negeri, 49 MoU diantaranya telah dievaluasi. Pada triwulan I 2017, sebanyak 55 MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga yang memberikan manfaat, dari 111 MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga, atau sebesar 49,55%.

**Tabel II. 150**  
**Persentase MoU Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga**  
**yang Memberikan Manfaat Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1.	Jumlah MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga yang memberikan manfaat	28	25	96	55
2.	Jumlah keseluruhan MoU antar daerah dan pihak ketiga	29	25	112	111
3.	Persentase MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga yang memberikan manfaat	96,55%	100%	85,71%	49,55%

Sumber : Bagian Administrasi Kerjasama, 2017

**Tabel II. 151**  
**Persentase MoU Kerjasama Luar Negeri Yang Memberikan Manfaat**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1.	Jumlah MoU kerjasama luar negeri yang memberikan manfaat	8	8	6	3
2.	Jumlah keseluruhan MoU luar negeri	8	8	8	8
3.	Persentase MoU kerjasama luar negeri yang memberikan manfaat	100%	100%	75,00%	37,50%

Sumber : Bagian Administrasi Kerjasama, 2017

Salah satu kerjasama yang dijalin adalah kerjasama dengan Pemerintah Daerah di kawasan sekitar, yakni:

- (1) Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui:
  - a. Perjanjian Kerjasama Nomor 181.4/2063/013/2013 dan 180/4617/436.1.2/2013 Tanggal 31 Juli 2013 tentang Pemanfaatan Mata Air Umbulan dan Pendistribusian Air Minum kepada Kota Surabaya
  - b. Perjanjian Kerjasama Nomor 120.1/54/012/2016 dan 415.4/3194/436.2.3/2016 pada tanggal 24 Juni 2016 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)
- (2) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui:



- a. Kesepakatan Bersama Nomor 188/16/404.1.1.2/2016 dan 415.4/9899/436.2.3/2016 pada tanggal 28 September 2016 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan
- b. Kesepakatan Bersama Nomor 30 Tahun 1991 dan 119/057/adpum/2014 pada tanggal 13 Agustus 1998 tentang Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang Umum "PURABAYA" di Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

#### 2.1.3.4.2.d Pengawasan

Selain peningkatan kapasitas dan kompetensi, diperlukan unsur pengawasan internal guna mendisiplinkan aparatur. Sanksi disiplin aparatur sebagaimana ditunjukkan pada Tabel II. 152 mengalami fluktuasi. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi pengawasan internal agar mengurangi sanksi.

**Tabel II. 152**  
**Rekapitulasi Sanksi Disiplin Terhadap Aparatur**  
**Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya**  
**Tahun 2011 – Triwulan I 2017**

JENIS HUKUMAN DISIPLIN		2015	2016	Triw I 2017
<b>Hukuman Disiplin Ringan</b>				
1	Teguran Lisan	3		0
2	Teguran Tertulis	0	2	10
3	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	2	2	
<b>Jumlah Hukuman Disiplin Ringan</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
<b>Hukuman Disiplin Sedang</b>				
1	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun	1	2	0
2	Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun	2	1	0
3	Penurunan Pangkat Pada Pangkat Yang Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun	0	1	0
<b>Jumlah Hukuman Disiplin Sedang</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>Hukuman Disiplin Berat</b>				
1	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun	5	7	3
2	Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan setingkat Lebih Rendah	0	0	1

JENIS HUKUMAN DISIPLIN		2015	2016	Triw I 2017
3	Pembebasan Dari Jabatan	4	8	0
4	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil	4	5	0
5	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil	3	1	0
6	Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai CPNS	0		1
<b>Jumlah Hukuman Disiplin Berat</b>		<b>16</b>	<b>21</b>	<b>5</b>
<b>Hukuman Disiplin PP 4 Tahun 1966</b>				
d	Pemberhentian Sementara <b>(PP. No. 04 Tahun 1966)</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
e	Pencabutan Pemberhentian Sementara	1	0	0
f	Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri / Pensiun Dini / Mengundurkan diri	0	0	0
g	Pemberhentian Dengan Hormat Karena Menjadi Anggota Parpol	0	0	0
h	Rehabilitasi	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN</b>		<b>27</b>	<b>32</b>	<b>15</b>

Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat, 2017

### 2.1.3.5. Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Manajemen Non Pelayanan Dasar

#### 2.1.3.5.1. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, salah satunya melalui pelaksanaan diklat. Tabel II. 153 menunjukkan bahwa masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat struktural sehingga diperlukan penyelenggaraan diklat secara komprehensif.

**Tabel II. 153**  
**Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Struktural**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1.	Jumlah pejabat struktural	1.654	1.645	1.638	1.609
2.	Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	1.320	1.387	1.135	1.405

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
3.	Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	79,81%	84,32%	69,29%	87,32 %

Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat, 2017

#### 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

##### 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi dapat diukur dari tingkat konsumsi rumah tangga, produktivitas per kategori lapangan usaha. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

**Tabel II. 154**  
**Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Tahun	Konsumsi Rumah Tangga perkapita				Total	
	Makanan	persen	Non Makanan	persen		
2014	511.325	36,82	877.523	63,18	1.388.848	100
2015	581.474	33,75	1.141.526	66,25	1.722.999	100
2016	727.886	39,94	1.094.588	60,06	1.822.474	100
Triwulan I 2017	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2017

Konsumsi Rumah tangga setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Jika diuraikan berdasarkan kelompok pengeluaran, persentase terbesar pada kelompok non makanan. Semakin besarnya proporsi konsumsi non makanan dibanding konsumsi makanan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya meningkat.

Produktivitas ekonomi Kota Surabaya yang tercermin sebagaimana Tabel II. 155 berikut:

**Tabel II. 155**  
**Produktivitas Ekonomi di Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Uraian	Tahun			Triwulan I 2017
	2014	2015	2016	
Angkatan Kerja (orang)	1.465.502	1.468.094	N/A	N/A
PDRB (Juta Rp)	365.354.831,12	406.196.760,3	452.345.242,07	N/A
Produktivitas (Juta per orang)	249,30	276,68	N/A	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya diolah, 2017

Produktivitas ekonomi yang merupakan cerminan dari PDRB Kota Surabaya maka untuk menunjang pembangunan ekonomi. Dari beberapa sub kategori PDRB yang menjadi salah satu prioritas antara lain yang pendukung perdagangan yaitu kategori transportasi dan pergudangan.

**Tabel II. 156**  
**Perkembangan PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan**

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
<b>Nilai PDRB ADHB</b>				
<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>19.016.375,3</b>	<b>21.369.674,6</b>	23.634.681,26	N/A
1 Angkutan Rel	151.459,0	194.327,6	233.756,50	N/A
2 Angkutan Darat	4.278.765,5	4.829.863,8	5.440.711,52	N/A
3 Angkutan Laut	2.942.710,4	3.343.306,0	3.697.317,86	N/A
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	76.754,0	84.079,4	92.817,17	N/A
5 Angkutan Udara	-	-	-	N/A
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	11.566.686,5	12.918.097,7	14.170.087,20	N/A
<b>Laju Pertumbuhan</b>				
<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>7,94</b>	<b>5,59</b>	<b>4,78</b>	N/A
1 Angkutan Rel	15,36	16,12	9,61	N/A
2 Angkutan Darat	6,17	6,37	7,49	N/A
3 Angkutan Laut	11,82	8,71	4,07	N/A
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	6,86	5,26	4,20	N/A
5 Angkutan Udara	-	-	-	N/A
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	7,57	4,35	3,77	N/A

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2017

## 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

### 2.1.4.2.1. Penataan Ruang

Pada tahun 2016, sebagian besar luasan wilayah budidaya di Kota Surabaya adalah berupa wilayah produktif yaitu sebesar 93,27 persen, dan sampai dengan triwulan I 2017, wilayah produktif Kota Surabaya seluas 23.665,80 Ha atau sebesar 93,27 persen dari luas seluruh wilayah budidaya. Wilayah produktif di Kota Surabaya antara lain berupa kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum, komersial, industri dan militer.

**Tabel II. 157**  
**Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
2	Luas Wilayah Produktif (ha)	23.665,80	23.665,80	23.665,80	23.665,80
3	Persentase luas wilayah produktif (persen)	93,27	93,27	93,27	93,27

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2017

**Tabel II. 158**  
**Rasio Luas Wilayah Industri Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
2	Luas Wilayah Industri (ha)	2.506,40	2.506,40	2.506,40	2.506,40
3	Rasio luas wilayah industri (persen)	9,88	9,88	9,88	9,88

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2017

Berdasarkan luasannya, wilayah industri di Kota Surabaya terbagi menjadi kawasan industri dan zona industri. Kawasan industri berlokasi di kawasan Rungkut dan kawasan Margomulyo. Sedangkan zona industri berlokasi tersebar di beberapa tempat antara lain kawasan Kalirungkut kawasan Karangpilang, kawasan Tanjungsari dan kawasan Kalianak. Luas wilayah industri pada tahun 2016 adalah

sebesar 9,88 persen dari keseluruhan Kota Surabaya dan sampai dengan triwulan I 2017 sebesar 9,88 persen.

**Tabel II. 159**

**Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
2	Luas Wilayah Perkotaan (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
3	Rasio luas wilayah perkotaan (persen)	100	100	100	100

Sumber: Review RTRW Kota Surabaya, 2017

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Seluruh kawasan budidaya yang ada di Kota Surabaya adalah merupakan kawasan perkotaan karena kegiatan utama pada kawasan budidaya di Kota Surabaya adalah bukan pertanian. Untuk itu rasio luas wilayah perkotaan adalah sebesar 100 persen dari keseluruhan kawasan budidaya di Kota Surabaya.

#### **2.1.4.2.2. Perhubungan**

Dari tahun ke tahun, jumlah kendaraan di Kota Surabaya selalu mengalami peningkatan cukup tajam. Terlihat pada tahun 2014 jumlah kendaraan sebanyak 2.285.382 kendaraan, dan menjadi 2.361.250 kendaraan pada tahun 2015. Hal ini tidak sebanding dengan peningkatan panjang jalan Kota Surabaya di mana pada tahun 2014 panjang jalannya mencapai sejumlah 1.679.140 meter dan pada tahun 2015 panjang jalan meningkat menjadi 1.683.116 meter saja. Untuk itu, diperlukan upaya untuk melakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui *Traffic Demand Management* yang diwujudkan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas-ruas jalan.

Data jumlah kendaraan tahun 2016 bisa didapatkan pada pertengahan tahun 2017 dikarenakan perhitungan jumlah kendaraan (kepemilikan) dihitung oleh BPKAD Jatim (melalui perhitungan pajak kendaraan bermotor di Kota Surabaya) dan Kota/Kabupaten tidak mempunyai kewenangan akan hal tersebut.

**Tabel II. 160**  
**Perbandingan Panjang Jalan Dengan jumlah Kendaraan di Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Panjang Jalan (m)	1.679.140	1.683.116	1.686.380,5	N/A
2	Jumlah Kendaraan	2.285.382	2.361.250	N/A	N/A

Sumber: Dinas Perhubungan, 2017

#### 2.1.4.2.3. Drainase

Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan pengembangan dan optimalisasi kinerja sistem drainase karena kondisi geografis Kota Surabaya yang relatif datar dan berada di pesisir pantai sehingga mengakibatkan sistem drainase kota tidak hanya dipengaruhi oleh hujan, namun juga oleh pasang surut air laut.

Lama rata-rata terjadinya genangan Kota Surabaya mengalami penurunan. Pada tahun 2014 lama rata-rata terjadinya genangan Kota Surabaya sebesar 54,75 menit dan pada tahun 2015 sebesar 53,38 menit. Pada tahun 2016, capaian lama rata-rata terjadinya genangan sebesar 52,98 menit sebagaimana tampak pada tabel berikut.

**Tabel II. 161**  
**Rata-rata Lama Terjadinya Genangan Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Rata-rata Lama Terjadinya Genangan	54,75	53,38	52,98	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2017

Rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya mengalami juga mengalami penurunan. Pada tahun 2014 rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya sebesar mencapai 16,82 cm dan pada tahun 2015 turun menjadi 16,40 cm. Pada tahun 2016, rata-rata tinggi genangan sebesar 16,27 cm, dan sampai dengan triwulan I 2017, pekerjaan fisik masih dalam progress pelaksanaan di lapangan sehingga belum ada capaian sebagaimana tampak pada tabel berikut.

**Tabel II. 162**  
**Rata-rata Tinggi Genangan Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Rata-rata Tinggi Genangan	16,82	16,40	16,27	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2017.

Berdasarkan Tabel II. 163 dapat terlihat bahwa luasan wilayah genangan Kota Surabaya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 luasan wilayah genangan sebesar 1.303 ha, dan pada Tahun 2015 tercapai sebesar 1.271 ha, dan pada tahun 2016 sebesar 1.257 ha. Sampai dengan triwulan I 2017, pekerjaan fisik masih dalam progress pelaksanaan di lapangan sehingga belum ada capaian sebagaimana tampak pada tabel berikut.

**Tabel II. 163**  
**Luas Wilayah Genangan di Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Luas Wilayah Genangan (ha)	1.303	1.271	1.257	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2017

Pemerintah Kota Surabaya dalam mengendalikan banjir dan genangan telah melakukan pembangunan sarana prasarana serta normalisasi saluran pematusan di Kota Surabaya antara lain membangun boezem-boezem kurang lebih seluas 124,78 hektar, membangun dan meningkatkan kapasitas pompa sebanyak 56 rumah pompa, serta mengembangkan sistem pemantauan ketinggian muka air pada muara-muara saluran yang menuju ke laut (*smart water level*) sehingga pada ketinggian tertentu, pompa harus segera dioperasikan untuk mencegah timbulnya genangan di wilayah tersebut (Gambar II.10). Hingga sekarang, smart water level telah terpasang pada 7 (tujuh) rumah pompa, yaitu pada Pompa Boezem Kalidami, Pompa Boezem Morokrengan, Pompa Darmokali, Pompa Balong II, Pompa Gadukan, Pompa Dinoyo dan Pompa Tambak Wedi. Namun masih terjadi genangan di beberapa wilayah di Kota Surabaya. Dalam upaya menurunkan luas wilayah genangan ini, Pemerintah Kota Surabaya telah dan akan terus melakukan upaya peningkatan sarana prasarana pematusan antara lain melalui pembangunan dan normalisasi saluran, peningkatan kapasitas pompa, pembangunan rumah pompa



baru, boezem, tanggul laut, dan pemasangan smart water level di rumah pompa lainnya.



Perangkat



Sensor dan Tiang Penyangga



Display Matrix

**Gambar II. 10**  
**Perangkat Smart Water Level**

#### 2.1.4.2.4. Air Bersih

Seiring meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan jumlah penduduk yang terlayani air bersih juga mengalami peningkatan. Rincian peningkatan prosentase cakupan layanan air bersih seperti pada Tabel II. 164 di bawah ini.

**Tabel II. 164**  
**Persentase Cakupan Layanan Air Bersih Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Total Jumlah Penduduk Terlayani Air Bersih	2.585.137	2.997.360	3.127.782	3.137.496
2	Jumlah Penduduk*	2.790.414	3.234.925	3.274.687	3.266.218
3	Cakupan Layanan Air Bersih (%)	92,64	92,66	95,51	96,06

Sumber: PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, 2017

Untuk peningkatan pelayanan air bersih perkotaan, Pemerintah Kota Surabaya dan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya telah melakukan upaya pembangunan jaringan pipa tersier, pemasangan sambungan rumah, master meter,

pembangunan reservoir, rehabilitasi jaringan pipa distribusi dan penggantian meter air pelanggan. Cakupan layanan air bersih di Kota Surabaya pada tahun 2014 sebesar 92,64 persen menjadi 92,66 persen pada tahun 2015. Hingga tahun 2016 cakupan layanan air bersih di Kota Surabaya telah mencapai 95,51 persen dan pada triwulan I tahun 2017 mencapai 96,06 persen, selanjutnya akan terus dioptimalkan pelayanannya dalam mencapai target 100 persen sesuai dengan yang diamanatkan secara nasional pada program 100-0-100.

#### 2.1.4.2.5. Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan penyebaran dan layanan jaringan utilitas kota diantaranya dengan terus meningkatkan sistem jaringan dan kualitas PJU secara merata di seluruh wilayah Kota Surabaya. Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya sampai dengan tahun 2016 terus bertambah hingga 4.405 titik.

**Tabel II. 165**

#### **PJU yang Dikelola Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

Tahun	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
Jumlah PJU (Titik)	7.216	5.320	5.293	122

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, 2017

Setiap tahun Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan pemasangan PJU di seluruh Kota Surabaya secara merata. Selain melakukan pemasangan baru PJU tersebut, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan kegiatan pelimpahan rekening PJU dari warga. Dengan semakin banyaknya PJU yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya, maka beban tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya semakin besar. Oleh karena itu salah satu upaya yang terus dilakukan adalah dengan melakukan pemasangan PJU yang hemat energi sehingga semakin banyaknya PJU hemat energi yang terpasang di Kota Surabaya maka beban tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya bisa semakin berkurang dan sekaligus dapat mendukung upaya penghematan / konservasi energi kota.

### 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

#### 2.1.4.3.1. Keamanan dan Ketertiban

Untuk meningkatkan iklim investasi, Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan pengendalian terhadap demonstrasi atau unjuk rasa. Adapun jumlah kejadian unjuk rasa di Surabaya pada tahun 2014 – triwulan I 2017 dapat dilihat pada Tabel II. 166 berikut.

**Tabel II. 166**  
**Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Bidang Politik	86	90	48	0
2	Ekonomi	91	126	126	20
3	Sosial Budaya	105	129	165	20
4	Jumlah unjuk rasa	282	345	339	40

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2017

Jumlah unjuk rasa di kota Surabaya dari tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan, namun kondisi keamanan dan ketertiban di Surabaya masih tetap kondusif dan tidak menimbulkan kerusuhan, hal ini dikarenakan adanya pendekatan persuasif dan antisipasi dini yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan instansi terkait serta masih tingginya kesadaran warga kota Surabaya akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban kota sebagai modal utama dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di Kota Surabaya.

Seperti disajikan pada Tabel II. 167 dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk menerbitkan peraturan yang mendukung iklim usaha Kota Surabaya, antara lain perda terkait perijinan, lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait ketenagakerjaan. Pada tahun 2016, perda yang mendukung iklim usaha adalah Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah (IPT). Sampai dengan tahun 2017 triwulan I Perda yang terkait perijinan, lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait ketenagakerjaan belum ada karena perda tahun 2016 masih berlaku.

**Tabel II. 167**  
**Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya**  
**Tahun 2011-2016**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1.	Jumlah Perda Terkait Perijinan	1	3	2	1	1	1	0
2.	Jumlah Perda Terkait Lalu Lintas Barang Dan Jasa	1	3	0	0	0	0	0
3.	Jumlah Perda Terkait Ketenagakerjaan	0	0	0	0	1	0	0

Sumber :Bagian Hukum 2016, \*)Angka Perkiraan/Sementara

#### 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

##### 2.1.4.4.1. Ketenagakerjaan

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang tercermin dari jumlah lulusan sarjana. Data terkait rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Surabaya sebagaimana Tabel II. 168.

**Tabel II. 168**  
**Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Surabaya**  
**Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah lulusan S1	291.423	297.023	325.755	326.520
2	Jumlah lulusan S2	18.914	19.647	21.579	21.779
3	Jumlah lulusan S3	1.100	1.204	1.279	1.287
4	Jumlah lulusan S1/S2/S3	311.437	317.874	348.613	349.586
5	Jumlah penduduk	2.853.661	2.943.528	3.307.300	3.316.131
6	Rasio lulusan S1/S2/S3	0,109	0,108	0,105	0,105

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

##### 2.1.4.4.2. Tingkat ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun dengan jumlah penduduk yang belum/tidak produktif, yaitu penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya

beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya.

**Tabel II. 169**  
**Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2014 – Triwulan I 2017**

No	Uraian	2014	2015	2016	Triwulan I 2017
1	Jumlah penduduk usia <15 tahun	613.554	636.425	717.636	716.772
2	Jumlah penduduk usia >64 tahun	170.895	182.446	220.340	222.248
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif	784.449	818.871	937.976	939.020
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	2.069.212	2.124.657	2.369.324	2.377.111
6	Rasio ketergantungan	0,379	0,385	0,396	0,395

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

Dari data rasio ketergantungan pada tabel di atas Komposisi penduduk Surabaya per triwulan I Tahun 2017, berdasarkan kelompok usia non produktif usia (0-15 th) sebesar 716.772 orang (21,61%), dan usia (64+) sebesar 222.248 orang (6,70%), sedangkan kelompok usia produktifnya (15-64th) sebesar 2.377.111 orang (71,68%). Sehingga rasio ketergantungannya sebesar 0,39 yaitu setiap 100 orang yang berusia kerja/produktif mempunyai tanggungan sebanyak 39 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

## **2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**

Perumusan permasalahan pembangunan Tahun 2018, sebagaimana dituangkan dalam RKPD ini, berpijak pada capaian kinerja pembangunan daerah pada tahun tahun 2016, juga memperhatikan isu strategis yang dihadapi baik di tingkat daerah maupun nasional.

Adapun capaian kinerja pembangunan Kota Surabaya berdasarkan urusan pemerintahan daerah, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 dan triwulan I 2017 dijelaskan pada Tabel Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan sebagaimana Tabel II.170 berikut.